



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEREKONOMIAN

Daerah Istimewa Yogyakarta

Februari 2025



LAPORAN PEREKONOMIAN

Daerah Istimewa Yogyakarta

FEBRUARI 2025

Visi, Misi & Nilai Strategis Bank Indonesia



VISI

Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia maju.



MISI

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran Kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran Kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif.



Nilai – Nilai Strategis

Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah: (i) kejujuran dan integritas (*trust and integrity*); (ii) profesionalisme (*professionalism*); (iii) keunggulan (*excellence*); (iv) mengutamakan kepentingan umum (*public interest*); dan (v) koordinasi dan kerja sama tim (*coordination and teamwork*) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi).

Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua rahmat dan karunia-Nya, Buku Laporan Perkembangan Perekonomian (LPP) Daerah Istimewa Yogyakarta dapat hadir kembali di tangan pembaca pada tahun 2025. LPP merupakan laporan yang menyampaikan gambaran kondisi terkini dan prospek perekonomian dalam perspektif regional DIY. Asesmen regional tersebut meliputi perkembangan makroekonomi, keuangan daerah, inflasi, stabilitas sistem keuangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sistem pembayaran, serta kesejahteraan dan kemiskinan yang dipublikasikan secara triwulanan.

Pada triwulan IV 2024, pertumbuhan ekonomi DIY tercatat sebesar 5,07% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,05% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan mobilitas penduduk pada akhir tahun 2024, khususnya pada momentum Nataru dan Pilkada yang diikuti oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, ekonomi DIY menjadi yang tertinggi di wilayah Jawa dan lebih tinggi dari Nasional. Tekanan inflasi juga menurun dengan realisasi sebesar 1,28% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 1,85% (yoy), dengan batas yang terkendali dalam rentang sasaran nasional. Stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran di DIY tetap kuat dan angka kemiskinan semakin menurun seiring dengan optimisme masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi DIY.

Pertumbuhan ekonomi DIY pada 2025 diperkirakan akan kuat dan bertumbuh lebih tinggi dibandingkan 2024. Dasar optimisme ini tentunya perlu kita implementasikan dalam bentuk upaya sinergi penguatan ekonomi meski dibayangi dengan ketidakpastian global. Berdasarkan hal tersebut, kami meyakini pada 2025 ekonomi DIY akan tumbuh pada kisaran proyeksi 4,8 – 5,6% (yoy).

Kami harap buku LPP ini dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan, pemerhati ekonomi daerah, serta masyarakat umum. Kami menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyediaan data serta informasi yang diperlukan dalam penyusunan LPP ini. Kerjasama yang terjalin baik ini diharapkan dapat terus berlangsung dan semakin kuat. Kami terbuka atas seluruh masukan dari berbagai pihak untuk lebih meningkatkan kualitas laporan, agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar ke depannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan ridho-Nya dan memberikan kemudahan kepada kita semua dalam mengupayakan hasil kerja yang lebih baik untuk mewujudkan ekonomi daerah yang terus bertumbuh.

Yogyakarta, Februari 2025

**KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ttd

Ibrahim

Direktur Eksekutif

Daftar Isi

ii	Visi dan Misi Bank Indonesia
iii	Kata Pengantar
iv	Daftar Isi
vi	Daftar Tabel
vii	Daftar Grafik
x	Ringkasan Eksekutif
xi	Indikator Perekonomian

BAB I

Perkembangan Ekonomi Makro Regional

1.1.	Komponen Pengeluaran	2
1.1.1.	Konsumsi Rumah Tangga (RT)	3
1.1.2.	Konsumsi Pemerintah	4
1.1.3.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	5
1.1.4.	Ekspor Barang dan Jasa	6
1.1.5.	Impor Barang dan Jasa	7
1.2.	Komponen Penawaran (Lapangan Usaha)	8
1.2.1.	Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Hotel dan Restoran)	9
1.2.2.	Lapangan Usaha Industri Pengolahan	10
1.2.3.	Lapangan Usaha Konstruksi	10
1.2.4.	Lapangan Usaha Pertambangan dan Peggalian	11

Boks 1 : Survei Biaya Hidup Mahasiswa di DIY

BAB II

Keuangan Daerah

2.1	Realisasi APBD se-DIY Triwulan IV 2024	16
2.1.1.	Realisasi Pendapatan	16
2.1.2	Realisasi Belanja	18
2.1.3	Realisasi Pembiayaan	19
2.2.	Realisasi Pembiayaan	19

BAB III

Perkembangan Inflasi

3.1.	Perkembangan Inflasi Triwulan IV 2024	24
3.2.	Tracking Inflasi Triwulan I 2025	27
3.3.	Program Pengendalian Inflasi Daerah	28

Boks 2 : Sinergi Pengendalian Inflasi Pangan melalui GNPIP Wilayah Jawa 2025

BAB IV

Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

4.1. Kinerja Perbankan	34
4.1.1. Kondisi Umum	34
4.1.2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)	35
4.1.3. Perkembangan Kredit	37
4.1.4. Likuiditas dan Risiko Kredit Perbankan	37
4.2. Asesmen Kinerja Sektor Korporasi	37
4.2.1. Ketahanan Sektor Korporasi	38
4.2.2. Exposure Perbankan pada Sektor Korporasi	39
4.3. Kinerja Sektor Rumah Tangga	39
4.3.1. Ketahanan Rumah Tangga	41
4.3.2. Exposure Perbankan pada Sektor Rumah Tangga	42
4.4. Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	44
4.4.1. Akses Keuangan kepada UMKM	
4.4.2. Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	

Boks 3 : Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI)

BAB V

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

5.1. Perkembangan Transaksi Non Tunai	48
5.1.1. Transaksi Yang Dioperasikan Oleh Bank Indonesia (SKNBI dan RTGS)	49
5.1.2. Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Dan Uang Elektronik	52
5.2. Perkembangan Pengelolaan Uang Rupiah	
5.3. Perkembangan Transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank di DIY	

BAB VI

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

6.1. Gambaran Umum	56
6.2. Ketenagakerjaan	56
6.2.1. Partisipasi Kerja	56
6.2.2. Pengangguran	58
6.3. Kesejahteraan Masyarakat	59
6.3.1. Kesejahteraan Petani	59
6.4. Kemiskinan	59

BAB VI

Prospek Perekonomian

7.1. Prospek Perekonomian Daerah 2025	66
7.1.1. Proyeksi Ekonomi Sisi Permintaan	66
7.1.2. Proyeksi Ekonomi Sisi Lapangan Usaha	67
68	
7.2. Prospek Inflasi 2025	

Daftar Istilah	70
Daftar Singkatan	72
Tim Penyusun	74

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Jawa Keseluruhan Tahun 2024	2
Tabel 1.2.	Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Jawa Triwulan IV 2024	2
Tabel 1.3.	Pertumbuhan PDRB Triwulan IV 2024 Sisi Permintaan	3
Tabel 1.4.	Pertumbuhan PDRB Triwulan IV 2024 Sisi Lapangan Usaha	9
Tabel 2.1.	Realisasi Pendapatan Pemda se-DIY (Rp Juta)	16
Tabel 2.2.	Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota DIY	17
Tabel 2.3.	Realisasi Belanja Pemda se-DIY (Rp Juta)	18
Tabel 2.4.	Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Pemda se-DIY	19
Tabel 2.5.	Realisasi APBN di DIY Triwulan IV 2024 (Rp Miliar)	20
Tabel 2.6.	Penerimaan Perpajakan Triwulan IV 2024 (Rp Miliar)	20
Tabel 3.1.	Tren Perkembangan Inflasi DIY (% yoy)	25
Tabel 3.2.	Perkembangan Andil Inflasi DIY per Kelompok Pengeluaran (% yoy)	25
Tabel 3.3.	Perkembangan Inflasi DIY Triwulan I* 2025 per Kelompok Pengeluaran (% yoy)	27
Tabel 6.1.	Status Keadaan Ketenagakerjaan di DIY	56
Tabel 6.2.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di DIY	57
Tabel 6.3.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	58
Tabel 6.4.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di DIY	58
Tabel 6.5.	Garis Kemiskinan Menurut Tipe Daerah di DIY	61
Tabel 7.1.	Faktor Pendorong dan Penahan Pertumbuhan Ekonomi DIY Sisi Permintaan Tahun 2025	66
Tabel 7.2.	Faktor Pendorong dan Penghambat Pertumbuhan Ekonomi DIY Sisi Penawaran Tahun 2025	67
Tabel 7.3.	Faktor Pemicu dan Penahan Inflasi 2025	68

Daftar Grafik

Grafik 1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 DIY, Nasional, dan Jawa	2	Grafik 1.30.	Perkembangan Kredit Penyediaan Akomodasi Makan Minum	9
Grafik 1.2.	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2024 DIY, Nasional, dan Jawa	2	Grafik 1.31.	Pertumbuhan LU Industri Pengolahan	10
Grafik 1.3.	Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga	3	Grafik 1.32.	Kinerja Penjualan dan Kapasitas Utilisasi Liaison Bank Indonesia	10
Grafik 1.4.	Pangsa Konsumsi Rumah Tangga	3	Grafik 1.33.	Pertumbuhan LU Konstruksi	10
Grafik 1.5.	Indeks Keyakinan Konsumen	3	Grafik 1.34.	Perkembangan Penjualan Semen	10
Grafik 1.6.	Indeks Penjualan Riil	3	Grafik 1.35.	Perkembangan LU Pertambangan dan Penggalian	10
Grafik 1.7.	Perkembangan Kredit Konsumsi	4	Grafik 2.1	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Pemda se-DIY	17
Grafik 1.8.	Perkembangan Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga	4	Grafik 2.2	Rasio PAD terhadap total pendapatan se-DIY	17
Grafik 1.9.	Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah	4	Grafik 2.3	Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemda se-DIY	18
Grafik 1.10.	Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah	4	Grafik 3.1.	Inflasi DIY, Jawa dan Nasional (%yoy)	24
Grafik 1.11.	Pangsa Belanja Pemerintah Daerah	5	Grafik 3.2.	Inflasi Tahun Kalender DIY (%ytd)	24
Grafik 1.12.	Pertumbuhan Investasi	5	Grafik 3.3.	Perkembangan Harga BBM (Rp/L)	25
Grafik 1.13.	Perkembangan Kredit Investasi	5	Grafik 3.4.	Perkembangan Harga Avtur (Rp/L)	25
Grafik 1.14.	Likert Scale Investasi	5	Grafik 3.5.	Perkembangan Harga Emas Global (USD/oz)	26
Grafik 1.15.	Perkembangan Penjualan Semen	5	Grafik 3.6.	Perkembangan Harga CPO Global	26
Grafik 1.16.	Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa	6	Grafik 4.1	Perkembangan Aset Perbankan DIY	34
Grafik 1.17.	Perkembangan Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara	6	Grafik 4.2	Komposisi Aset Perbankan DIY	34
Grafik 1.18.	Perkembangan Nominal dan Volume Ekspor Luar Negeri	6	Grafik 4.3.	Pertumbuhan DPK Perbankan DIY	34
Grafik 1.19.	Perkembangan Ekspor Pertanian	6	Grafik 4.4.	Pertumbuhan DPK DIY berdasarkan Komponen	35
Grafik 1.20.	Perkembangan Ekspor Industri Pengolahan Berdasarkan Komoditas	6	Grafik 4.5.	Pangsa DPK Bank Umum DIY	35
Grafik 1.21.	Pasar Utama Ekspor DIY	6	Grafik 4.6.	Pertumbuhan DPK DIY berdasarkan Kepemilikan	35
Grafik 1.22.	Likert Scale Penjualan Ekspor	7	Grafik 4.7.	Pangsa DPK DIY secara Spasial Triwulan IV 2024	35
Grafik 1.23.	Perkembangan Impor Barang dan Jasa	7	Grafik 4.8.	Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Lokasi	36
Grafik 1.24.	Perkembangan Nominal dan Volume Impor	7	Grafik 4.9.	Kinerja Pertumbuhan Kredit DIY	36
Grafik 1.25.	Perkembangan Impor Berdasarkan Kelompok Barang	8	Grafik 4.10.	Pertumbuhan Kredit DIY	36
Grafik 1.26.	Pangsa Impor Berdasarkan Kelompok Barang	8	Grafik 4.11.	Komposisi Kredit DIY Berdasarkan Penggunaan	36
Grafik 1.27.	Perkembangan Barang Bongkar Melalui Bandara	8	Grafik 4.12.	Komposisi Kredit DIY Berdasarkan Kepemilikan	37
Grafik 1.28.	Perkembangan Barang Bongkar Melalui Stasiun	8	Grafik 4.13.	Perkembangan LDR Berdasarkan Lokasi Bank dan Lokasi Proyek	37
Grafik 1.29.	Pertumbuhan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9			

Grafik 4.14. Perkembangan NPL DIY	37	Grafik 5.10. Perkembangan Merchant dan User QRIS	50
Grafik 4.15. Perkembangan NPL DIY berdasarkan Komponen	37	Grafik 5.11. Perkembangan Transaksi QRIS	50
Grafik 4.16. Perkembangan LaR DIY	37	Grafik 5.12. Perkembangan Inflow dan Outflow Uang Kartal di DIY	51
Grafik 4.17. Perkembangan Kredit Korporasi DIY	38	Grafik 5.13. Perkembangan Pemusnahan Uang di DIY	51
Grafik 4.18. Perkembangan Kredit Korporasi berdasarkan Komponen	38	Grafik 5.14. Perkembangan Temuan Uang Palsu di DIY	51
Grafik 4.19. Perkembangan Kredit Korporasi berdasarkan Sektor Ekonomi	38	Grafik 5.15. Temuan Uang Palsu Berdasarkan Jenis Pecahan di DIY	51
Grafik 4.20. Perkembangan DPK Sektor Korporasi	38	Grafik 5.16. Perkembangan Transaksi Valuta Asing di DIY	52
Grafik 4.21. Komposisi DPK Korporasi	38	Grafik 5.17. Pangsa Valuta Asing yang Ditukarkan di DIY	52
Grafik 4.22. Perkembangan NPL Korporasi	39	Grafik 6.1. Persentase penduduk usia kerja di DIY	56
Grafik 4.23. Komponen NPL Korporasi	39	Grafik 6.2. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di DIY	56
Grafik 4.24. Perkembangan IKK dan Konsumsi RT DIY	39	Grafik 6.3. Perkembangan TPT di DIY dan Nasional	58
Grafik 4.25. Perkembangan Kredit RT DIY	39	Grafik 6.4. Perkembangan TPT di DIY Berdasarkan Wilayah	59
Grafik 4.26. Perkembangan Jenis Penggunaan Kredit RT	39	Grafik 6.5. Perkembangan TPT Menurut Pendidikan di DIY	59
Grafik 4.27. Perkembangan Komponen Kredit RT	40	Grafik 6.6. Perkembangan NTP DIY	59
Grafik 4.28. Komposisi Kredit RT	40	Grafik 6.7. Perkembangan NTP Berdasarkan Subsektor	59
Grafik 4.29. Perkembangan DPK dan Kredit Sektor RT	40	Grafik 6.8. Perkembangan NTP dan Indeks Harga yang Diterima (It) dan Indeks Harga yang Dibayar (Ib) Petani	59
Grafik 4.30. Perkembangan DPK RT per Jenis Simpanan	40	Grafik 6.9. Perkembangan Penduduk Miskin	60
Grafik 4.31. Perkembangan NPL Rumah Tangga	41	Grafik 6.10. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin	60
Grafik 4.32. Perkembangan NPL per Komponen	41	Grafik 6.11. Perkembangan Persentasi Jumlah Penduduk Miskin berdasarkan Spasial	60
Grafik 4.33. Perkembangan Kredit UMKM DIY	41	Grafik 6.12. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	60
Grafik 4.34. Pangsa Kredit UMKM DIY	41	Grafik 6.13. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	60
Grafik 4.35. Perkembangan Kredit UMKM DIY Berdasarkan Skala Usaha	42	Grafik 6.14. Perkembangan GK dan Inflasi	61
Grafik 4.36. Perkembangan Kredit UMKM DIY Berdasarkan Sektor	42	Grafik 6.15. Perkembangan Garis Kemiskinan	61
Grafik 4.37. Perkembangan NPL UMKM DIY	42	Grafik 6.16. Perkembangan Komoditas Penyumbang Terbesar terhadap GKM Perkotaan	62
Grafik 5.1. Perkembangan Transaksi SKNBI	48	Grafik 6.17. Perkembangan Komoditas Penyumbang Terbesar terhadap GKM Perdesaan	62
Grafik 5.2. Perkembangan Transaksi RTGS	48	Grafik 6.18. Perkembangan Komoditas Penyumbang Terbesar terhadap GKBM Perkotaan	62
Grafik 5.3. Perkembangan Transaksi APMK	49		
Grafik 5.4. Perkembangan Transaksi Kartu ATM Debet	49		
Grafik 5.5. Pangsa Transaksi Kartu ATM Debet	49		
Grafik 5.6. Perkembangan Transaksi Kartu Kredit	49		
Grafik 5.7. Pangsa Transaksi Kartu Kredit	50		
Grafik 5.8. Perkembangan Nominal Transaksi Uang Elektronik	50		
Grafik 5.9. Penggunaan Transaksi Uang Elektronik	50		

Grafik 6.19	Perkembangan Komoditas Penyumbang Terbesar terhadap GKBM Perdesaan	62
Grafik 6.20	Perkembangan Gini Ratio DIY	62
Grafik 6.21	Perkembangan Gini Ratio DIY Secara Spasial	62

Ringkasan Eksekutif



Pertumbuhan ekonomi DIY pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar **5,07% (yoy)**, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh **5,05% (yoy)**. Beberapa faktor pendorong pertumbuhan tersebut antara lain: 1) Peningkatan mobilitas penduduk pada akhir tahun 2024, termasuk momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Pemilihan Umum (Pemilu); 2) Berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan proyek strategis daerah lainnya, seperti jalan tol Jogja-Solo, jalur alternatif Sleman-Gunungkidul, Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS); 3) Peningkatan konsumsi rumah tangga sejalan dengan momen libur panjang dan cuti bersama; serta 4) Peningkatan konsumsi pemerintah yang didorong oleh belanja Pemilu. Berdasarkan hal tersebut ekonomi DIY menjadi yang tertinggi di wilayah Jawa dan lebih tinggi dari Nasional yang masing-masing tumbuh 5,01% (yoy) dan 5,02% (yoy).

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi DIY ditopang oleh kinerja ekspor barang dan jasa serta **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)**. Kinerja ekspor barang dan jasa tumbuh meningkat sejalan dengan meningkatnya permintaan produk ekspor ke negara tujuan ekspor. Lebih lanjut, kinerja investasi tumbuh meningkat sejalan dengan masih berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah DIY dan proyek strategis daerah lainnya sehingga mendorong besarnya investasi fisik di DIY, seperti pembangunan jalan tol Jogja-Solo, jalur alternatif Sleman-Gunungkidul, Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Komponen Konsumsi Rumah Tangga tetap positif sejalan dengan peningkatan periode kunjungan wisatawan pada periode liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Selain itu, Konsumsi Pemerintah juga mengalami peningkatan seiring dengan mulai masuknya periode Pemilu serta meningkatnya belanja bantuan sosial di triwulan IV 2024.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan didorong oleh LU **akomodasi makan minum, konstruksi, transportasi dan pergudangan, dan pertambangan**. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke DIY seiring dengan periode libur sekolah dan pelaksanaan pilkada menjadi faktor pendorong pertumbuhan LU akomodasi makan minum yang lebih tinggi, serta turut mendorong tumbuh positifnya LU industri pengolahan. Sementara LU konstruksi tumbuh sejalan dengan masih berlangsungnya Pembangunan proyek PSN tol Jogja-Solo, jalur alternatif Sleman-Gunungkidul, Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Hal ini juga turut mendorong sektor LU pertambangan dan penggalian, utamanya untuk komoditas penggalian nonlogam. Selanjutnya, sektor transportasi dan pergudangan juga tumbuh positif didorong oleh peningkatan jumlah penumpang dan barang karena mobilitas masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi lainnya yang sejalan dengan kegiatan pariwisata dan pilkada.

Kinerja realisasi pendapatan dan belanja Pemda se-DIY pada triwulan IV terus melanjutkan pertumbuhan positif pada triwulan IV 2024. Realisasi pendapatan Pemda se-DIY pada triwulan IV 2024 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 4,68% (yoy) dengan total pendapatan mencapai Rp17,824 triliun dan serapan realisasi sebesar 101,21% terhadap pagu. Pertumbuhan realisasi pendapatan Pemda se-DIY pada triwulan IV 2024 didorong oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer yang bertumbuh secara positif. Secara keseluruhan, kemandirian fiskal se-DIY pada triwulan IV 2024 relatif mengalami kenaikan dibandingkan triwulan yang sama di tahun lalu, tercermin dari rasio PAD terhadap total pendapatan dari 32,25% menjadi 32,64%. Sejalan dengan realisasi pendapatan, realisasi belanja Pemda se-DIY pada triwulan IV 2024 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar Rp17,561 triliun dengan capaian realisasi 95,12%. Kinerja positif pos belanja APBD secara umum ditopang oleh pertumbuhan belanja operasional yang memiliki kontribusi sebesar 73,28% dari total belanja. Selain itu, kinerja APBN di DIY telah terealisasi sebesar Rp23,64 triliun dengan capaian 95,35% terhadap pagu tahun 2024 atau tumbuh 3,83% (yoy) seiring kinerja positif di kedua komponen yakni Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sejalan dengan pertumbuhan belanja pemerintah daerah, realisasi belanja APBN di DIY juga terealisasi sebesar Rp23,64 triliun atau 95,35% terhadap pagu.

Realisasi inflasi gabungan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul sebagai kota IHK yang mewakili DIY pada triwulan IV 2024 terkendali dalam rentang sasaran nasional. Inflasi gabungan kota IHK di DIY pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 1,28% (yoy), lebih rendah dari realisasi triwulan yang sama tahun 2023 dan inflasi triwulan III 2024 yang masing-masing sebesar 3,17% (yoy) dan 1,85% (yoy). Realisasi tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan inflasi gabungan 38 Kabupaten/Kota IHK di Jawa dan inflasi nasional yang keduanya tercatat sebesar 1,58% (yoy) dan 1,57% (yoy) pada triwulan IV 2024. Ditinjau berdasarkan kelompok pengeluaran, melandainya inflasi pada triwulan IV 2024 disebabkan oleh: 1) kelompok makanan, minuman, dan tembakau, 2) kelompok transportasi, 3) kelompok kesehatan, 4) kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, serta 5) pendidikan. Terkendalnya inflasi tahunan pada triwulan IV 2024 didukung oleh melimpahnya pasokan sejumlah komoditas pangan utamanya pada kelompok aneka cabai seiring berlanjutnya panen raya di tengah kondisi cuaca yang kondusif serta terkendalnya ekspektasi masyarakat didukung oleh inovasi pengendalian inflasi yang dikembangkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY.

Kinerja bank umum di DIY pada triwulan IV 2024 tetap kuat. Kinerja pengumpulan DPK perbankan umum di DIY pada triwulan IV 2024 tumbuh positif, meskipun termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2024, pertumbuhan DPK tercatat sebesar 4,60% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,55% (yoy). Pada triwulan IV 2024, kredit perbankan di DIY juga tetap positif, meskipun termoderasi dibandingkan triwulan III 2024. Pertumbuhan kredit berdasarkan lokasi proyek tercatat sebesar 11,66% (yoy), melemah dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 12,78% (yoy). Adapun valuasi kredit perbankan DIY pada triwulan IV 2024 yaitu sebesar Rp60.370 miliar. Kualitas pembiayaan perbankan tetap terjaga di tengah meningkatnya penyaluran kredit. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) triwulan IV 2024 tercatat sebesar 3,01% (yoy), lebih terkendali dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,15% dan masih berada di bawah *threshold* 5%.

Pertumbuhan transaksi nontunai melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada triwulan IV 2024 mengalami kontraksi. Nominal transaksi RTGS di DIY pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar Rp15,50 triliun atau berkontraksi 2,23% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut transaksi melalui SKNBI pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar Rp3,77 triliun atau menurun sebesar 7,54% (yoy). Nominal transaksi pembayaran nontunai berbasis kartu di DIY mencapai Rp20,80 triliun tumbuh sebesar 0,03% (yoy) dari triwulan IV tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp20,79 triliun. Sementara itu, kinerja Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) pada triwulan IV 2024 juga berjalan dengan baik. Pada triwulan IV 2024, jumlah arus uang tunai yang keluar dan masuk Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY masing-masing tercatat Rp3,11 triliun dan Rp2,21 triliun dengan *net outflow* sebesar Rp0,89 triliun. *Net outflow* terjadi seiring dengan peningkatan permintaan uang kartal oleh perbankan dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pada periode Natal dan Tahun Baru. Jumlah transaksi penukaran valuta asing (valas) DIY melalui KUPVA Bukan Bank pada triwulan II 2024 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara. Dari sisi sistem pembayaran non tunai, Akseptasi kanal pembayaran berbasis *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai kanal pembayaran digital di DIY terus mencatatkan perkembangan yang positif sejalan dengan perkembangan implementasi QRIS secara nasional. Penggunaan QRIS di DIY terus tumbuh baik dari sisi merchant dan pengguna. Hingga triwulan IV 2024 terdapat 857 ribu merchant QRIS dan 941 ribu pengguna QRIS di wilayah DIY, meningkat masing-masing 21,10% (yoy) dan 16,13% (yoy). Lebih lanjut, Segmentasi merchant QRIS masih didominasi oleh 96,97% merchant jenis usaha mikro 56,54%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) DIY pada Agustus 2024 meningkat.

Secara sektoral, TPAK penyerapan tenaga kerja di DIY masih didominasi oleh tiga Lapangan Usaha (LU) utama yang menjadi penggerak perekonomian DIY, diantaranya LU Pertanian, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, serta Industri Pengolahan.

Persentase penduduk miskin DIY pada September 2024 melanjutkan keberlanjutan penurunan

meski masih lebih tinggi dibandingkan capaian nasional. Persentase penduduk miskin DIY turun dari 10,83% pada Maret 2024 menjadi 10,4% pada September 2024. Penurunan persentase penduduk miskin salah satunya dipengaruhi oleh inflasi yang terkendali. Selain itu, ketimpangan pengeluaran penduduk DIY juga mengalami penurunan, tercermin dari Indeks Gini Ratio sebesar 0,428 yang lebih rendah dari periode sebelumnya sebesar 0,435. Walaupun mengalami penurunan indeks Gini Ratio, tingkat ketimpangan DIY ini masih lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 0,381 nasional.

Secara umum, perekonomian DIY pada 2025 diperkirakan tumbuh di kisaran 4,8 – 5,6% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 2024. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perekonomian DIY berpotensi tumbuh optimal dengan didukung oleh ekonomi domestik. Selain itu, meningkatnya daya beli masyarakat seiring kenaikan UMP dan UMK serta penyelesaian PSN berupa pembangunan jalan tol juga diprakirakan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Kinerja investasi juga berpotensi mengalami pertumbuhan seiring dengan membaiknya kepercayaan investor dan berlanjutnya pembangunan di daerah. Lebih lanjut, Inflasi DIY pada tahun 2025 diperkirakan tetap terkendali sepanjang tahun dan berada pada sasaran 2,5±1%. Terkendalnya inflasi didukung oleh upaya TPID DIY untuk menjaga kestabilan inflasi melalui GNPIP dalam koridor 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif). Beberapa upaya TPID antara lain mengoptimalkan Segoro Amarto sebagai kiosk *price reference*, meningkatkan produksi pangan daerah melalui implementasi *digital farming*, melakukan operasi pasar, pemenuhan kebutuhan melalui perluasan kerja sama intra dan antar daerah, serta meningkatkan komunikasi efektif melalui MRANTASI (Masyarakat dan Pedagang Tanggap Inflasi) di seluruh kabupaten/kota di DIY

Indikator Ekonomi dan Perbankan Provinsi D.I. Yogyakarta

INDIKATOR	2023				2024			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Ekonomi Makro Regional								
Produk Domestik Regional Bruto (%yoy)	5,31	5,16	4,96	4,86	5,02	4,95	5,05	5,07
Berdasarkan Sektor								
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,98	5,13	1,79	1,24	1,82	6,14	3,84	1,66
Pertambangan dan Penggalian	4,80	4,12	5,25	-0,57	4,52	7,29	10,33	15,50
Industri Pengolahan	5,04	3,74	4,56	3,63	3,68	2,14	2,90	4,76
Pengadaan Listrik, Gas	5,05	5,58	1,89	16,50	7,44	13,32	12,76	1,91
Pengadaan Air	-0,19	2,11	1,58	10,36	9,41	4,25	-2,37	-4,36
Konstruksi	4,95	2,66	4,06	7,26	6,21	8,50	8,84	7,90
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,94	4,56	4,82	2,86	2,99	2,86	4,48	5,11
Transportasi dan Pergudangan	11,45	10,80	13,35	6,10	6,14	5,50	6,53	6,10
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,43	6,32	8,84	10,31	10,45	7,32	7,67	6,01
Informasi dan Komunikasi	5,47	4,08	5,77	3,98	4,37	3,45	3,56	4,51
Jasa Keuangan	10,25	10,56	14,14	6,48	6,50	9,08	7,04	2,61
Real Estate	4,62	4,19	2,99	2,79	3,38	3,68	4,04	4,69
Jasa Perusahaan	7,95	7,13	8,70	9,32	9,44	6,85	2,50	5,82
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,36	3,66	-4,14	4,11	4,08	5,85	5,39	3,48
Jasa Pendidikan	6,46	5,49	1,93	3,89	6,11	3,57	3,49	5,85
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,02	6,90	7,33	6,57	5,37	4,93	5,50	5,66
Jasa lainnya	7,27	9,13	11,11	3,20	5,35	4,71	5,07	4,60
Berdasarkan Permintaan								
Konsumsi Rumah Tangga	4,77	5,19	5,16	4,57	4,58	4,72	4,64	4,61
Konsumsi Pemerintah	2,15	4,42	0,68	2,21	9,93	5,53	5,05	4,62
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	5,68	6,56	8,77	5,06	6,05	8,11	8,97	8,35
Ekspor Luar Negeri	-17,65	-16,91	-14,54	-9,55	1,51	7,88	3,04	8,67
Impor Luar Negeri	-1,02	3,26	9,67	4,25	0,11	9,23	5,03	10,27
Laju Inflasi Tahunan								
- Kota Yogyakarta (%yoy)	6,11	4,20	3,30	3,17	2,80	2,53	1,86	1,30
- Kabupaten Gunungkidul (% yoy)					3,05	2,20	1,83	0,64
Bank Umum*								
Aset (Rp Miliar)	81.522	82.309	84.673	86.104	85.306	88.043	88.983	89.890
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	75.612	75.815	77.785	79.498	79.178	81.410	82.106	83.151
Kredit (Rp Miliar)	55.240	54.303	52.314	54.065	55.063	57.261	58.998	60.370
Loan to Deposit Ratio (%)	73,06	71,63	67,25	68,01	69,54	70,34	71,86	72,60
NPL Gross (%)	3,26	3,16	3,13	2,83	3,05	3,27	3,15	3,01

*Berdasarkan Lokasi Proyek



01

Perkembangan Ekonomi Makro Regional

Ekonomi DIY pada triwulan IV 2024 mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan yang mencapai 5% tersebut didorong oleh aktivitas domestik yang masih kuat disertai dengan kinerja industri yang meningkat. Selain itu, proyek pembangunan yang terus berlanjut berdampak positif dan memberikan *multiplier effect* yang signifikan terhadap ekonomi DIY. Dinamika global yang mulai membaik juga mendorong permintaan produk ekspor dari DIY.



A. Pertumbuhan Ekonomi DIY Keseluruhan Tahun 2024

Secara keseluruhan tahun 2024, perekonomian DIY tumbuh 5,03% (yoy), relatif melambat dari tahun 2023 yang tumbuh 5,07% (yoy) (Grafik 1.1). Beberapa faktor pendorong pertumbuhan ekonomi DIY sepanjang tahun 2024 tersebut antara lain: 1) Permintaan domestik yang masih kuat disertai dengan kenaikan pendapatan UMP 2024; 2) Kenaikan APBD perubahan yang berdampak pada belanja pemerintah; 3) serta masih berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, kinerja positif pada periode laporan tertahan oleh pengaruh dinamika ketidakpastian geopolitik di tengah konflik yang berlangsung. Selain itu, fenomena El-Nino yang terjadi turut mempengaruhi kuantitas dan kualitas produksi pertanian.

Apabila dibandingkan dengan kinerja masing-masing wilayah, pertumbuhan ekonomi DIY menjadi yang tertinggi di wilayah Jawa dan sama dengan Nasional yang masing-masing tumbuh 4,92% (yoy) dan 5,03% (yoy) (Tabel 1.1).

B. Pertumbuhan Ekonomi DIY Triwulan IV 2024

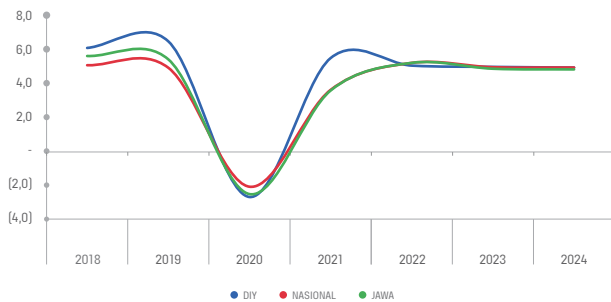
Pertumbuhan ekonomi DIY pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 5,07% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,05% (yoy) (Grafik 1.2). Beberapa faktor pendorong pertumbuhan tersebut antara lain: 1) Peningkatan mobilitas penduduk pada akhir tahun 2024, termasuk momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Pemilihan Umum (Pemilu); 2) Berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN)

dan proyek strategis daerah lainnya, seperti jalan tol Jogja-Solo, jalur alternatif Sleman-Gunungkidul, Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS); 3) Peningkatan konsumsi rumah tangga sejalan dengan momen libur panjang dan cuti bersama; serta 4) Peningkatan konsumsi pemerintah yang didorong oleh belanja Pemilu. Berdasarkan hal tersebut ekonomi DIY menjadi yang tertinggi di wilayah Jawa dan lebih tinggi dari Nasional yang masing-masing tumbuh 5,01% (yoy) dan 5,02% (yoy) (Tabel 1.2).

1.1. Komponen Pengeluaran

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi DIY ditopang oleh kinerja ekspor barang dan jasa serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Kinerja ekspor barang dan jasa tumbuh meningkat sejalan dengan meningkatnya permintaan produk ekspor ke negara tujuan ekspor. Lebih lanjut, kinerja investasi tumbuh meningkat sejalan dengan masih berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah DIY dan proyek strategis daerah lainnya sehingga mendorong besarnya investasi fisik di DIY, seperti pembangunan jalan tol Jogja-Solo, jalur alternatif Sleman-Gunungkidul, Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Komponen Konsumsi Rumah Tangga tetap positif sejalan dengan peningkatan periode kunjungan wisatawan pada periode liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Selain itu, Konsumsi Pemerintah juga mengalami peningkatan seiring dengan mulai masuknya periode Pemilu serta meningkatnya belanja bantuan sosial di triwulan IV 2024 (Tabel 1.3).

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 DIY, Nasional, dan Jawa



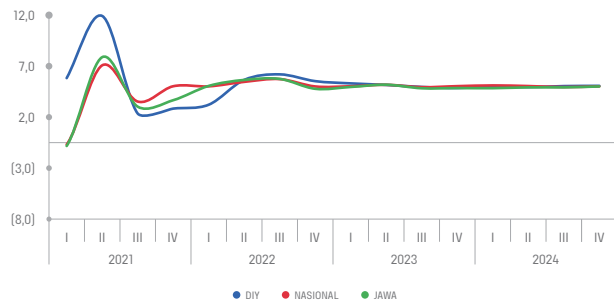
Sumber: BPS (Dialah)

Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Jawa Keseluruhan Tahun 2024

PROVINSI	2022	2023	2024
Jawa	5,31	4,96	4,92
DKI Jakarta	5,25	4,96	4,90
Jawa Barat	5,45	5,00	4,95
Jawa Tengah	5,31	4,98	4,93
DIY	5,15	5,07	5,03
Jawa Timur	5,34	4,95	4,93
Banten	5,03	4,81	4,79

Sumber: BPS

Grafik 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2024 DIY, Nasional, dan Jawa



Sumber: BPS (Dialah)

Tabel 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Jawa Triwulan IV 2024

PROVINSI	II'24	III'24	IV'24
Jawa	4,92	4,92	5,01
DKI Jakarta	4,9	4,93	5,01
Jawa Barat	4,95	4,91	5,02
Jawa Tengah	4,92	4,93	4,96
DIY	4,95	5,05	5,07
Jawa Timur	4,98	4,91	5,03
Banten	4,70	4,93	5,02

Sumber: BPS

Tabel 1.3. Pertumbuhan PDRB Triwulan IV 2024 Sisi Permintaan

PENGELUARAN	[y-on-y]			[q-to-q]		
	Q4/23	Q3/24	Q4/24	Q4/23	Q3/24	Q4/24
Sisi Permintaan	4,86	5,05	5,07	2,90	0,31	2,92
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,57	4,64	4,61	2,97	-1,66	2,94
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	11,32	7,96	6,59	6,01	-1,96	4,67
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,21	5,05	4,62	32,90	-3,34	32,36
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,06	8,97	8,35	4,37	5,87	3,77
5. Perubahan Inventori	-34,71	-27,86	-2,68	-842,61	-100,90	-1101,81
6. Ekspor Barang dan Jasa	1,13	3,04	8,67	-5,30	6,68	-0,13
7. Impor Barang dan Jasa	0,03	5,03	10,27	3,49	1,78	8,66

Sumber : BPS

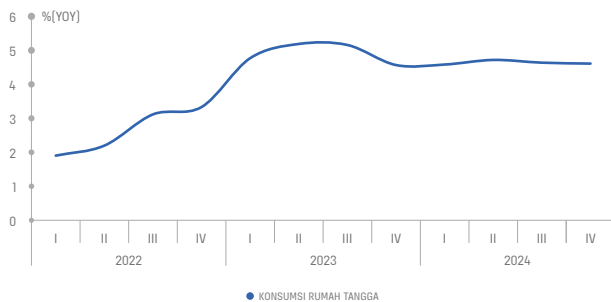
1.1.1. Konsumsi Rumah Tangga (RT)

Konsumsi RT tumbuh positif pada triwulan IV 2024. Pada triwulan IV 2024, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,61% (yoy), termoderasi dibandingkan triwulan III 2024 sebesar 4,74% (yoy) (Grafik 1.3). Capaian tersebut didorong oleh konsumsi makanan dan minuman seiring Periode HBKN Natal dan Tahun Baru meningkatkan kebutuhan masyarakat dalam melakukan konsumsi makanan dan minuman. Namun pertumbuhan yang lebih tinggi diperkirakan tertahan oleh moderasi konsumsi kesehatan, pendidikan, dan rekreasi yang berkontribusi 14,60% dari total keseluruhan konsumsi rumah tangga (Grafik 1.4).

Meski melambat, konsumsi rumah tangga masih dalam level optimis. Hal ini tercermin dari Survei Konsumen (SK) yang

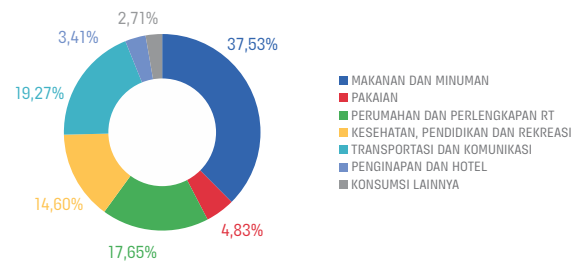
dilakukan oleh Bank Indonesia, di mana Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan IV 2024 tercatat pada level 123,25 atau berada pada zona optimis (>100). Angka tersebut menunjukkan konsumen masih melihat kondisi ekonomi saat ini dan ke depan tetap baik, meski terdapat kehati-hatian. Tren belanja konsumen yang tetap kuat juga tertangkap oleh Survei Penjualan Eceran (SPE) dengan Indeks Penjualan Riil (IPR) pada triwulan IV 2024 tercatat 137,48; meningkat dari triwulan III 2024 sebesar 133,49. Peningkatan tersebut didorong oleh IPR makanan dan minuman serta IPR kendaraan bermotor yang masing-masing sebesar 184,15 dan 140,79; lebih tinggi dari triwulan sebelumnya 181,24 dan 109,43.

Grafik 1.3. Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga



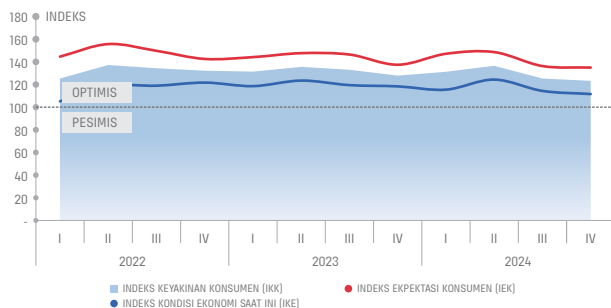
Sumber: BPS DIY

Grafik 1.4. Pangsa Konsumsi Rumah Tangga



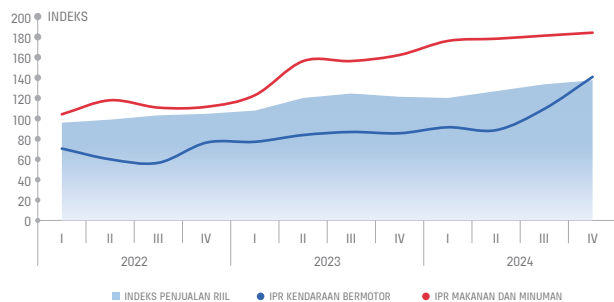
Sumber: BPS DIY (diolah)

Grafik 1.5. Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber: Survei Konsumen (BI)

Grafik 1.6. Indeks Penjualan Riil

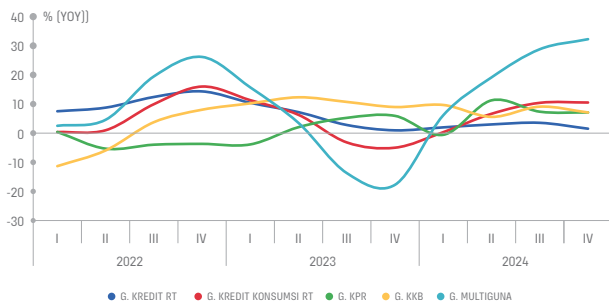


Sumber: Survei penjualan Eceran (BI)

Konsumsi rumah tangga yang masih kuat juga tercermin melalui kondisi pembiayaan. Berdasarkan penyaluran kredit perbankan kepada masyarakat, kredit konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2024 tumbuh 10,51% [yoy], lebih tinggi dari triwulan III 2024 sebesar 10,41% [yoy]. Penguatan kredit konsumsi tersebut sejalan dengan ekspektasi penghasilan yang meningkat mengingat adanya kenaikan UMP di tahun 2025 sebesar 6,5%. Berdasarkan jenisnya, pertumbuhan kredit konsumsi ditopang oleh pertumbuhan kredit yang positif di seluruh komponen. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tumbuh 7,10% [yoy] pada triwulan III 2024 naik menjadi 7,36% [yoy] pada triwulan IV 2024. Pertumbuhan KPR yang tetap positif sejalan pemberlakuan kembali insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Ditanggung Pemerintah (DTP) tahun 2024 atas penyerahan rumah tapak dan satuan Rumah Susun sebagaimana PMK No. 7 tahun 2024. Selain itu, Kredit Multiguna juga tumbuh akseleratif dari sebelumnya 28,81% [yoy] menjadi 32,25% [yoy].

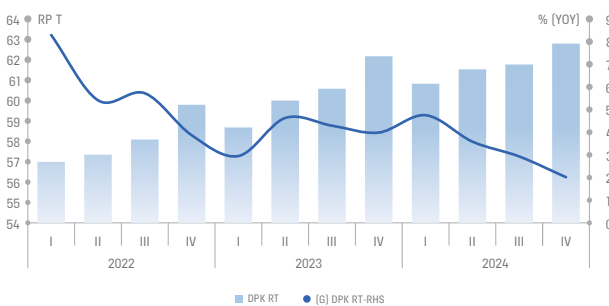
Namun pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang termoderasi menjadi 7,10% [yoy] pada triwulan laporan, dari sebelumnya tumbuh 9,09% [yoy] pada triwulan III 2024. Hal ini sejalan dengan berakhirnya insentif ketentuan uang muka kredit pembiayaan bermotor paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru yang diperpanjang dan berlaku efektif 1 Januari sampai 31 Desember 2024 (Grafik 1.7).

Grafik 1.7. Perkembangan Kredit Konsumsi



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.8. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga



Sumber: Bank Indonesia

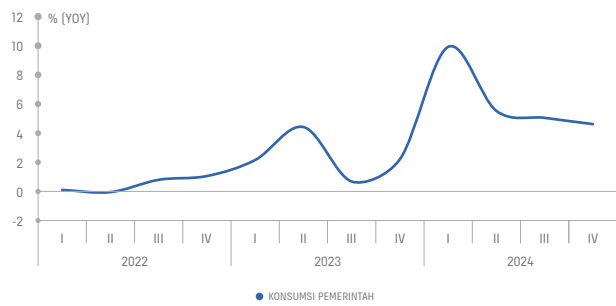
Seiring dengan penyaluran kredit yang meningkat untuk konsumsi, terjadi penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) rumah tangga. DPK rumah tangga pada triwulan laporan tercatat 2,02% [yoy], melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 2,93% [yoy]. Penurunan DPK rumah tangga dipicu oleh pola konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat di akhir tahun (Grafik 1.8).

1.1.2. Konsumsi Pemerintah

Konsumsi Pemerintah pada Triwulan IV 2024 tumbuh positif, meskipun termoderasi. Kinerja konsumsi pemerintah tercatat 4,92% [yoy], lebih rendah dari triwulan III 2024 yang tumbuh sebesar 5,53% [yoy] (Grafik 1.9). Kinerja konsumsi pemerintah yang tetap positif disebabkan oleh realisasi bonus akhir tahun untuk ASN pada akhir tahun 2024. Meskipun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh perubahan prioritas belanja daerah dengan lebih selektif, sehingga mempengaruhi kinerja konsumsi pemerintah.

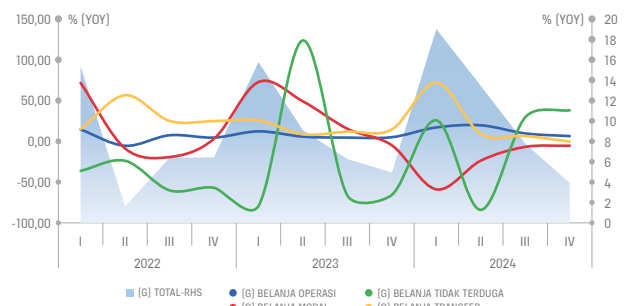
Berdasarkan kelompok belanja, termoderasinya konsumsi pemerintah terutama terjadi pada belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer. Pada triwulan laporan, belanja operasi tumbuh 6,36% [yoy], melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,65% [yoy]. Secara lebih detail, penurunan belanja operasi sejalan dengan melambatnya kinerja belanja barang dan jasa yang tumbuh 1,85% [yoy] pada triwulan IV 2024, dari sebelumnya tumbuh 4,79% [yoy]. Lebih

Grafik 1.9. Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah



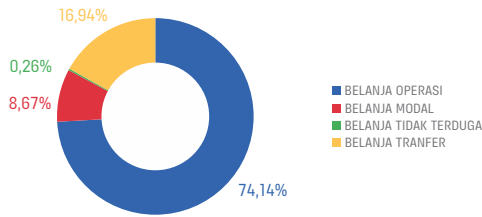
Sumber: BPS DIY

Grafik 1.10. Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah



Sumber: BKAD & DJPb DIY

Grafik 1.11. Pangsa Belanja Pemerintah Daerah



Sumber: BKAD & D/Fb DIY

lanjut, belanja modal dan belanja transfer, masing-masing mengalami kontraksi yaitu sebesar -5,44% (yoy) dan -0,36% (yoy) pada triwulan IV 2024, dari sebelumnya -6,86% (yoy) dan 6,50% (yoy) pada triwulan III 2024 (Grafik 1.10).

Berdasarkan kontribusinya, belanja pemerintah di DIY didominasi oleh belanja operasi sebesar 74,14% dan belanja transfer 16,94%. Sementara belanja modal dan belanja tidak terduga masing-masing menyumbang 8,67% dan 0,26% dari total belanja pemerintah (Grafik 1.11).

1.1.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

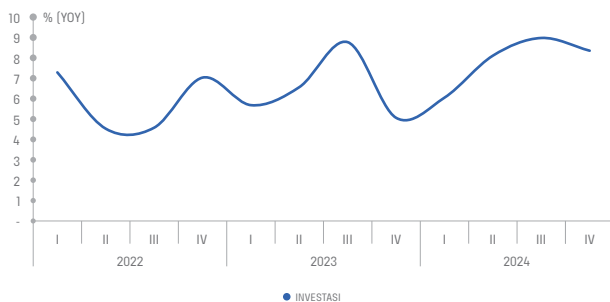
Kinerja investasi pada triwulan IV 2024 tetap positif, meskipun termoderasi. Investasi DIY yang tercermin dari komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada triwulan laporan

tumbuh sebesar 8,35% (yoy), termoderasi dibandingkan triwulan III 2024 sebesar 8,97% (yoy) (Grafik 1.12).

Pertumbuhan yang tetap positif tersebut didorong oleh investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun proyek strategis daerah. Pembangunan PSN Tol Jogja-Bawen saat ini sedang dalam proses konstruksi seksi 1 ruas Jogja-Simpang Susun (SS) Banyurejo, dengan progress 85%, dan diperkirakan selesai di awal tahun 2025. Sementara PSN Tol Jogja-Solo tengah membangun seksi 2 paket 2.2, yakni tol *elevated* di daerah Ring Road Utara. Selain itu, pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JLLS) dalam proses pembangunan kelok 23 yang menghubungkan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul.

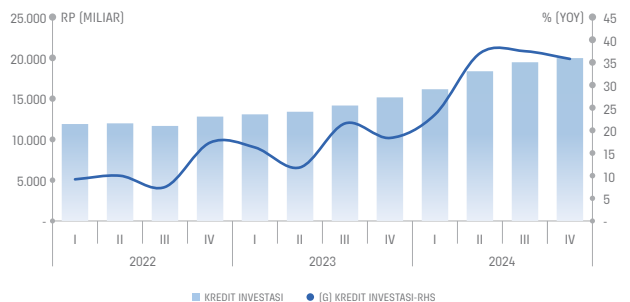
Kinerja investasi yang tetap positif tercermin melalui pembiayaan perbankan dan liaison yang dilakukan Bank Indonesia kepada pelaku usaha. Penyaluran kredit investasi pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 35,76% (yoy), tetap tinggi meskipun relatif melemah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 37,01% (yoy) (Grafik 1.13). Hal ini mengindikasikan prospek pasar investasi di DIY yang tetap positif sehingga menarik minat investor dalam berinvestasi. Lebih lanjut, berdasarkan hasil liaison, *Likert Scale* (LS) investasi meningkat dari 0,90 pada triwulan III 2024, menjadi 1,40 di triwulan IV 2024 (Grafik 1.14). Informasi yang diperoleh pelaku usaha antara lain pada triwulan laporan terdapat realisasi pembelian alat untuk menunjang produksi dan perluasan pabrik. Sejalan dengan hal

Grafik 1.12. Pertumbuhan Investasi



Sumber: BPS DIY

Grafik 1.13. Perkembangan Kredit Investasi



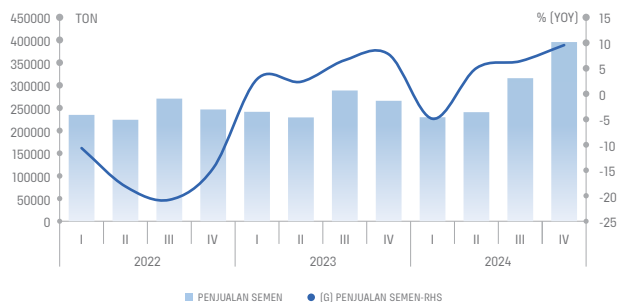
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.14. Likert Scale Investasi



Sumber: Liaison Bank Indonesia

Grafik 1.15. Perkembangan Penjualan Semen



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia

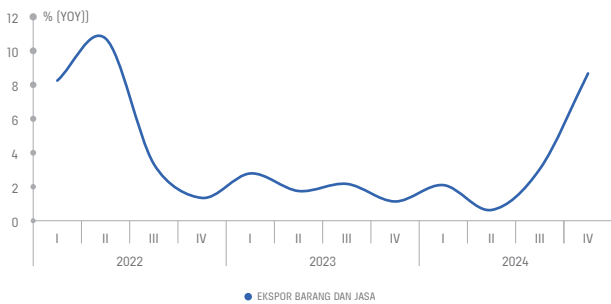
tersebut, penjualan semen pada triwulan IV 2024 tercatat tumbuh 9,55% (yoy), lebih tinggi dari triwulan III 2024 sebesar 6,40% (yoy) (Grafik 1.15).

1.1.4. Ekspor Barang dan Jasa

Di tengah dinamika global, kinerja ekspor DIY tumbuh meningkat. Pada triwulan IV 2024, ekspor tumbuh 8,67% (yoy) dari sebelumnya 3,04% (yoy) (Grafik 1.16). Peningkatan tersebut ditopang oleh kinerja ekspor barang dan jasa luar negeri. Dari sisi ekspor jasa, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke DIY pada triwulan IV 2024 meningkat apabila dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu mencapai 24.556 orang, meskipun masih berkontraksi sebesar 16,90% (yoy) (Grafik 1.17). Sedangkan dari sisi ekspor barang, nominal dan volume ekspor tumbuh positif (Grafik 1.18).

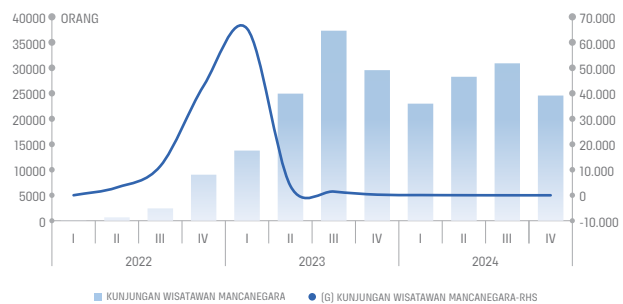
Berdasarkan kelompok barang, kinerja ekspor terutama didorong oleh peningkatan ekspor luar negeri barang industri yang tumbuh 24,26% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan III 2024 sebesar 23,36% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, kinerja ekspor pertanian relatif mengalami perbaikan, yaitu tercatat tumbuh 0,29% (yoy) lebih tinggi dari posisi triwulan III 2024 yang terkontraksi 1,20% (yoy) (Grafik 1.19). Secara lebih detail untuk ekspor industri, komoditas yang menyumbang peningkatan kinerja tersebut antara lain ekspor komoditas tekstil, pengolahan kayu, dan kulit. Ekspor tekstil tercatat tumbuh menjadi 38,44% (yoy) pada triwulan IV 2024, dari sebelumnya 28,93% (yoy) (Grafik 1.20). Hal ini disebabkan oleh pasar Amerika Serikat (AS) yang kembali menggigil pasca penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The FED), yang berdampak positif pada sektor riil negara tersebut, termasuk

Grafik 1.16. Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa



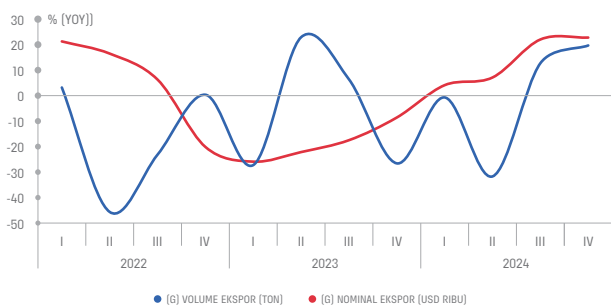
Sumber: BPS DIY

Grafik 1.17. Perkembangan Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara



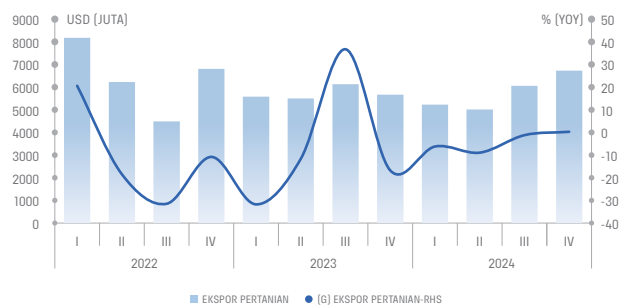
Sumber: BPS DIY

Grafik 1.18. Perkembangan Nominal dan Volume Ekspor Luar Negeri



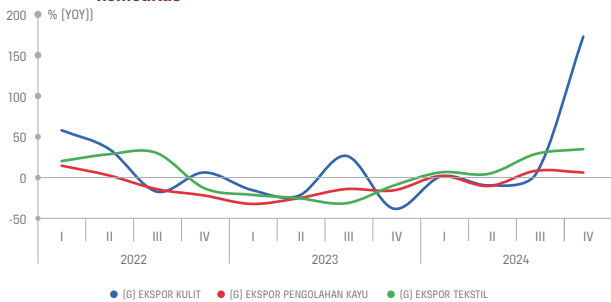
Sumber: Bea Cukai

Grafik 1.19. Perkembangan Ekspor Pertanian



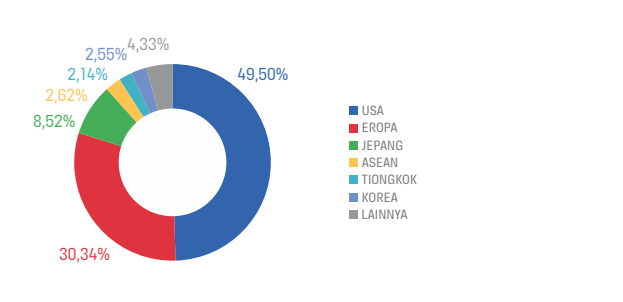
Sumber: Bea & Cukai

Grafik 1.20. Perkembangan Ekspor Industri Pengolahan Berdasarkan Komoditas



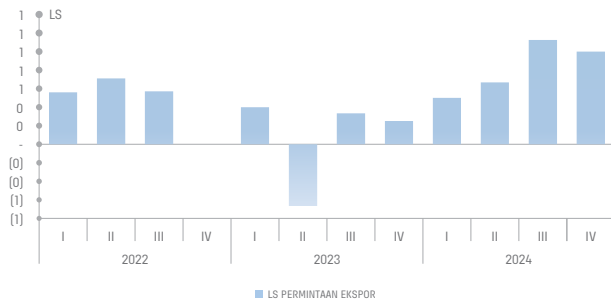
Sumber: BPS DIY

Grafik 1.21. Pasar Utama Ekspor DIY



Sumber: BPS DIY

Grafik 1.22. Likert Scale Penjualan Ekspor



Sumber: Bank Indonesia

tekstil. Selain itu, ekspor pengolahan kayu dan kulit juga mencatatkan pertumbuhan positif masing-masing 6,15% (yoy) dan 172,71% (yoy), dari sebelumnya 8,29% (yoy) dan 4,31% (yoy).

Berdasarkan negara tujuan, ekspor utama DIY sebagian besar berada di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Ekspor DIY ke pasar Amerika Serikat berada pada persentase 49,50%; di posisi kedua pangsa ekspor utama DIY yaitu Eropa dengan persentase 30,34%. Di posisi selanjutnya secara berturut-turut yaitu Jepang (8,52%); ASEAN (2,62%); Korea (2,55%); Tiongkok (2,14%); dan negara lainnya (4,33%) (Grafik 1.21).

Kinerja ekspor yang tetap positif terkonfirmasi melalui liaison kepada pelaku usaha yang dilakukan oleh Bank Indonesia. LS penjualan ekspor pada triwulan laporan tercatat sebesar 1.00, relatif melambat dibandingkan triwulan III 2024 dengan LS sebesar 1.13 (Grafik 1.22). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari liaison, daya beli dari konsumen pada negara tujuan ekspor masih cukup terjaga sehingga ekspor tetap bertumbuh positif. Berlanjutnya ketegangan geopolitik dan kebijakan politik negara mitra dagang utama secara tidak langsung juga menyebabkan pengalihan permintaan ke industri di DIY.

1.1.5. Impor Barang dan Jasa

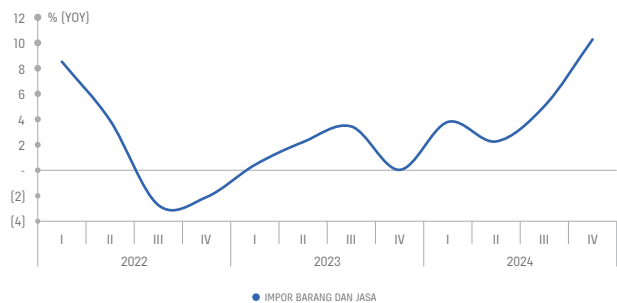
Sejalan dengan membaiknya ekspor, kinerja impor DIY tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Impor DIY pada triwulan IV 2024 tumbuh 10,27% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya 5,03% (yoy) (Grafik 1.23). Peningkatan tersebut didorong oleh impor luar negeri yang secara nominal tumbuh 31,02% (yoy) pada triwulan IV 2024. Meski demikian, volume impor tercatat menurun dari 48,50% (yoy) pada triwulan III 2024, menjadi 15,80% (yoy) (Grafik 1.24). Peningkatan nominal impor tersebut terjadi akibat kenaikan harga komoditas global termasuk harga bahan baku industri dan energi.

Peningkatan kinerja impor didorong oleh tetap positifnya permintaan impor barang modal, barang konsumsi dan bahan baku. Kinerja impor yang meningkat didukung oleh peningkatan impor bahan modal pada triwulan IV 2024 yaitu sebesar 34,77% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya yang berkontraksi 1,46% (yoy). Meskipun demikian,

pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh impor bahan baku juga termoderasi pada triwulan berjalan yaitu tumbuh sebesar 28,49% (yoy), melemah dibandingkan triwulan sebelumnya yang naik signifikan sebesar 62,44% (yoy). Selain itu, Impor barang konsumsi pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 67,31% (yoy), melemah dibandingkan kinerja pada periode sebelumnya yaitu sebesar 78,07% (yoy) (Grafik 1.25). Berdasarkan pangsaanya, impor bahan baku mendominasi dengan kontribusi sebesar 88,28% dari keseluruhan impor. Sedangkan impor barang konsumsi dan barang modal masing-masing berkontribusi sebesar 6,59% dan 5,13% terhadap total impor (Grafik 1.26).

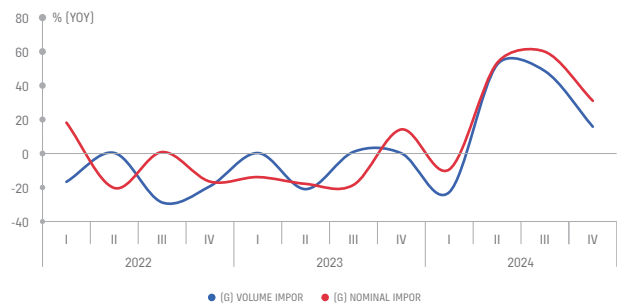
Sejalan dengan peningkatan kunjungan wisatawan, kebutuhan barang di DIY juga lebih tinggi. Berdasarkan data barang yang diterima melalui pesawat, total volume barang yang dibongkar di bandara pada triwulan IV 2024 sebesar 561 ton atau tumbuh 26,96% (yoy), tumbuh akseleratif apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 18,31% (yoy) (Grafik 1.27). Sementara itu, total volume barang yang dibongkar menggunakan kereta di DIY tercatat sebesar 105 ribu ton atau berkontraksi 1,74% (yoy) apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 17,05% (yoy). Melemahnya volume barang bongkar kereta di DIY pada triwulan IV 2024 dibandingkan triwulan sebelumnya dikarenakan masih tingginya tarif bongkar barang menggunakan moda kereta api (Grafik 1.28).

Grafik 1.23. Perkembangan Impor Barang dan Jasa



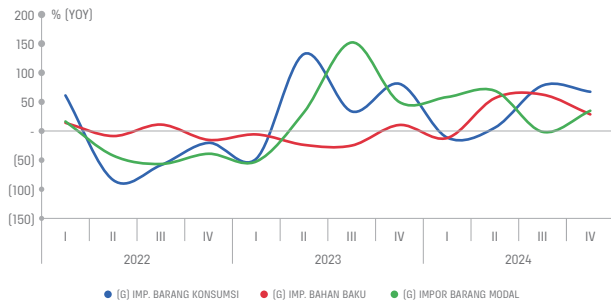
Sumber: BPS DIY

Grafik 1.24. Perkembangan Nominal dan Volume Impor



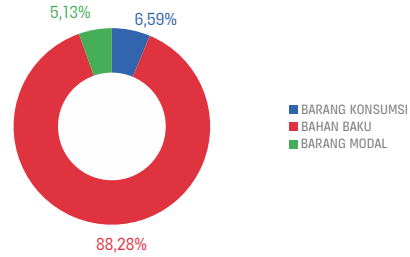
Sumber: BPS DIY

Grafik 1.25. Perkembangan Impor Berdasarkan Kelompok Barang



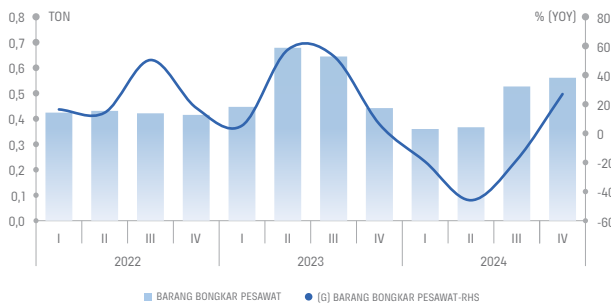
Sumber: BPS DIY

Grafik 1.26. Pangsa Impor Berdasarkan Kelompok Barang



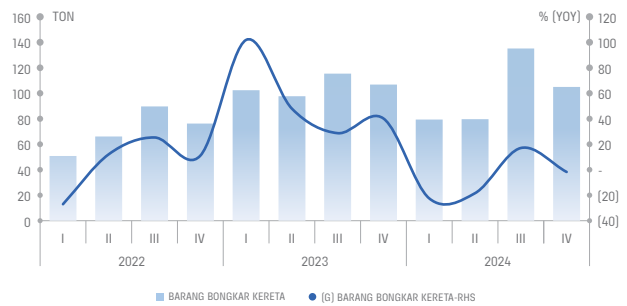
Sumber: BPS DIY

Grafik 1.27. Perkembangan Barang Bongkar Melalui Bandara



Sumber: Angka Pura I

Grafik 1.28. Perkembangan Barang Bongkar Melalui Stasiun



Sumber: Angka Pura I

1.2. Komponen Penawaran (Lapangan Usaha)

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan didorong oleh **LU akomodasi makan minum, konstruksi, transportasi dan pergudangan, dan pertambangan**. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke DIY seiring dengan periode libur sekolah dan pelaksanaan pilkada menjadi faktor pendorong pertumbuhan LU akomodasi makan minum yang lebih tinggi, serta turut mendorong tumbuh positifnya LU industri pengolahan. Sementara LU konstruksi tumbuh sejalan dengan masih berlangsungnya Pembangunan proyek PSN tol Jogja-Solo, jalur alternatif Sleman-Gunungkidul, Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Hal ini juga turut mendorong sektor LU pertambangan dan penggalian, utamanya untuk komoditas penggalian nonlogam. Selanjutnya, sektor transportasi dan pergudangan juga tumbuh positif didorong oleh peningkatan jumlah penumpang dan barang karena mobilitas masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi lainnya yang sejalan dengan kegiatan pariwisata dan pilkada (Tabel 1.4).

1.2.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Hotel dan Restoran)

Libur sekolah dan HBKN Nataru yang berlangsung di triwulan IV 2024 berdampak positif terhadap LU penyediaan akomodasi makan dan minum. LU penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh positif sebesar 6,01% (yoy) pada triwulan laporan, dari sebelumnya 7,67% (yoy) di triwulan III 2024 (Grafik 1.29). Selain itu, preferensi wisatawan mancanegara dari negara beriklim empat musim untuk mengunjungi negara tropis seperti Indonesia selama musim panas turut berkontribusi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

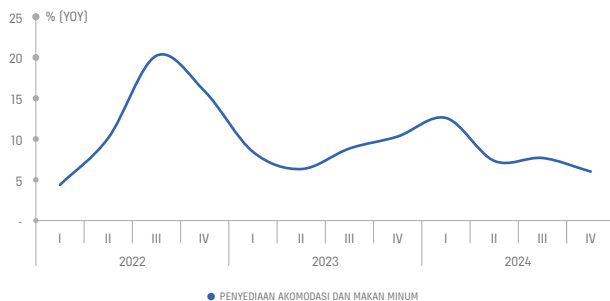
Kinerja positif LU penyediaan akomodasi dan makan minum terkonfirmasi melalui adanya peningkatan kredit penyediaan akomodasi makan dan minum, yang tercatat tumbuh sebesar 10,91% (yoy) pada triwulan IV 2024, meningkat dibandingkan triwulan III 2024 yang berkontraksi 1,47% (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh subsektor industri makanan dan minuman yang meningkat karena kunjungan wisatawan pada momentum libur sekolah dan HBKN Nataru menyebabkan kenaikan permintaan (Grafik 1.30).

Tabel 1.4. Pertumbuhan PDRB Triwulan IV 2024 Sisi Lapangan Usaha

LAPANGAN USAHA	(y-on-y)			(q-to-q)		
	Q4/23	Q3/24	Q4/24	Q4/23	Q3/24	Q4/24
Sisi Produksi	4,86	5,05	5,07	2,90	0,31	2,92
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,19	3,84	1,66	-11,61	-4,56	-13,45
Pertambangan dan Penggalian	-0,57	10,33	15,50	-4,82	7,95	-0,36
Industri Pengolahan	3,63	2,90	4,76	1,60	-1,72	3,43
Pengadaan Listrik, Gas	16,50	12,76	1,91	14,38	-0,79	3,37
Pengadaan Air	10,36	-2,37	-4,36	2,00	-2,52	-0,08
Konstruksi	7,26	8,84	7,90	8,29	10,99	7,36
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,86	4,48	5,11	-0,15	0,05	0,44
Transportasi dan Pergudangan	6,10	6,53	6,10	2,99	-0,77	2,57
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,31	7,67	6,01	15,18	-4,77	13,40
Informasi dan Komunikasi	3,98	3,56	4,51	0,01	1,65	0,93
Jasa Keuangan	6,48	7,04	2,61	-0,37	1,75	-4,50
Real Estate	2,79	4,04	4,69	-0,01	0,62	0,61
Jasa Perusahaan	9,32	2,50	5,82	0,02	-1,29	3,26
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,11	5,39	3,48	11,01	-2,94	9,00
Jasa Pendidikan	3,89	3,49	5,85	2,45	4,36	4,79
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,57	5,50	5,66	0,44	0,51	0,59
Jasa lainnya	3,20	5,07	4,60	10,57	-8,66	10,07

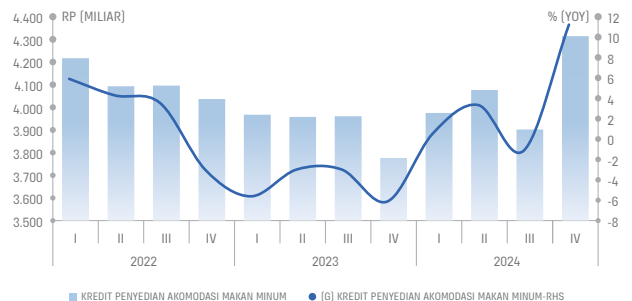
Sumber : BPS

Grafik 1.29. Pertumbuhan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum



Sumber: BPS DIY

Grafik 1.30. Perkembangan Kredit Penyediaan Akomodasi Makan Minum



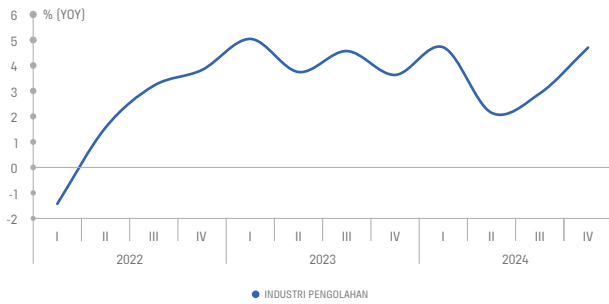
Sumber: Bank Indonesia

1.2.2. Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Permintaan yang meningkat mendorong LU industri pengolahan tumbuh lebih tinggi pada triwulan IV 2024. LU industri pengolahan tercatat tumbuh sebesar 4,76% (yoy) pada triwulan laporan, meningkat dibandingkan triwulan III 2024 sebesar 2,90% (yoy) (Grafik 1.31). Pertumbuhan tersebut didorong oleh subsektor industri makanan dan minuman yang meningkat karena kunjungan wisatawan pada momentum libur sekolah dan HBKN Nataru menyebabkan kenaikan permintaan. Pelaksanaan pilkada juga meningkatkan permintaan subsektor industri tekstil dan pakaian jadi. Lebih lanjut, masih berlangsungnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) berdampak positif terhadap pemenuhan bahan baku yang termasuk ke dalam subsektor industri barang galian bukan logam.

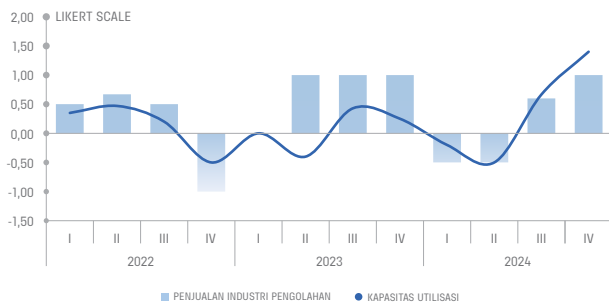
Peningkatan LU industri pengolahan terkonfirmasi melalui liaison yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan liaison, LS penjualan industri pengolahan mengalami kenaikan dari 0,60 pada triwulan III 2024 menjadi 1,00 di triwulan IV 2024. Lebih tingginya permintaan berdampak terhadap kapasitas utilisasi yang juga meningkat. Rata-rata kapasitas utilisasi industri pengolahan di DIY pada triwulan IV 2024 mencapai 52,26%. Sejalan dengan hal tersebut, LS kapasitas utilisasi pada triwulan laporan tercatat sebesar 1,00, meningkat dari triwulan III 2024 dengan LS 0,67 (Grafik 1.32).

Grafik 1.31. Pertumbuhan LU Industri Pengolahan



Sumber: BPS DIY

Grafik 1.32. Kinerja Penjualan dan Kapasitas Utilisasi Liaison Bank Indonesia



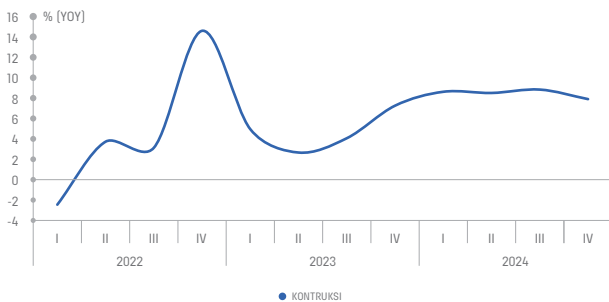
Sumber: Bank Indonesia

1.2.3. Lapangan Usaha Konstruksi

LU konstruksi pada triwulan laporan tumbuh positif. Pertumbuhan LU konstruksi mencapai 7,90% (yoy) (Grafik 1.33). Pertumbuhan tersebut sejalan dengan kinerja investasi bangunan yang juga mengalami peningkatan pada triwulan IV 2024. Proyek investasi besar yang masih berlangsung di DIY meliputi PSN Tol Jogja-Solo-YIA, serta Jembatan Kretek di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Berdasarkan hal tersebut proyek pembangunan pemerintah masih mendominasi kinerja LU konstruksi DIY.

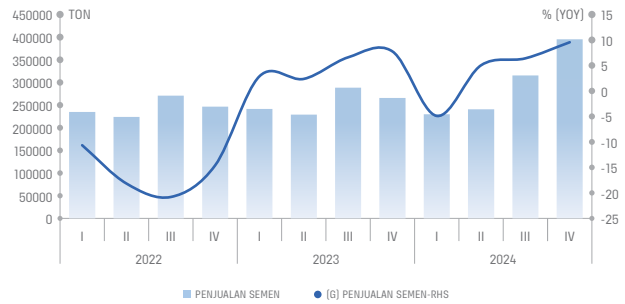
Pertumbuhan LU konstruksi yang meningkat terkonfirmasi melalui konsumsi semen. Konsumsi semen menunjukkan peningkatan dari 6,40% (yoy) pada triwulan III 2024, menjadi

Grafik 1.33. Pertumbuhan LU Konstruksi



Sumber: BPS DIY

Grafik 1.34. Perkembangan Penjualan Semen



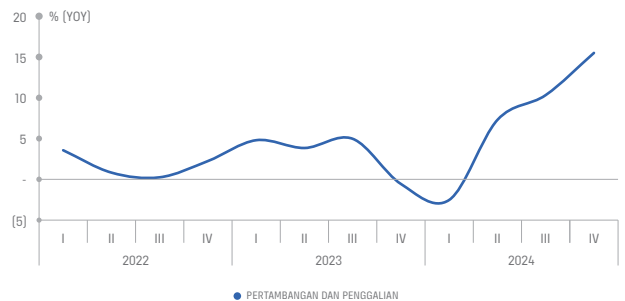
Sumber: Asosiasi Semen

tumbuh 9,55% (yoy). Konsumsi semen yang meningkat mengindikasikan aktivitas konstruksi yang juga meningkat (Grafik 1.34).

1.2.3 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

LU Pertambangan dan Penggalian di triwulan IV 2024 tumbuh lebih tinggi pada triwulan IV 2024. LU Pertambangan dan Penggalian tercatat tumbuh 15,50% (yoy) pada triwulan laporan, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 10,33% (yoy) (Grafik 1.35). Hal ini sejalan dengan adanya peningkatan kegiatan konstruksi di DIY sehingga mendorong naiknya permintaan terhadap komoditas penggalian, seperti pasir, maupun batu-batuan.

Grafik 1.35. Perkembangan LU Pertambangan dan Penggalian



Sumber: BPS DIY

Boks 1 :

Survei Biaya Hidup Mahasiswa di DIY

Sebagai salah satu daerah pusat pendidikan tinggi di Indonesia, DIY memiliki potensi dari aspek sosial dan ekonomi. Masyarakat DIY memandang pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemajuan daerah (Suryadarma *et al.*, 2004). DIY memiliki SDM yang berkualitas, terutama dalam bidang akademik dan penelitian. Industri pendidikan tinggi di DIY terutama ditunjang oleh jumlah perguruan tinggi yang sangat banyak mencakup universitas, institut, sekolah tinggi, akademi dan politeknik. Berdasarkan publikasi BPS (2023) tentang Ikhtisar Data Pendidikan Tinggi 2022/2023, jumlah perguruan tinggi di DIY pada 2022/2023 sebanyak 135 institusi yang meliputi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Adapun menurut data yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jumlah program studi di DIY sebanyak 1.414. Sementara itu, jumlah mahasiswa meningkat 2,85%, dari 429.907 orang di tahun 2021 menjadi 442.162 di tahun 2022/2023 (Provinsi DIY dalam Angka tahun, 2023). Penelitian ini merupakan rangkaian seri penelitian empat tahunan sejak tahun 2008 untuk memotret dan menganalisis potensi keberadaan mahasiswa di DIY.

Hasil survei menunjukkan bahwa biaya hidup mahasiswa semakin meningkat setiap periode survei karena semakin meningkatnya harga barang dan jasa serta meningkatnya preferensi mahasiswa. Ada sembilan komponen biaya hidup mahasiswa yang disurvei dan diamati, yaitu sewa tempat tinggal, makan dan minum, transportasi, komunikasi, kesehatan, *shopping goods* (pengeluaran keperluan bulanan), gaya hidup (*life style*), *laundry*, dan lainnya.

Rata-rata pengeluaran biaya hidup mahasiswa di DIY pada tahun 2024 sebesar Rp2.966.514,00 mengalami kenaikan sebesar 1,69% dari tahun 2020 sebesar Rp2.917.264,00. Terdapat perubahan distribusi alokasi pengeluaran mahasiswa di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun

2020. Rata-rata pengeluaran biaya hidup mahasiswa lebih tinggi dibandingkan rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga di DIY tahun 2023 sebesar Rp1.731.560,00 dan Upah Minimum Provinsi DIY tahun 2024 sebesar Rp2.125.898,00.

Selain itu, pendidikan tinggi di DIY memiliki kontribusi di bidang ekonomi, yaitu peningkatan kegiatan ekonomi daerah dan berkembangnya kewirausahaan. Keberadaan perguruan tinggi dan mahasiswa di DIY memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, seperti dalam sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa (Badan Pusat Statistik DIY, 2021).

Berdasarkan penelitian Biaya Hidup Mahasiswa di DIY tahun 2024, total rata-rata pengeluaran per mahasiswa mencapai 2.966.514,35, menunjukkan besarnya potensi kontribusi mahasiswa terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan peran penting mereka dalam menggerakkan berbagai sektor ekonomi di DIY. Mempertimbangkan bahwa jumlah mahasiswa berdasarkan data Ikhtisar Data Pendidikan Tinggi pada tahun 2022/2023 sekitar 442.162 orang, maka estimasi total pengeluaran mahasiswa mencapai Rp1.311.679.917.970,51 per bulan. Angka estimasi ini meningkat 25,62% dibandingkan dengan estimasi pengeluaran mahasiswa di DIY berdasarkan survei tahun 2020 sebesar Rp1.044.174.588.378,00 per bulan.

Jika disetarakan satu tahun, estimasi pengeluaran mahasiswa di DIY sebesar Rp15,74 triliun selama satu tahun, lebih tinggi dari hasil survei tahun 2020 sebesar Rp12,53 triliun. Perkiraan kontribusi pengeluaran mahasiswa terhadap total PDRB DIY atas dasar harga berlaku 2023 sebesar 8,71%. Dari sisi nominal, estimasi pengeluaran mahasiswa DIY hasil survei tahun 2024 lebih besar, namun dari sisi kontribusi terhadap PDRB sedikit lebih rendah. Hasil survei tahun 2020, kontribusi pengeluaran mahasiswa di DIY terhadap PDRB harga berlaku tahun 2019 diperkirakan sebesar 8,86%.

Gambar 1. Perbandingan Biaya Hidup Mahasiswa Tahun 2020 dan 2024

2020	Makan dan Minum	Lifestyle	Sewa tempat Tinggal	Lainnya	Transportasi	Shooping goods	Komunikasi	Kesehatan
	Rp 882.239 30%	Rp 716.700 25%	Rp 585.758 20%	Rp 211.715 7%	Rp 193.275 7%	Rp 150.165 5%	Rp 101.668 3%	Rp 75.745 3%
2024	Makan dan Minum	Lifestyle	Sewa tempat Tinggal	Lainnya	Transportasi	Shooping goods	Komunikasi	Kesehatan
	Rp 780.431 26%	Rp 685.824 23%	Rp 655.369 22%	Rp 241.406 8%	Rp 190.002 6%	Rp 161.263 5%	Rp 160.410 5%	Rp 91.809 3%

1. Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023). Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2023.

Kehadiran mahasiswa tidak hanya terbatas pada konsumsi pribadi tetapi juga mencakup kebutuhan akomodasi, transportasi, serta berbagai jasa yang mendukung kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi terkait. Kegiatan usaha makan dan minum menempati posisi pertama dengan perkiraan nilai kegiatan usaha sebesar Rp345.076.790.339,48 per bulan, diikuti kegiatan *lifestyle* mencapai Rp303.245.369.623,79 per bulan, dan sewa tempat tinggal sebesar Rp289.779.389.488,49 per bulan. Hal ini mencerminkan tingginya kebutuhan mahasiswa terhadap barang dan jasa, termasuk makanan, minuman, dan akomodasi, yang mendukung aktivitas sehari-hari mereka.

Berdasarkan estimasi potensi kontribusi pengeluaran mahasiswa terhadap PDRB DIY, total rata-rata pengeluaran per mahasiswa mencapai 2.966.514,35 rupiah per bulan. Kontribusi ini signifikan mengingat PDRB ADHB DIY pada tahun 2023 mencapai 180,69 triliun rupiah, dengan mahasiswa DIY berkontribusi sebesar 8,71%. Analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi mahasiswa terhadap ekonomi lokal DIY sangat signifikan. Pengeluaran mahasiswa tidak hanya mencakup kebutuhan primer seperti makanan, tempat tinggal, dan

transportasi, tetapi juga mencerminkan kontribusi terhadap sektor jasa dan gaya hidup.

Dengan demikian, analisis ini memberikan gambaran terkait bagaimana kontribusi mahasiswa tidak hanya berpengaruh terhadap perekonomian DIY dalam hal pengeluaran langsung, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam pengembangan pendidikan tinggi di DIY, seperti meningkatkan daya saing internasional, memperkuat kemitraan dengan industri, dan menjaga keberlanjutan pendanaan (Suliswiyadi et al., 2017)². Dalam konteks ini, pengambilan kebijakan perlu mempertimbangkan strategi penataan wilayah yang mendukung aksesibilitas dan keberlanjutan ekonomi bagi mahasiswa, sehingga DIY dapat tetap menjadi lingkungan yang ramah dan ekonomis bagi para pelajar dan masyarakat umum. Penataan wilayah yang ramah terhadap mahasiswa, termasuk dalam hal biaya hidup yang terjangkau, dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan kontribusi positif mereka terhadap ekonomi DIY, sambil mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pertumbuhan populasi mahasiswa yang dinamis.

Tabel 1. Perkiraan Kontribusi Mahasiswa di DIY terhadap PDRB ADHB 2023

KOMPONEN PENGELUARAN	Rata-rata	Estimasi Potensi	Asumsi
Sewa tempat tinggal	655.369,28	289.779.389.488,49	Jumlah mahasiswa:
Makan dan Minum	780.430,68	345.076.790.339,48	442.162
Transportasi	190.001,59	84.011.482.215,99	
Komunikasi (pulsa dan paket data)	91.809,19	40.594.534.453,41	PDRB Atas Dasar
Kesehatan (biaya berobat dan periksa)	160.410,12	70.927.258.034,24	Harga Berlaku 2023 (triliun):
Shopping goods (peralatan mandi, dll)	161.263,40	71.304.547.725,65	180,69
Lifestyle (gaya hidup)	685.824,13	303.245.369.623,79	Estimasi Konsumsi Mahasiswa:
a. Skincare & body treatment	191.494,71		15,74
b. Rekreasi & hiburan	149.019,05		
c. Berkumpul (hangout) di café	153.241,32		Kontribusi:
d. Pembelian game online/layanan aplikasi berbayar	95.308,72		8,71%
e. Olahraga	96.760,33		
Laundry	81.697,50	36.123.529.995,00	
Lainnya	159.708,47	70.617.016.094,46	
Jumlah	2.966.514,35	1.311.679.917.970,51	

Sumber: Hasil survei (2024) dan BPS (2024), data diolah

2. Suliswiyadi, S., Maruti, A., & Suranto, S. (2017). Strategi peningkatan daya saing pendidikan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 17(1), 61-72.





02

Keuangan Daerah

Realisasi pendapatan Pemerintah Daerah se-DIY pada triwulan IV 2024 tumbuh positif meski mencatatkan perlambatan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya. Meski melambat, realisasi dari pendapatan mencapai lebih dari target didorong dengan pertumbuhan PAD yang stabil serta pertumbuhan retribusi yang signifikan dibanding triwulan sebelumnya dengan adanya digitalisasi retribusi. Sejalan dengan realisasi dari pendapatan, realisasi belanja Pemda menunjukkan pertumbuhan positif meskipun melambat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya. Realisasi Belanja Pusat bertumbuh positif meski melambat dengan didorong oleh capaian positif dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).



Realisasi pendapatan Pemda se-DIY pada triwulan IV 2024 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 4,68% (yoy) dengan total pendapatan mencapai Rp17,824 triliun dan serapan realisasi sebesar 101,21% terhadap pagu. Pertumbuhan realisasi pendapatan Pemda se-DIY pada triwulan IV 2024 didorong oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer yang masing-masing bertumbuh sebesar 5,96% (yoy) dan 4,22% (yoy). Pendapatan transfer telah terealisasi sebesar 99,94% terhadap pagu yang didorong oleh pertumbuhan realisasi dari dana perimbangan. Di sisi lain, postur Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan sebesar 42,28% jika dibandingkan triwulan IV 2023. Secara keseluruhan, kemandirian fiskal se-DIY pada triwulan IV 2024 relatif meningkat dibandingkan triwulan yang sama di tahun lalu, tercermin dari rasio PAD terhadap total pendapatan dari 32,25% menjadi 32,64%.

Realisasi belanja Pemda se-DIY pada triwulan IV 2024 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar Rp17,561 triliun dengan capaian realisasi 95,12%. Kinerja positif pos belanja APBD secara umum ditopang oleh belanja operasional yang memiliki kontribusi sebesar 73,28% dari total belanja pemerintah dengan pertumbuhan positif sebesar 6,36% (yoy). Sejalan dengan belanja operasional, Belanja Tidak Terduga (BTT) juga mengalami pertumbuhan sebesar 38,05% (yoy). Pertumbuhan belanja secara umum tertahan oleh menurunnya komponen Belanja Modal yang terkontraksi sebesar 5,44% (yoy) dan komponen Belanja Transfer yang terkontraksi sebesar 0,36%.

Kinerja Pendapatan APBN di DIY bertumbuh signifikan sebesar 15,08% (yoy) setelah terealisasi sebesar Rp 10,01 Triliun dengan capaian 97,59% dari target pada tahun 2024. Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah, realisasi

belanja K/L di DIY juga bertumbuh 3,83% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp23,64 triliun atau 95,35% terhadap pagu. Transfer Ke Daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp10,65 triliun hingga akhir Desember 2024 dengan pertumbuhan 4,04% (yoy).

2.1 Realisasi APBD se-DIY Triwulan IV 2024

2.1.1. Realisasi Pendapatan

Pagu anggaran pendapatan Pemda se-DIY pada tahun 2024 tumbuh sebesar 4,99% (yoy) dengan total anggaran pendapatan sebesar Rp17,21 triliun. Peningkatan pertumbuhan pagu anggaran ini didorong dengan target anggaran pendapatan pada Pendapatan Retribusi Daerah yang meningkat sebesar 444,85% (yoy). Sebaliknya, pertumbuhan pagu anggaran ini tertahan dengan adanya penurunan target pada anggaran lain-lain PAD yang sah dengan penurunan pagu sebesar 63,66% (yoy).

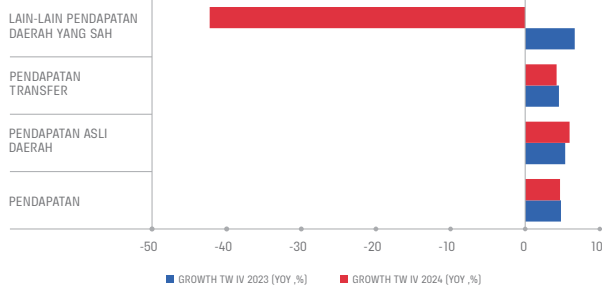
Realisasi pendapatan Pemda se-DIY pada triwulan IV 2024 menunjukkan pertumbuhan arah positif sebesar 4,69% (yoy) dengan total pendapatan sebesar Rp17,82 triliun dan realisasi sebesar 101,21% terhadap pagu. Meskipun bertumbuh positif, capaian realisasi pendapatan terhadap pagu pada triwulan IV 2024 lebih rendah menjadi sebesar 101,21% apabila dibandingkan triwulan IV 2023 yang sebesar 101,51%. Sejalan dengan capaian serapan, pertumbuhan pendapatan pada triwulan IV 2024 lebih rendah dengan capaian sebesar 4,69% apabila dibandingkan dengan triwulan IV 2023 yang bertumbuh sebesar 4,79%. Melambatnya pertumbuhan realisasi pendapatan berasal dari realisasi lain-lain PAD yang terkontraksi sebesar 62,46% (yoy) yang sejalan dengan penurunan pagu pada realisasi postur pendapatan tersebut sebesar 63,66% (yoy). (Tabel 2.1).

Tabel 2.1. Realisasi Pendapatan Pemda se-DIY (Rp Juta)

URAIAN	APBD 2023 (Rp Juta)	s.d. TW IV 2023		APBD 2024 (Rp Juta)	s.d. TW IV 2024		% Pertumbuhan Realisasi (yoy)	% Pertumbuhan pagu APBD
		Realisasi (Rp Juta)	% serapan terhadap pagu		Realisasi (Rp. Juta)	% serapan terhadap pagu		
I PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.267.884	5.491.285	104,24%	5.595.797	5.818.547	103,98%	5,96	6,22
Pendapatan Pajak Daerah	3.777.972	3.900.138	103,23%	3.926.398	4.058.090	103,35%	4,05	3,93
Pendapatan Retribusi Daerah	188.125	194.629	103,46%	1.024.999	1.070.292	104,42%	449,91	444,85
Pendapatan Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	236.650	236.536	99,95%	255.234	254.705	99,79%	7,68	7,85
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.065.137	1.159.982	108,90%	389.167	435.459	111,90%	-62,46	-63,46
II PENDAPATAN TRANSFER	11.469.270	11.497.831	100,25%	11.989.832	11.983.126	99,94%	4,22	4,54
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	10.151.491	10.177.601	100,26%	10.688.854	10.682.416	99,94%	4,96	5,29
Transfer Antar Daerah	1.317.778	1.320.230	100,19%	1.300.979	1.300.710	99,98%	-1,48	-1,27
III LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	37.858	38.833	102,57%	25.672	22.414	87,31%	-42,28	-32,19
Pendapatan Hibah	37.858	38.833	102,57%	25.672	22.313	86,92%	-42,54	-32,19
Dana Darurat	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%		
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0,00%	0,00%	0	101	0,00%		
TOTAL PENDAPATAN	16.775.012	17.027.949	101,51%	17.611.301	17.824.087	101,21%	4,68	4,99

Sumber: BPKAD se-DIY, diolah, 2024

Grafik 2.1 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Pemda se-DIY



Sumber: BPKAD se-DIY, diolah, 2024

Pertumbuhan realisasi pendapatan Pemda se-DIY pada triwulan IV 2024 didorong oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer yang masing-masing bertumbuh sebesar 5,96% dan 4,22% (Grafik 2.1). Retribusi daerah sebagai faktor pendorong PAD tumbuh secara signifikan sebesar 449,91% (yoy) seiring kenaikan tarif retribusi pembuangan sampah ke TPA Piyungan sebesar 3 kali lipat pada awal tahun 2024, naiknya tarif retribusi objek wisata di sejumlah kabupaten dan kota, berbagai perubahan tarif retribusi di berbagai sektor utama pelayanan kesehatan di RSUD, penyediaan tempat usaha dan pemanfaatan aset daerah, serta peluncuran QRISna pada aplikasi Joga Smart Service sebagai pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kota Yogyakarta.

Pendapatan transfer pada triwulan IV 2024 terealisasi sebesar 99,94% terhadap pagu yang didorong oleh pertumbuhan realisasi dari dana perimbangan. Adapun Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Perimbangan masih mendominasi pendapatan transfer sebesar 89% dibandingkan dengan transfer daerah yang memiliki pangsa pendapatan transfer sebesar 11%. Rasio dana perimbangan¹ yang besar justru menunjukkan ketergantungan yang tinggi antara Pendapatan Daerah dengan anggaran dan realisasi dana dari transfer pemerintah pusat.

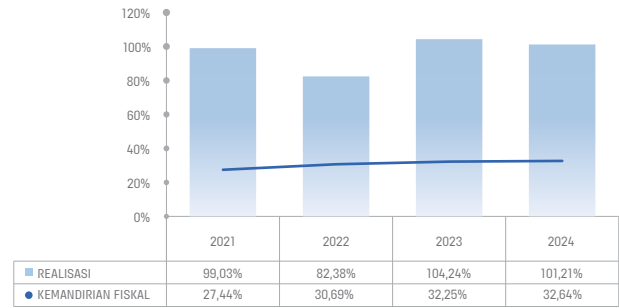
Di sisi lain, realisasi komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kontraksi sebesar 42,28% (yoy) jika dibandingkan pada triwulan IV 2023. Terjadinya kontraksi pada realisasi ini sesuai dengan adanya penurunan anggaran sebesar 32,19% pada postur dimaksud. Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari dana pemerintah pusat yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur,

Tabel 2.2 Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota DIY

	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi DIY	33,44%	33,33%	40,92%	39,48%	41,19%
Sleman	29,79%	29,96%	35,30%	38,19%	34,93%
Kota Yogyakarta	33,13%	35,01%	38,39%	44,96%	41,08%
Bantul	21,23%	20,98%	24,19%	26,55%	24,47%
Kulon Progo	15,20%	20,03%	20,14%	19,05%	14,25%
Gunung Kidul	11,80%	12,31%	15,76%	14,59%	14,25%

1. Rasio Dana Perimbangan adalah indikator yang menunjukkan sejauh mana ketergantungan keuangan suatu pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dana Perimbangan terdiri dari DAU, DAK dan DBH

Grafik 2.2 Rasio PAD terhadap total pendapatan se-DIY



Sumber: BPKAD se-DIY, diolah

dan program sosial lainnya. Dana hibah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Yogyakarta. (Grafik 2.1).

Secara keseluruhan, kemandirian fiskal se-DIY pada triwulan IV 2024 relatif meningkat dibandingkan triwulan yang sama di tahun lalu, tercermin dari rasio PAD terhadap total pendapatan dari 32,25% menjadi 32,64% (yoy) (Grafik 2.2). Jika ditinjau menurut kabupaten/kota, dalam 5 tahun terakhir kemandirian fiskal mengalami perbaikan pada 2 wilayah yaitu pada Provinsi DIY dan Kab. Kulon Progo, dan sisanya mengalami penurunan. Kemandirian fiskal tertinggi terjadi pada Provinsi DIY, Kab. Sleman, dan Kota Yogyakarta. Sedangkan Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul masih terbilang rendah. Hal ini sejalan dengan isu ketimpangan kemiskinan antara DIY bagian utara dan Selatan, dimana pariwisata sebagai penggerak ekonomi utama masih berpusat di sekitar sumbu filosofi². Penurunan ini menunjukkan adanya ruang optimalisasi kemandirian fiskal hingga angka 50% untuk dapat menjadi daerah dengan indeks kemandirian fiskal kategori sedang dalam rangka mengurangi ketergantungan dengan anggaran pusat. (Tabel 2.2).

Salah satu kunci dalam meningkatkan kemandirian fiskal adalah PAD yang berdaya. Dalam mendorong kinerja PAD tersebut, beberapa upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam rangka akselerasi mendorong PAD antara lain:

- Peluncuran QRISna sebagai kanal pembayaran retribusi pelayanan pasar Kota Yogyakarta pada aplikasi *Jogja Smart Services*.
- Perluasan kanal penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) nontunai, bekerjasama dengan BPD DIY sebagai Bank RKUD. Terdapat 8 (delapan) kanal penerimaan yang tersedia, yaitu QRIS, *mobile/sms/internet banking*, ATM, EDC, *teller bank*, *UE reader*, agen bank, dan *e-commerce* serta membuka *booth* pembayaran PDRD di event-event besar kabupaten/kota.
- Go Door Pak Mo (*Go Door to Door* Pakai Motor/Mobil) untuk jemput bola pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ke komunitas masyarakat atau lingkungan RT/RW.

2. Sumbu filosofi adalah wilayah Yogyakarta yang membentang dari utara ke Selatan (mencakup wilayah Sleman - Kota Yogyakarta)

- Implementasi QRIS Dinamis (QRISNA) dalam *Jogja Smart Service* (aplikasi/website pelayanan publik Kota Yogyakarta) yang mengakomodasi pembayaran PDRD secara nontunai, termasuk dengan QRIS.
- Penyediaan QRIS dinamis untuk pembayaran PDRD nontunai di *website* pemkab (Kab. Sleman).
- Pemberian *sweetener* berupa promo *cashback* atau promo sembako untuk pembayaran (PKB) dengan QRIS dan *m-banking* BPD DIY.

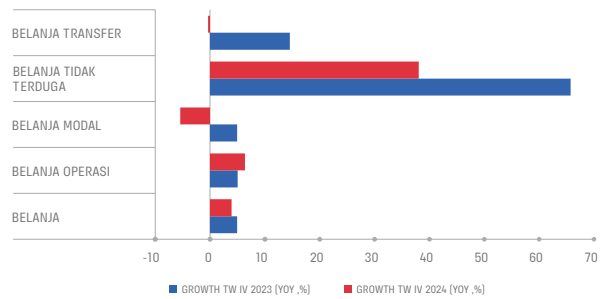
2.1.2 Realisasi Belanja

Realisasi belanja Pemda se-DIY pada triwulan IV 2024 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar Rp17,56 triliun dengan capaian realisasi serapan mencapai 95,12% dari pagu tahun 2024, meningkat dibandingkan realisasi serapan pada posisi yang sama di tahun 2023 yang sebesar 94,73%. Jika dilihat dari pertumbuhannya, realisasi belanja saat ini telah terealisasi tumbuh secara positif sebesar 3,91% (yoy) walaupun mengalami perlambatan dibandingkan triwulan IV tahun 2024 yang tercatat sebesar 4,93% (yoy). (Tabel 2.3).

Kinerja positif pos belanja APBD secara umum ditopang oleh belanja operasional dengan pangsa sebesar 73,28% dari total belanja pemerintah dengan pertumbuhan positif sebesar 6,36% (yoy). Realisasi serapan ini membaik menjadi 95,49% dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 94,92% dari pagu. Komponen belanja operasi masih didominasi oleh realisasi belanja pegawai dan belanja barang

dan jasa. Berdasarkan subpostur, serapan belanja pegawai memiliki pangsa sebesar 35% dari total pagu anggaran 2024. Kinerja komponen ini tumbuh mencapai 9,87% (yoy) didorong oleh peningkatan gaji PNS sebesar 8% (yoy) di tahun 2024 dan implementasi PP No.5 Tahun 2024 mengenai kenaikan tunjangan yang direalisasikan pada Desember 2024. Selain belanja pegawai, belanja barang dan jasa berkontribusi sebesar 28% dari keseluruhan belanja APBD. Pada periode laporan telah mencapai 95,7% dari total pagu anggaran 2024 dan tumbuh sebesar 4,79% (yoy) yang didorong oleh realisasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Selain itu, pelaksanaan bansos reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga mengakselerasi belanja bantuan sosial dengan realisasi sebesar 63,09%.

Grafik 2.3 Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemda se-DIY



Sumber: BPKAD se-DIY, diolah, 2024

Tabel 2.3 Realisasi Belanja Pemda se-DIY (Rp Juta)

URAIAN	APBD 2023 (Rp Juta)	s.d. TW IV 2023		APBD 2024 (Rp Juta)	s.d. TW IV 2024		% Pertumbuhan Realisasi (yoy)	% Pertumbuhan pagu APBD
		Realisasi (Rp Juta)	% serapan terhadap pagu		Realisasi (Rp. Juta)	% serapan terhadap pagu		
I BELANJA OPERASI	12.745.635	12.098.749	94,92%	13.477.168	12.868.680	95,49%	6,36	11,39
Belanja Pegawai	6.036.665	5.749.398	95,24%	6.600.653	6.317.042	95,70%	9,87	14,81
Belanja Barang dan Jasa	5.249.729	4.908.039	93,49%	5.282.521	4.999.013	94,63%	1,85	7,63
Belanja Bunga	0	0		0	0			
Belanja Subsidi	87.786	77.297	88,05%	84.837	77.481	91,33%	0,24	9,76
Belanja Hibah	1.235.854	1.235.426	99,97%	1.352.454	1.324.655	97,94%	7,22	9,47
Belanja Bantuan Sosial	135.602	128.590	94,83%	156.702	150.488	96,03%	17,03	21,86
II BELANJA MODAL	2.123.612	1.970.821	92,81%	2.058.412	1.863.647	90,54%	-5,44	4,44
Belanja Tanah	193.030	178.192	92,31%	44.581	42.396	95,10%	-76,21	-74,98
Belanja Peralatan dan Mesin	596.792	556.980	93,33%	620.476	594.171	95,76%	6,68	11,40
Belanja Gedung dan Bangunan	584.299	532.312	91,10%	695.093	567.735	81,68%	6,65	30,58
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	693.697	651.658	93,94%	641.382	604.653	94,27%	-7,21	-1,58
Belanja Aset Tetap Lainnya	54.258	50.574	93,21%	44.954	43.141	95,97%	-14,70	-11,11
Belanja Aset Lainnya	1.536	1.105	71,96%	11.925	11.550	96,85%	945,22	979,16
III BELANJA TIDAK TERDUGA	121.601	20.344	16,73%	93.295	28.085	30,10%	38,05	358,58
IV BELANJA TRANSFER	2.849.572	2.810.831	98,64%	2.833.527	2.800.670	98,84%	-0,36	0,81
Belanja Transfer/Bagi Hasil	1.048.487	1.022.487	97,52%	1.043.166	1.026.990	98,45%	0,44	2,02
Belanja Bantuan Keuangan	1.801.085	1.788.344	99,29%	1.790.361	1.773.680	99,07%	-0,82	0,11
TOTAL BELANJA	17.840.419	16.900.745	94,73%	18.462.402	17.561.082	95,12%	3,91%	9,24%

Sumber: BPKAD se-DIY, diolah, 2024

Sejalan dengan belanja operasional, Belanja Tidak Terduga (BTT) juga mengalami pertumbuhan sebesar 38,05% (yoy). Penggunaan BTT difokuskan untuk kejadian yang insidental seperti bencana alam, bansos anak terlantar dan darurat sampah, maupun penanganan wabah. Adapun salah satu penggunaan BTT pada tahun 2024 telah digunakan untuk belanja 4 juta liter air bersih untuk masyarakat Gunung Kidul yang terdampak kekeringan.

Pertumbuhan belanja secara umum tertahan oleh kontraksi komponen Belanja Modal dan komponen Belanja Transfer yang masing-masing sebesar 5,44% (yoy) dan 0,36% (yoy) (Grafik 2.4). Penurunan Belanja Modal terjadi di mayoritas komponen yakni belanja tanah, belanja jalan dan irigasi serta belanja aset tetap lainnya yang mengalami efisiensi dari tahun sebelumnya. Dari sisi rencana APBD, anggaran untuk belanja modal pada tahun 2024 mengalami penurunan karena *refocusing* anggaran untuk Pemilu dan Pilkada yang mayoritas terakomodir dalam belanja operasi. Namun, Belanja Modal sebagian telah terealisasi untuk peningkatan kualitas infrastruktur seperti pengembangan Lumbung Mataraman untuk penguatan sektor pangan dan pertanian.

2.1.3 Realisasi Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan pada triwulan IV 2024 terealisasi sebesar 75,06% dibandingkan pagu dengan capaian realisasi penerimaan pembiayaan mengalami kontraksi sebesar 21,64% (yoy). Penurunan realisasi penerimaan tersebut disebabkan oleh menurunnya SILPA tahun anggaran sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp1,19 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada triwulan IV 2024 sebesar Rp1,53 triliun

(Tabel 2.5). Adapun penurunan pertumbuhan realisasi tersebut juga sejalan dengan penurunan anggaran dari penerimaan pembiayaan 2024.

Realisasi pengeluaran pembiayaan pada triwulan IV 2024 juga mengalami kontraksi sebesar 26,88% (yoy) dengan realisasi mencapai Rp343 miliar atau 96,84% dari pagu tahun anggaran 2024. Pengeluaran pembiayaan untuk untuk penyertaan modal terkontraksi sebesar 75,88% sejalan dengan penurunan anggaran pada subpostur tersebut. Walaupun terkontraksi, penyerapan pengeluaran penyertaan modal telah terealisasi 93,88% dari pagu. Pengeluaran pembiayaan lainnya yaitu pemberian pinjaman daerah terealisasi sebesar 54% sehingga belum dapat mendongkrak kinerja pengeluaran pembiayaan DIY secara penuh pada 2024 ini.

2.2 Realisasi Pembiayaan

Secara keseluruhan, pagu anggaran pendapatan APBN DIY 2024 bertumbuh sejalan pada angka yang sama dengan pertumbuhan target belanja, yaitu sebesar 8% (yoy). Pertumbuhan dari pendapatan APBN DIY ini didorong oleh kenaikan target anggaran penerimaan perpajakan yang bertumbuh signifikan sebesar 10% (yoy).

Kinerja Pendapatan APBN di DIY bertumbuh signifikan sebesar 15,08% (yoy) setelah terealisasi sebesar Rp 10,01 Triliun dengan capaian 97,59% dari target pada tahun 2024 (Tabel 2.6). Pertumbuhan realisasi pendapatan pada tahun 2024 tercapai lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya bertumbuh sebesar 4,95% (yoy).

Tabel 2.4. Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Pemda se-DIY

URAIAN	APBD 2023 (Rp Juta)	s.d. TW IV 2023		APBD 2024 (Rp Juta)	s.d. TW IV 2024		% Pertumbuhan Realisasi (yoy)	% Pertumbuhan pagu APBD
		Realisasi (Rp Juta)	% serapan terhadap pagu		Realisasi (Rp. Juta)	% serapan terhadap pagu		
I PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.535.999	1.534.158	99,88%	1.498.712	1.202.158	80,21%	-21,64%	8,19%
SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	1.530.999	1.530.839	99,99%	1.193.692	1.195.652	100,16%	-21,90%	-13,64%
Pencairan Dana Cadangan		0	0,00%	3	3	0,00%		0,00%
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0,00%	981	981	100,00%		0,00%
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0,00%	0	361	0,00%		0,00%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.000	3.320	66,39%	11.000	5.161	46,92%	55,46%	175,08%
Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0,00%	293.036	0	0,00%		2563,96%
II PENGELUARAN PEMBIAYAAN	470.591	469.591	99,79%	354.575	343.375	96,84%	-26,88%	-27,57%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0,00%	221.700	224.008	0,00%		0,00%
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	464.591	464.591	100,00%	119.375	112.067	93,88%	-75,88%	-28,74%
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0,00%	0	0	0,00%		0,00%
Pemberian Pinjaman Daerah	6.000	5.000	83,33%	13.500	7.300	54,07%	46,00%	-15,63%
Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0,00%	0	0	0,00%		0,00%
PEMBIAYAAN	1.065.408	1.064.567	99,92%	1.144.137	858.783	75,06%	-19,33%	56,02%

Sumber: DJPB DIY, diolah, 2024

Tabel 2.5. Realisasi APBN di DIY Triwulan IV 2024 (Rp Miliar)

URAIAN	2023	2024		% Serapan terhadap pagu Anggaran	% Pertumbuhan realisasi (yoy)
	Realisasi (Rp. Miliar)	Anggaran (Rp. Miliar)	Realisasi 2024 (Rp Miliar)		
A. Pendapatan dan Hibah					
Penerimaan Perpajakan	6.239	8.113,87	7.267,50	89,57	16,48
Penerimaan Bukan Pajak	2.459	2.143,23	2.742,72	127,97	11,52
Total Pendapatan APBN di DIY	8.699	10.257,10	10.010,22	97,59	15,08
B. Belanja Negara					
Belanja Pemerintah Pusat	12.527,79	14.082,44	12.986,96	92,22	3,67
Belanja Bantuan Sosial	19,81	21,43	21,43	100,00	8,18
Belanja Barang	4.998,01	5.968,83	5.580,36	93,49	11,65
Belanja Modal	2.959,95	3.091,76	2.306,14	74,59	-22,09
Belanja Pegawai	4.550,02	5.000,42	5.079,03	101,57	11,63
Transfer Ke Daerah	10.240,78	10.711,53	10.654,21	99,46	4,04
Transfer Dana Alokasi Umum	5.425,71	5.795,07	5.791,39	99,94	6,74
Dana Alokasi Khusus Fisik	385,64	552,66	511,34	92,52	32,59
Dana Alokasi Khusus Non-fisik	1.852,67	1.925,24	1.912,92	99,36	3,25
Transfer Dana Bagi Hasil	337,73	246,38	246,38	100,00	-27,05
Dana insentif daerah	331,00	232,64	232,64	100,00	-29,71
Dana Keistimewaan	1.372,73	1.420,00	1.420,00	100,00	3,44
Dana Desa	535,31	539,55	539,55	100,00	0,79
Total Belanja APBN di DIY	22.768,57	24.793,97	23.641	95,35	3,83

Sumber: D/Pb DIY, diolah, 2024

Pertumbuhan positif dari pendapatan APBN di DIY didorong oleh kinerja positif di kedua komponen yakni Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan Perpajakan tumbuh 16,48% (yoy) didorong oleh penerimaan PPh mencapai Rp3,8 miliar (tabel 2.7) dan penerimaan Bukan Pajak tumbuh 11,52% (yoy) disumbang oleh kinerja Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) berupa Biaya Pendidikan dan Rumah Sakit. Pertumbuhan pada PNBP lainnya ditopang oleh kinerja positif Penerbitan STNK, Pendapatan dari BPJS Kesehatan, dan Pelayanan Pertanahan. Selain itu, kinerja perpajakan didorong oleh utilisasi dan upah tenaga kerja yang mengalami kenaikan, konstruksi, dan sewa/pengalihan tanah bangunan yang ikut menyokong pertumbuhan kinerja perpajakan.

Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah, realisasi belanja K/L di DIY juga bertumbuh 3,83% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp23,64 triliun atau 95,35% terhadap pagu (Tabel 2.6) Belanja Pemerintah Pusat terakselerasi sebesar Rp12,98 triliun atau tumbuh 3,67% (yoy). Sejalan dengan APBD, seluruh komponen belanja pemerintah pusat meningkat, kecuali belanja modal. Realisasi belanja barang salah satunya digunakan untuk kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan UPT Ditjen Pelayanan Kesehatan. Selain itu, Realisasi Belanja Bantuan Sosial juga tumbuh 8,18% (yoy) dengan bentuk

realisasi berupa pemberian KIP Kuliah kepada 2.092 orang mahasiswa penerima.

Transfer Ke Daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp10,65 Triliun hingga akhir Desember 2024 dengan pertumbuhan. Dana Alokasi Umum (DAU) masih mendominasi TKD dengan realisasi sebesar Rp5,79 triliun. DAK Fisik juga mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 32,59% (yoy) dan telah terealisasi sebesar Rp511 miliar yang digunakan untuk penghapusan kemiskinan ekstrim. Adapun DAK Non Fisik juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,25% (yoy) dengan kontribusi belanja sebesar Rp1,90 triliun dengan penggunaan untuk penurunan prevelansi stunting, pengembangan dan pengolahan hasil ternak, bimbingan teknis pelaku usaha, fasilitasi penanaman modal, kajian peluang investasi serta pembiayaan pengawasan penanaman modal. Di sisi lain, penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) di tahun 2024 cenderung berkontraksi sebesar 27,05% (yoy) yang disebabkan oleh turunnya plafon anggaran dibanding dengan tahun lalu. Seluruh dana DID, Transfer dana Bagi Hasil, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa masing-masing terealisasi penuh sebesar 100% dari pagu anggaran yang utamanya dipergunakan untuk penyelenggaraan kegiatan budaya di DIY dan pembangunan desa.

Tabel 2.6. Penerimaan Perpajakan Triwulan IV 2024 (Rp Miliar)

Penerimaan Perpajakan	Target APBN 2024 (Rp Miliar)	Realisasi Tahun 2024 (Rp Miliar)
Pajak Penghasilan	4.470,43	3.872,85
Pajak Pertambahan Nilai	2.627,31	2.476,08
Pajak Bumi dan Bangunan	0,11	0,13
Cukai	887,67	820,22
Pajak Lainnya	115,95	89,53
Bea Masuk	12,41	8,69
Total Penerimaan	8.113,87	7.267,50

sumber: DJPb DIY, diolah



03

Perkembangan Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan dua kota di DIY pada triwulan IV 2024 melanjutkan tren melandai dan semakin terkendali dalam rentang sasaran nasional. Melandainya inflasi didorong oleh sinergi berbagai upaya pengendalian inflasi oleh TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) DIY bersama mitra kerja di daerah yang semakin solid melalui kerangka 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) dalam rangka menjaga kestabilan harga di DIY.



3.1. Perkembangan Inflasi Triwulan IV 2024

Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul sebagai kota IHK yang mewakili DIY menutup tahun 2024 dengan inflasi yang terkendali dalam rentang sasaran nasional. Berdasarkan hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi gabungan kota IHK di DIY pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 1,28% (yoy), lebih rendah dari realisasi triwulan yang sama tahun 2023 dan inflasi triwulan III 2024 yang masing-masing sebesar 3,17% (yoy) dan 1,57% (yoy). Realisasi tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan inflasi gabungan 38 Kabupaten/Kota IHK di Jawa dan inflasi nasional yang keduanya tercatat sebesar 1,58% (yoy) dan 1,57% (yoy) pada triwulan IV 2024.

Terkendalinya inflasi tahunan pada triwulan IV 2024 didukung oleh melimpahnya pasokan sejumlah komoditas pangan utama khususnya hortikultura seiring dengan kondisi cuaca yang lebih kondusif pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Selain itu, ekspektasi masyarakat yang terkendali didukung oleh berbagai inovasi program yang dikembangkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) DIY turut menjadi faktor terjaganya inflasi DIY sepanjang tahun 2024. Penurunan inflasi lebih dalam tertahan oleh tingginya harga emas dunia akibat ketidakpastian global yang tertransmisi ke harga emas perhiasan domestik.

Berdasarkan kota IHK, inflasi Kabupaten Gunungkidul pada triwulan IV 2024 tercatat 0,92% (yoy), lebih rendah dibanding inflasi Kota Yogyakarta yang mencapai 1,73% (yoy). Relatif rendahnya inflasi Gunungkidul dibandingkan kota IHK lain di DIY sejalan dengan struktur perekonomiannya, di mana pembentukan harga sebagai representasi rural area di DIY dengan pertanian sebagai sektor unggulannya relatif terjaga di tengah berlanjutnya panen komoditas aneka cabai pada triwulan IV 2024. Sementara Kota Yogyakarta yang ditopang oleh sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa cenderung mengalami fluktuasi harga lebih tinggi seiring momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang memicu kenaikan permintaan.

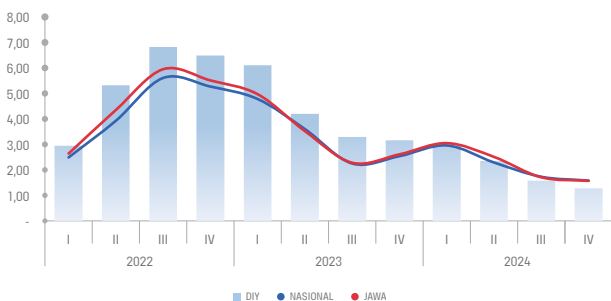
Ditinjau berdasarkan kelompok pengeluaran, melandainya inflasi pada triwulan IV 2024 terutama terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Hal ini tidak terlepas dari komitmen

dan konsistensi TPID DIY dalam melanjutkan langkah pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan mengusung 7 (tujuh) *championship* program, diantaranya: 1) penguatan ketahanan komoditas pangan strategis, 2) penguatan kapasitas budidaya pangan mandiri, 3) optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD), 4) dukungan fasilitasi distribusi pangan, 5) penguatan digitalisasi dan data pangan, 6) dukungan pelaksanaan operasi pasar/pasar murah/Gerakan Pangan Murah/Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dan 7) penguatan koordinasi dan komunikasi.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi kontributor tertinggi pembentukan inflasi gabungan kota IHK di DIY pada triwulan IV 2024. Inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya pada triwulan IV 2024 memiliki andil sebesar 0,51% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2024 yang sebesar 0,48% (yoy). Secara tahunan, kelompok ini mengalami inflasi sebesar 8,59% (yoy), lebih tinggi dari realisasi triwulan sebelumnya sebesar 8,08% (yoy). Tekanan inflasi kelompok ini terutama dipicu oleh berlanjutnya ketegangan geopolitik negara Timur Tengah dan penyesuaian suku bunga *The Fed* yang berdampak pada ketidakpastian global sehingga memicu kenaikan harga emas dunia yang dianggap sebagai aset *safe haven*. Kondisi tersebut tertransmisi kepada kenaikan harga emas perhiasan di dalam negeri sehingga pada triwulan IV 2024 komoditas emas perhiasan memiliki andil inflasi terbesar mencapai 0,36% (yoy). Selain emas, tingginya tekanan inflasi kelompok ini turut dipicu oleh sub-kelompok perawatan pribadi seperti aneka jenis sabun seiring kenaikan harga *Crude Palm Oil* (CPO) global sebagai bahan baku utamanya.

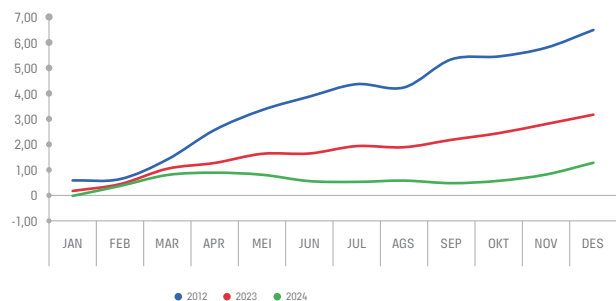
Andil tertinggi kedua dalam pembentukan inflasi gabungan kota IHK DIY setelah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Namun jika dibandingkan triwulan sebelumnya, andil inflasi kelompok ini menunjukkan penurunan dari 0,77% (yoy) menjadi 0,22% (yoy). Sejalan dengan hal itu, inflasi tahunan kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 0,82% (yoy) pada triwulan IV 2024, relatif melandai dari triwulan sebelumnya yang sebesar 2,79% (yoy). Kondisi ini terjadi seiring melimpahnya pasokan komoditas aneka cabai di

Grafik 3.1. Inflasi DIY, Jawa dan Nasional (%yoy)



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.2. Inflasi Tahun Kalender DIY (%ytd)



Sumber: BPS, diolah

Tabel 3.1. Tren Perkembangan Inflasi DIY (% yoy)

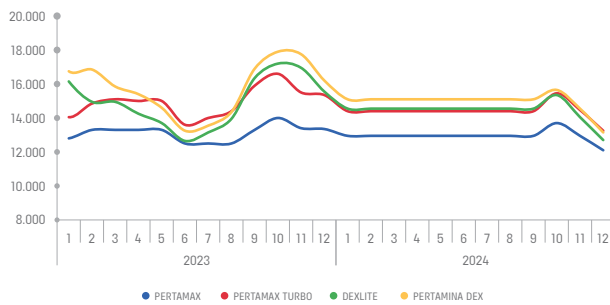
KELOMPOK INFLASI	2024			
	I	II	III	IV
Umum	2,95	2,35	1,85	1,28
Makanan, Minuman dan Tembakau	8,34	5,32	2,79	0,82
Pakaian dan Alas Kaki	0,56	1,17	1,98	2,09
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,23	0,37	0,49	0,75
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,70	1,07	1,66	1,52
Kesehatan	2,36	3,06	2,56	2,41
Transportasi	0,75	0,72	0,32	0,02
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,08	-0,26	-0,28	-0,32
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1,15	1,61	2,31	2,27
Pendidikan	1,72	1,71	2,05	1,13
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,14	1,28	0,89	0,99
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	3,23	5,25	8,08	8,59

Sumber: BPS DIY, diolah
Keterangan: *)Angka realisasi dengan penambahan kota IHK baru, Kab. Gunungkidul

tengah berlanjutnya panen pada sejumlah daerah pemasok. Namun, penurunan lebih dalam tertahan oleh masih tingginya harga sejumlah komoditas global seperti pupuk dan benih yang turut berdampak pada harga kelompok makanan di DIY.

Berdasarkan komoditasnya, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau terutama dipicu oleh komoditas kopi bubuk dengan andil 0,18% (yoy), minyak goreng dengan andil 0,06% (yoy), dan bawang merah dengan andil 0,05% (yoy). Peningkatan harga kopi bubuk sejalan dengan kenaikan harga kopi dunia akibat dinamika kondisi cuaca dan iklim yang mempengaruhi produksi kopi di negara sentra. Selain itu, menurut *International Coffee Organization*, permintaan kopi mengalami pertumbuhan lebih dari 2% setiap tahunnya. Hal tersebut menyebabkan permintaan kopi lebih tinggi dibandingkan produksinya. Sementara, peningkatan harga minyak goreng seiring kenaikan harga minyak sawit global dan keterbatasan pasokan domestik akibat usia pohon yang sudah tua dan praktek pertanian yang kurang baik optimal sehingga menyebabkan keterbatasan produksi. Sedangkan naiknya

Grafik 3.3. Perkembangan Harga BBM (Rp/L)



Sumber: Pertamina, diolah

Tabel 3.2. Perkembangan Andil Inflasi DIY per Kelompok Pengeluaran (% yoy)

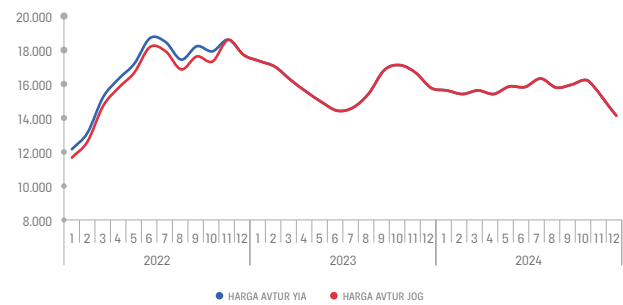
KELOMPOK INFLASI	2024			
	I	II	III	IV
Umum	2,95	2,35	1,85	1,28
Makanan, Minuman dan Tembakau	2,26	1,44	0,77	0,22
Pakaian dan Alas Kaki	0,02	0,05	0,08	0,09
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,04	0,06	0,09	0,13
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,03	0,05	0,08	0,07
Kesehatan	0,08	0,10	0,08	0,08
Transportasi	0,10	0,10	0,04	0,00
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,02	0,03	0,04	0,04
Pendidikan	0,11	0,11	0,13	0,07
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,11	0,12	0,08	0,09
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,19	0,31	0,48	0,51

Sumber: BPS DIY, diolah
Keterangan: *)Angka realisasi dengan penambahan kota IHK baru, Kab. Gunungkidul

harga bawang merah disebabkan oleh keterbatasan pasokan akibat panen yang kurang optimal di sejumlah daerah pemasok seperti Jawa Tengah seiring kondisi cuaca yang kurang kondusif.

Selain kelompok makanan, minuman, dan tembakau, penurunan inflasi gabungan kota IHK DIY didorong oleh berlanjutnya tren penurunan inflasi kelompok transportasi. Pada triwulan IV 2024, kelompok transportasi memberikan andil inflasi sebesar 0,00% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan andil 0,04% (yoy). Sejalan dengan itu, inflasi tahunan kelompok transportasi mengalami penurunan dari 0,32% (yoy) pada triwulan III 2024 menjadi 0,02% (yoy) pada triwulan IV 2024. Berdasarkan komoditasnya, melambatnya tekanan inflasi disebabkan oleh deflasi tarif angkutan udara sebesar 0,05% (yoy), lebih dalam dibandingkan andil deflasi triwulan sebelumnya yang sebesar 0,03% (yoy) sejalan dengan penurunan rata-rata triwulanan harga avtur sebesar -5,28% (qtoq). Melambatnya tekanan inflasi tersebut juga seiring dengan kebijakan penurunan harga tarif angkutan udara

Grafik 3.4. Perkembangan Harga Avtur (Rp/L)



Sumber: Pertamina, diolah

sebesar 10% dari Pemerintah yang efektif diterapkan pada 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 dalam rangka momen HBKN Nataru 2025. Selain itu, penambahan 4 (empat) rute penerbangan langsung Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) dari dan menuju Berau, Padang, Jambi, dan Pangkalpinang yang mulai beroperasi sejak triwulan III 2024 juga turut menjadi faktor penurunan inflasi pada triwulan laporan. Sementara dari sisi *demand*, operasional jalan tol Yogyakarta – Solo ruas Klaten-Prambanan yang dibuka secara fungsional pada 20 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025 turut meningkatkan diversifikasi moda transportasi yang dimanfaatkan untuk mobilitas masyarakat sehingga menahan tarif angkutan udara. Sejalan dengan itu, harga bensin tercatat mengalami penurunan pada triwulan IV 2024 dibandingkan triwulan sebelumnya. Mengacu pada rilis harga bahan bakar non-subsidi oleh Pertamina per Desember 2024, harga Pertamina di DIY tercatat sebesar Rp12.100/L, Pertamina Turbo Rp13.250/L, Dexlite Rp12.700/L, dan Pertamina Dex Rp13.150/L.

Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi yang lebih dalam dari -0,28% (yoy) pada triwulan III 2024 menjadi -0,32% (yoy). Sementara andil deflasi tercatat stabil sebesar -0,02% (yoy). Menurut komoditasnya, deflasi didorong oleh komoditas telepon seluler seiring turunnya permintaan masyarakat. Selain telepon seluler, komoditas lainnya seperti laptop/notebook dan TV berwarna juga terpantau mengalami deflasi yang mengindikasikan preferensi prioritas konsumsi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan primer daripada barang sekunder dan tersier.

Inflasi kelompok pendidikan pada triwulan IV 2024 turut mengalami penurunan tekanan dari 2,05% (yoy) pada triwulan III 2024 menjadi sebesar 1,13% (yoy) pada triwulan IV 2024 dengan andil 0,07% (yoy), lebih rendah dari andil pada triwulan sebelumnya sebesar 0,13% (yoy). Masih berjalannya periode perkuliahan serta pembelajaran pada sekolah tingkat dasar hingga menengah dan atas di tengah belum masuknya periode pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi dan sekolah pada triwulan IV 2024 berdampak pada melandainya tekanan inflasi pada tahun 2024. Selain itu, pembatalan rencana kenaikan UKT Perguruan Tinggi tahun 2024 – 2025 juga turut berdampak pada penurunan ekspektasi inflasi masyarakat terhadap kelompok pendidikan.

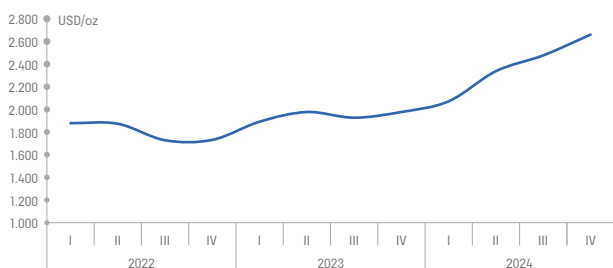
Lebih lanjut, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga turut mencatatkan penurunan andil inflasi menjadi 0,07% (yoy) pada triwulan IV 2024 dari triwulan sebelumnya sebesar 0,08% (yoy). Sejalan dengan kondisi tersebut, inflasi tahunan kelompok ini mengalami penurunan dari semula 1,66% (yoy) menjadi 1,52% (yoy) pada triwulan IV 2024. Turunnya tekanan inflasi terutama dipicu oleh sub-kelompok peralatan rumah tangga meliputi barang-barang elektronik seiring meningkatnya permintaan masyarakat yang diikuti dengan peningkatan harga komoditas di sub-kelompok barang dan jasa untuk pemeliharaan rumah tangga seperti aneka sabun pembersih.

Sementara itu, andil inflasi kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami kenaikan dari 0,09% (yoy) menjadi 0,13% (yoy) pada triwulan IV 2024. Hal itu sejalan dengan kenaikan inflasi tahunan kelompok ini dari 0,49% (yoy) menjadi 0,75% (yoy) yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan dari iuran pembuangan sampah seiring dengan penutupan permanen Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan sejak April 2024 yang memicu kenaikan tarif jasa pengelolaan sampah domestik perorangan.

Seperti halnya kenaikan inflasi kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, realisasi kelompok pakaian dan alas kaki mengalami peningkatan andil inflasi menjadi 0,09% (yoy) pada triwulan IV 2024 dari triwulan sebelumnya 0,08% (yoy). Sejalan dengan hal itu, inflasi kelompok ini mencatatkan kenaikan dari 1,98% (yoy) pada triwulan IV 2024 menjadi 2,09% (yoy). Lebih lanjut, tekanan inflasi kelompok pakaian dan alas kaki terutama dipicu oleh sub-kelompok pakaian seiring meningkatnya permintaan terhadap pakaian jadi menjelang momen HBKN Nataru.

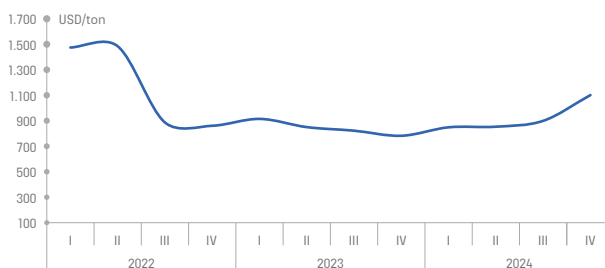
Sejalan dengan itu, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran turut mencatatkan peningkatan andil inflasi pada triwulan IV 2024 dari sebelumnya 0,08% (yoy) menjadi 0,09% (yoy). Inflasi kelompok ini tercatat naik sebesar 0,99% (yoy) pada triwulan IV 2024 atau lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 0,89% (yoy). Kondisi ini seiring dengan naiknya permintaan masyarakat dan inbound wisatawan ke DIY di tengah momen menjelang HBKN Nataru. Hal itu dicerminkan oleh rata-rata tingkat okupansi hotel di DIY

Grafik 3.5. Perkembangan Harga Emas Global (USD/oz)



Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 3.6. Perkembangan Harga CPO Global



Sumber: Bloomberg, diolah

pada triwulan IV 2024 sebesar 55,90% atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata triwulan sebelumnya yang sebesar 55,51%.

3.2. Tracking Inflasi Triwulan I 2025

Memasuki triwulan I 2025, perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan kota inflasi di DIY tetap terjaga. Berdasarkan hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS), IHK gabungan kota DIY bulan Januari 2025 tercatat deflasi sebesar 0,35% (mtm), atau secara tahunan mengalami inflasi sebesar 0,95% (yoy). Sedangkan pada Februari 2025, IHK gabungan kota DIY tercatat mengalami deflasi sebesar 0,86% (mtm), atau secara tahunan mengalami deflasi sebesar 0,30% (yoy). Realisasi IHK DIY tersebut lebih rendah dibandingkan pada Desember 2024 yang mengalami inflasi sebesar 0,46% (mtm), dan secara tahunan mencatatkan inflasi 1,25% (yoy). Dengan demikian, capaian inflasi DIY secara tahun kalender hingga Februari 2025 tercatat deflasi sebesar 1,20% (ytd) dan pada keseluruhan triwulan I 2025 secara tahunan berpotensi lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2024 didorong faktor seasonal menjelang HBKN Idul Fitri. Namun demikian, inflasi triwulan I 2025 diperkirakan tetap terjaga pada rentang sasaran nasional $2,5 \pm 1\%$ seiring dengan atas sinergi berbagai upaya pengendalian inflasi TPID DIY yang semakin solid.

Secara spasial, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul pada Januari 2025 mengalami deflasi sebesar 0,35% (mtm). Sedangkan secara tahunan, Kabupaten Gunungkidul tercatat mengalami inflasi 0,64% (yoy), lebih rendah dibanding inflasi Kota Yogyakarta yang mencapai 1,30% (yoy). Sementara itu pada Februari 2025, Kota Yogyakarta mengalami deflasi sebesar 0,85% (mtm). Sejalan dengan itu, Kab. Gunungkidul pada periode laporan juga tercatat mengalami deflasi sebesar 0,86% (mtm). Sedangkan secara tahunan, Kab. Gunungkidul

Tabel 3.3 Perkembangan Inflasi DIY Triwulan I* 2025 per Kelompok Pengeluaran (% yoy)

KELOMPOK INFLASI	I 2025*	
	Inflasi	Andil
Umum	0,95	0,95
Makanan, Minuman dan Tembakau	3,21	0,90
Pakaian dan Alas Kaki	2,80	-,12
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-6,12	-1,06
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,91	0,09
Kesehatan	1,92	0,06
Transportasi	0,65	0,09
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,30	-0,02
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	2,34	0,04
Pendidikan	1,31	0,08
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,31	0,12
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	8,92	0,53

Sumber: BPS DIY, diolah
Keterangan: *Angka sementara realisasi Januari 2025 dengan penambahan kota IHK baru, Kab. Gunungkidul

tercatat mengalami deflasi mencapai 0,66% (yoy), lebih rendah dibanding Kota Yogyakarta yang tercatat inflasi sebesar 0,11% (yoy).

Deflasi periode Februari 2025 terutama disebabkan oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan BBRT seiring dengan kebijakan stimulus diskon tarif listrik dan kereta api oleh Pemerintah. Penurunan tarif listrik [-1,05%, mtm] disebabkan oleh kebijakan stimulus diskon sebesar 50% bagi konsumen rumah tangga dengan daya listrik di bawah 2.200VA. Kebijakan ini berlaku pada Januari hingga Februari 2025 untuk pelanggan prabayar dan pascabayar. Deflasi juga disebabkan oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, khususnya pada komoditas bawang merah, cabai merah, dan daging ayam ras. Turunnya harga bawang merah [-0,04%, mtm] dan cabai merah [-0,04%, mtm] dipengaruhi oleh pasokan yang terjaga seiring dengan masuknya stok dari sejumlah wilayah pemasok. Turunnya harga bawang merah dan cabai merah juga sejalan dengan masih rendahnya permintaan. Sedangkan penurunan harga daging ayam ras [-0,02%, mtm] disebabkan oleh terjaganya pasokan pada level peternak seiring dengan belum meningkatnya permintaan masyarakat jelang momen HBKN Idul Fitri.

Di sisi lain, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, khususnya pada komoditas emas perhiasan. Naiknya harga emas perhiasan (0,08%, mtm) didorong oleh naiknya harga emas global di tengah berlanjutnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Hal tersebut berdampak pada naiknya permintaan terhadap emas global yang tertransmisi pada emas perhiasan sebagai aset *safe haven*. Selain itu, komoditas sigaret kretek mesin (SKM) (0,05%, mtm) dan sigaret kretek tangan (SKT) (0,05%, mtm) pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau masing-masing turut memberikan andil inflasi pada periode laporan. Hal ini didorong oleh penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024.

Tekanan IHK gabungan dua kota di DIY diproyeksikan mengalami peningkatan pada triwulan I 2025 dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya. Kondisi ini disebabkan oleh faktor *seasonal* menjelang momen HBKN Idul Fitri pada bulan Maret 2025. Permintaan masyarakat yang naik untuk berbagai komoditas khususnya pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau diperkirakan akan meningkatkan inflasi pada triwulan I 2025 dibandingkan dengan triwulan IV 2024. Selain itu, pada kelompok transportasi, peningkatan permintaan pada berbagai komoditas transportasi khususnya angkutan udara seiring dengan momen HBKN Idul Fitri 2025 juga diperkirakan akan berdampak pada naiknya tekanan inflasi. Berlanjutnya ketidakpastian geopolitik global juga berdampak pada potensi naiknya *imported inflation* pada berbagai komoditas. Namun demikian, tekanan inflasi yang lebih tinggi berpotensi tertahan dari sisi *supply* seiring dengan kondisi cuaca pada tahun 2025 yang lebih kondusif dibandingkan dengan tahun sebelumnya

seiring melandainya efek El Nino. Kondisi tersebut mendorong naiknya produktivitas panen pada sejumlah komoditas yang sedang memasuki musim panen pada triwulan I 2025 seperti beras dan sejumlah komoditas lainnya seperti aneka cabai dan aneka sayur.

Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan inflasi DIY terus terjaga pada kisaran targetnya. Kondisi tersebut didukung oleh upaya TPID DIY dalam kerangka 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) DIY 2025, diantaranya pelaksanaan operasi pasar/pasar murah yang diperkuat dengan optimalisasi Kios Segoro Amarto sebagai *price reference store* untuk menjaga daya beli, kampanye belanja bijak, penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) baik antar provinsi maupun intra provinsi, implementasi Masyarakat Lan Pedagang Tanggap Inflasi (MRANTASI) dalam rangka meningkatkan literasi kepada pedagang pasar dan masyarakat, pengembangan *Geographic Information System* (GIS) sebagai geoportal dalam optimalisasi monitoring produksi dan penggunaan lahan yang juga menjadi bentuk nyata digitalisasi data pangan sebagai *early warning system* dalam pengendalian inflasi DIY, serta inisiasi Gerakan Membeli Sayuran Petani (GEMATI) oleh Kabupaten Sleman untuk menyerap produksi sayuran yang melimpah. Selain itu terdapat *social movement* masyarakat terkait keseimbangan harga, seperti gerakan masjid Nurul Ashri sebagai aggregator panen raya komoditas hortikultura. Hal itu sebagai wujud komitmen Bank Indonesia, Pemerintah, serta seluruh mitra kerja dalam mencapai inflasi 2025 sesuai target sebesar $2,5\% \pm 1$.

3.3. Program Pengendalian Inflasi Daerah

Berbagai upaya dan forum koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi DIY telah dilakukan di sepanjang triwulan IV 2024 bersinergi dengan TPID DIY dan mitra kerja terkait. Keseluruhan langkah pengendalian inflasi tersebut dilaksanakan dengan mengimplementasikan kerangka 4K sesuai Peta Jalan TPID DIY Tahun 2020 – 2024, diantaranya:

i. Aspek Keterjangkauan Harga:

- Intensifikasi penyelenggaraan Operasi Pasar/Gelar Pangan Murah/Pasar Murah yang hingga bulan Desember 2024 telah terlaksana lebih dari 412 kali di seluruh Kabupaten/Kota se-DIY disertai dengan optimalisasi peran Kios Segoro Amarto sebagai *price reference store*;
- Replikasi Kios Segoro Amarto di Pasar Sentul, di samping kios eksisting yang sudah beroperasi di Pasar Beringharjo, Pasar Kranggan, dan Pasar Prawirotan;
- Penguatan peran *price reference store* melalui pengembangan inovasi Warung MRANTASI (Masyarakat Lan Pedagang Tanggap Inflasi) yang diresmikan pada 23 Juli 2024 oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemda DIY, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Kepala Bulog Divre DIY, dan Pimpinan Cabang BPD DIY. Nantinya, pedagang pasar rakyat yang

tergabung dalam Warung MRANTASI berhak memperoleh sejumlah benefit, diantaranya: 1) prioritas alokasi pasokan dari Bulog, 2) prioritas alokasi subsidi pada pelaksanaan Operasi Pasar, 3) prioritas akses penyaluran pembiayaan KUR oleh BPD DIY, dan 4) kesempatan mendapatkan *reward* menarik bagi pedagang dengan transaksi tertinggi menggunakan QRIS;

- Pemantauan harga dan pasokan langsung ke produsen, distributor, hingga pedagang ritel untuk memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan pada momentum HBKN Idul Fitri dan Idul Adha;
- Fasilitasi subsidi ongkos angkut komoditas pangan strategis dari distributor ke pedagang di pasar tradisional dan juga sewa kendaraan untuk pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah dalam rangka menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen; serta
- Optimalisasi alokasi APBD dalam mendukung subsidi harga komoditas pangan utama.

ii. Aspek Ketersediaan Pasokan:

- Penguatan data dan informasi melalui pengembangan Neraca Pangan yang dapat diakses melalui website <https://tpid.jogjapro.go.id>;
- Membangun ketahanan pangan masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan/lahan tidur menggunakan *Command Center* Pertanahan dan Tata Ruang yang telah diimplementasikan oleh Pemkot Yogyakarta;
- Pengembangan GIS sebagai geoportal dalam optimalisasi *monitoring* produksi dan penggunaan lahan yang akan disinkronisasi dengan website TPID. Upaya ini juga menjadi bentuk nyata digitalisasi data pangan sebagai *early warning system* dalam pengendalian inflasi DIY.
- Pemda DIY bekerjasama dengan Perum Bulog DIY terkait Pengelolaan Pangan yang Terintegrasi di Wilayah DIY untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan strategis milik pemerintah.
- Inisiasi GEMATI oleh TPID Kab. Sleman dalam menyerap produksi sayuran yang melimpah dengan melibatkan peran ASN. Selain itu terdapat *social movement* masyarakat terkait keseimbangan harga, seperti gerakan masjid Nurul Ashri sebagai aggregator.

iii. Aspek Kelancaran Distribusi:

- TPID DIY melakukan pengembangan KAD sebagai bentuk komitmen menjaga kelancaran arus barang, baik secara intra maupun antar Provinsi. Hal itu mengacu pada Berita Acara No. 500/2847 tentang Komitmen Bersama Mendorong Kemandirian Pangan dalam rangka Menjaga Kestabilan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi DIY oleh Gubernur DIY dan Kepala Daerah Kab/Kota se-DIY. Hingga triwulan III 2024, telah disepakati 5 (lima) MoU KAD, antara lain: 1) Kabupaten Sleman dengan Kota Jambi untuk

penyediaan komoditas cabai, 2) Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Blitar untuk penyerapan komoditas telur ayam ras, 3) Kabupaten Kulon Progo dengan Kota Palembang untuk penyediaan komoditas cabai merah, 4) Paguyuban Pedagang Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta dengan Gapoktan Jetis Bantul untuk pemenuhan komoditas beras, dan 5) Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk pemenuhan komoditas beras, cabai, bawang merah, ikan, dll.

- b) Memperluas pemanfaatan pasar lelang digital dan mendorong pedagang lokal untuk turut berpartisipasi dalam proses lelang komoditas hortikultura untuk kemudian memasarkan ke pasar lokal. Saat ini sedang dalam proses perluasan pada sistem pasar lelang di Kabupaten Gunungkidul dan replikasi sistem pasar lelang digital di Kabupaten Kulon Progo.

iv. Aspek Komunikasi Efektif:

- a) Peresmian program "MRANTASI" pada 8 Mei 2024, yakni inovasi program pengendalian inflasi yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY berkolaborasi dengan TPID DIY dan TPID Kota Yogyakarta sebagai sarana komunikasi efektif melalui sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan literasi masyarakat dan pedagang pasar rakyat terkait konsep inflasi dan peran aktif masyarakat dan pedagang dalam mendukung stabilisasi harga di DIY;
- b) Perluasan target *audience* program MRANTASI melalui pelaksanaan MRANTASI *Goes To School* pada bulan Juni – Juli 2024 dengan melibatkan total 500 orang guru SD, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat yang ada di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul sebagai kota IHK di DIY. Selain itu, pelaksanaan MRANTASI *Goes To School* turut diperluas pada Kabupaten lainnya, yakni Sleman, Bantul dan Kulon Progo pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan melibatkan 200 orang guru. Kegiatan tersebut terlaksana atas sinergi Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY dengan TPID DIY dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) DIY.

- c) Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah DIY eksisting beserta pemetaan penguatan dalam penyusunan peta jalan TPID ke depan;
- d) Komunikasi efektif dalam rangka pengendalian ekspektasi inflasi masyarakat melalui kampanye belanja bijak dengan memaksimalkan *omni-channel*, seruan diversifikasi pangan, dan *press conference* hasil sidak harga di beberapa pasar pantauan yang tersebar di seluruh wilayah DIY;
- e) Penyelenggaraan *High Level Meeting* (HLM) yang diinisiasi oleh TPID DIY dan TPID Kabupaten/Kota di DIY dengan total pelaksanaan sebanyak 9 (sembilan) kali hingga triwulan III 2024. Pada masing-masing HLM, fokus pembahasan berkaitan dengan kesiapan dalam menghadapi HBKN dan mitigasi inflasi yang bersifat seasonal maupun struktural dalam rangka menjaga stabilitas inflasi;
- f) Penguatan komunikasi efektif melalui Rapat Koordinasi Daerah dengan topik "Efektivitas Kebijakan Pengendalian Inflasi untuk Mendukung Stabilitas Harga dan Pasokan" pada 17 Oktober 2024;
- g) Pelaksanaan *capacity building* TPID DIY ke TPID NTB dalam rangka penguatan strategi, koordinasi serta komunikasi dalam TPID sekaligus upaya peningkatan kualitas dan kapabilitas masing-masing anggota TPID DIY guna menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengendalian inflasi. Dalam kesempatan ini, turut dilakukan penajakan potensi KAD untuk surplus komoditas NTB guna mendukung kecukupan dan kelancaran pasokan di DIY;
- h) Pelaksanaan *capacity building* tim teknis TPID DIY terkait Pemanfaatan *Machine Learning* dalam mendukung asesmen dan input pengambilan kebijakan; serta
- i) Keikutsertaan TPID DIY secara rutin dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring yang langsung dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri RI dalam rangka mendukung keselarasan dan kesinambungan program TPID DIY dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).

Boks 2 :

Sinergi Pengendalian Inflasi Pangan melalui GNPIP Wilayah Jawa 2025



Pencanangan Simbolis GNPIP Jawa Tahun 2025

Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Jawa telah terlaksana pada 21 Februari 2025 di Yogyakarta sebagai tindak lanjut pada HLM TPIP 2025 dalam memperkuat pengendalian inflasi pangan, serta sebagai bentuk dukungan implementasi program Asta Cita Pemerintah dalam swasembada pangan serta pembangunan desa. GNPIP Wilayah Jawa 2025 menjadi *kickoff* awal GNPIP yang selanjutnya akan terselenggara secara regional di masing-masing daerah seluruh Indonesia.

Pada tahun 2025, GNPIP Wilayah Jawa terselenggara dengan tema Sinergi Menjaga Ketersediaan Pasokan untuk Mendukung Pengendalian Inflasi Pangan dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan. Dengan tema ini, GNPIP Wilayah Jawa membawakan beberapa program strategis sebagai penguatan ekosistem pangan. Pertama, peningkatan produksi komoditas pangan strategis dengan intensifikasi pertanian melalui penggunaan bibit unggul, penyediaan sarana prasarana, dan pemanfaatan *digital farming*. Kedua, mendukung penyediaan pasokan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Kerja sama Antar Daerah (KAD) dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) terkait. Ketiga, penguatan peran *off taker* (BUMD/BUMDes Pangan) untuk menjaga ketersediaan pasokan komoditas pangan antar waktu dan antar wilayah melalui penguatan kelembagaan dan aspek permodalan. Pada kegiatan tersebut, telah dilaksanakan seremonial terkait penyerahan dukungan produksi dan operasional untuk intensifikasi, distribusi, dan digitalisasi pangan; KAD SPPG dan Gapoktan di wilayah Jawa; dan MoU BUMD antar wilayah di Jawa.

Kegiatan GNPIP Wilayah Jawa dihadiri secara langsung oleh Anggota Dewan Gubernur Bidang 3 – Bapak Doni P. Joewono, Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas Kemenko Pangan, Staf Ahli Deputi Sistem Dan Tata Kelola BGN, Kemendagri, Kementan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia se-Jawa (didampingi oleh Fungsi TPID) dan Pimpinan TPID Provinsi se-Jawa. Kegiatan Rakor TPIP dan TPIP dihadiri oleh peserta 27 VIP dan 54 peserta regular serta 232 peserta *online*, sementara kegiatan GNPIP dihadiri oleh 38 peserta VIP dan 103 peserta regular.

Pada kesempatan tersebut, disampaikan arahan oleh Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Bapak Doni P. Joewono untuk diperlukan sinergi dan kerja keras untuk membangun kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat sektor pertanian khususnya di pedesaan, sebagai bagian implementasi dari program Asta Cita 6. Kegiatan GNPIP merupakan upaya penguatan pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat, serta mengakselerasi capaian program unggulan GNPIP 2025 sesuai dengan target $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Sebagai tuan rumah, Sekretaris Daerah DIY, Bapak Beny Suharsono menyampaikan *success story* TPID DIY dalam pengendalian inflasi, yaitu program MRANTASI (Masyarakat *lan* Pemerintah Tanggap Inflasi) dengan penekanan pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah di daerah, khususnya dalam pemanfaatan lahan pangan untuk swasembada pangan daerah.

Selanjutnya, penyelenggaraan GNPIP dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi TPIP dan TPID Jawa dengan tujuan perumusan rekomendasi serta kesepakatan bersama dalam pengendalian inflasi. Adapun beberapa kesepakatan tersebut antara lain pentingnya peningkatan produksi pangan melalui penguatan implementasi kebijakan LP2B dan dukungan pematapan sistem irigasi khususnya di sentra produksi, penyediaan alsintan, replikasi penggunaan bibit unggul, dukungan

partisipasi dalam program petani millennial, menjaga ketersediaan energi dan mendorong implementasi EBT pada program pompanisasi dan pipanisasi, serta replikasi bisnis model korporatisasi dalam rangka mendukung akses pembiayaan. Selain itu, seluruh di wilayah Jawa berkomitmen untuk penguatan kerjasama antar daerah dalam mendukung pasokan program MBG; dan penguatan program *off taker* untuk menjaga ketersediaan pasokan komoditas antar daerah.



Pelaksanaan GNPIP Jawa Tahun 2025



04

Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kinerja intermediasi perbankan di DIY pada triwulan III 2024 tumbuh menguat dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari peningkatan penyaluran kredit di tengah melambatnya penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK). Menguatnya kinerja perbankan secara umum diiringi dengan risiko kredit yang terjaga rendah dibawah *threshold* 5%.



4.1. Kinerja Perbankan

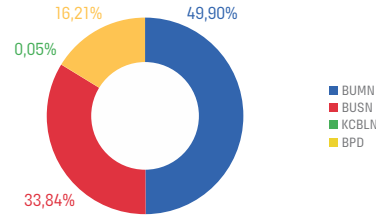
4.1.1. Kondisi Umum

Kinerja bank umum di DIY pada triwulan IV 2024 tetap kuat. Intermediasi perbankan tumbuh positif dengan risiko kredit yang terkendali. Capaian ini tidak terlepas dari sinergi Bank Indonesia bersama K/L terkait melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta implementasi bauran kebijakan Bank Indonesia yang diarahkan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*) melalui kebijakan moneter dan mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) melalui kebijakan makprudensial serta didukung dengan kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau.

Kapasitas perbankan yang terjaga baik antara lain dapat dilihat dari kondisi likuiditas yang memadai diiringi risiko kredit yang terjaga rendah dibawah *threshold* 5%. Selain itu, kapasitas perbankan diperkuat oleh berbagai pelonggaran kebijakan dan pemberlakuan Kebijakan Insentif Likuiditas Makprudensial (KLM) sebagai inovasi kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan. KLM mulai diberlakukan pada bulan Oktober 2023 bertujuan untuk mendorong penyaluran kredit kepada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit lebih tinggi bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, khususnya pada sektor hilirisasi (minerba, pertanian, peternakan, dan perikanan), perumahan (termasuk perumahan rakyat), pariwisata, keuangan inklusif (termasuk UMKM, KUR, dan ultra mikro/UMi), serta ekonomi keuangan hijau.

Perbankan yang melakukan penyaluran kredit kepada sektor-sektor tersebut akan mendapatkan insentif melalui pengurangan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia. Selain itu, sebagai upaya untuk mendorong ekosistem perbankan yang semakin luas, Bank Indonesia juga mempertahankan Rasio Intermediasi Makprudensial (RIM) dengan kisaran 84-94%; mempertahankan *Countercyclical Capital Buffer* (CcyB) sebesar 0%; mempertahankan asesmen Transparansi Suku Bunga (TSB); melanjutkan pelonggaran LTV/FTV KPR dan Uang Muka Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) hingga 31 Desember 2025, dengan rasio LTV/FTV maksimal 100% dan Uang Muka KKB minimal 0% bagi bank-bank dengan NPL/NFL < 5%, termasuk properti/kendaraan berwawasan

Grafik 4.2 Komposisi Aset Perbankan DIY



Sumber: LBU, diolah

lingkungan; serta mempertahankan Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) maksimum sebesar 30% terhadap modal bank.

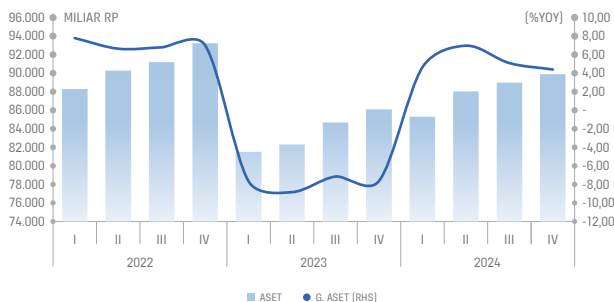
Kondisi likuiditas yang memadai serta ditopang dengan kebijakan insentif likuiditas dapat meringankan *cost of fund* perbankan, sehingga bank dapat memperluas fasilitas kredit/pembiayaan dengan suku bunga lebih rendah guna mendorong pertumbuhan kredit. Seiring dengan pertumbuhan kredit yang meningkat, total aset perbankan juga mengalami pertumbuhan.

Adapun pada triwulan IV 2024, kinerja aset perbankan DIY termoderasi, yakni dari 5,09% (yoy) pada triwulan III 2024 menjadi sebesar 4,40% (yoy) pada triwulan IV 2024 (Grafik 4.1). Jika dilihat berdasarkan kelompok bank, pangsa aset terbesar berada pada kelompok Bank Umum Milik Negara (BUMN) 49,90%, diikuti kelompok Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) yaitu 33,84%, Bank Pembangunan Daerah (BPD) 16,21%, dan Kantor Cabang Bank Luar Negeri (KCBLN) 0,05% (Grafik 4.2).

4.1.2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)

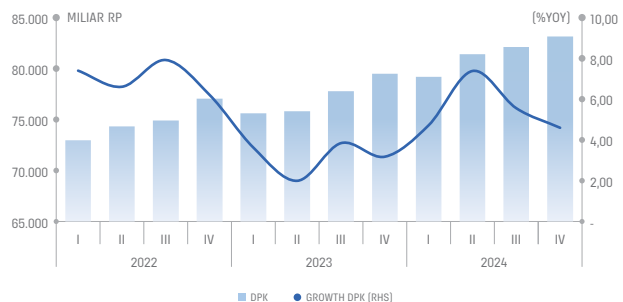
Kinerja penghimpunan DPK perbankan umum di DIY pada triwulan IV 2024 tumbuh positif meskipun termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2024, pertumbuhan DPK tercatat sebesar 4,60% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,55% (yoy) (Grafik 4.3).

Grafik 4.1 Perkembangan Aset Perbankan DIY



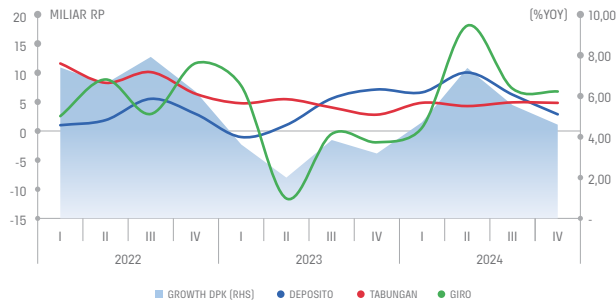
Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.3. Pertumbuhan DPK Perbankan DIY



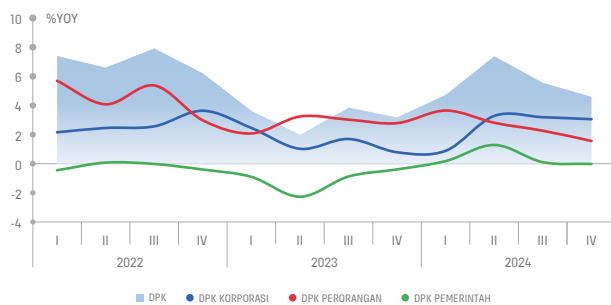
Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.4. Pertumbuhan DPK DIY berdasarkan Komponen



Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.6. Pertumbuhan DPK DIY berdasarkan Kepemilikan



Sumber: LBU, diolah

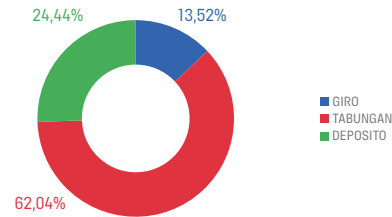
Ditinjau berdasarkan komponen pembentuknya, DPK tumbuh positif pada seluruh komponen meski termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Komponen tabungan tumbuh 4,83% [yoy] meski termoderasi dari triwulan sebelumnya 4,91% [yoy]. Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan giro dan deposito tetap tumbuh positif meskipun termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu secara berturut-turut dari 7,28% [yoy] menjadi 6,78% [yoy] untuk komponen giro; serta 6,24% [yoy] menjadi 2,86% [yoy] pada komponen deposito [Grafik 4.4.].

Hingga triwulan IV 2024, komponen tabungan memiliki share tertinggi sebagai pembentuk DPK perbankan DIY yaitu sebesar 62,96%, dengan nominal tercatat sebesar Rp51,58 triliun. Selanjutnya, share tertinggi kedua pembentuk DPK perbankan DIY adalah deposito dengan pangsa sebesar 24,44% [Rp20,32 triliun], dan giro di posisi ketiga dengan pangsa sebesar 13,52% [Rp11,24 triliun] [Grafik 4.5].

Berdasarkan klasifikasi kepemilikannya, kinerja DPK yang menurun utamanya dipicu oleh kinerja DPK Pemerintah yang terkontraksi, serta termoderasinya kinerja DPK Korporasi dan Perorangan. Pada triwulan IV 2024, pertumbuhan DPK Pemerintah tercatat -0,02% [yoy], turun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,10% [yoy].

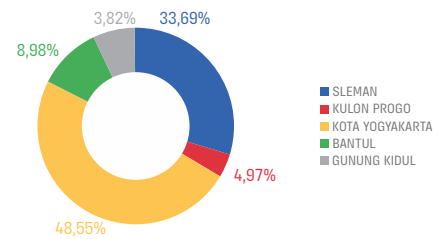
Sejalan dengan hal tersebut, DPK Korporasi tumbuh lebih rendah dari 3,19% [yoy] pada triwulan III 2024 menjadi 3,05% [yoy] pada triwulan IV 2024. Hal ini senada dengan DPK

Grafik 4.5. Pangsa DPK Bank Umum DIY



Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.7. Pangsa DPK DIY secara Spasial Triwulan IV 2024



Sumber: LBU, diolah

Perorangan yang tumbuh 1,56% [yoy], melambat dibandingkan periode sebelumnya 2,26% [yoy] [Grafik 4.6]. Adanya pertumbuhan DPK yang lebih rendah dibandingkan kredit mencerminkan kebutuhan ekspansi usaha yang lebih tinggi dibandingkan kebutuhan menyimpan dana, yang mana hal tersebut mencerminkan normalisasi dunia usaha.

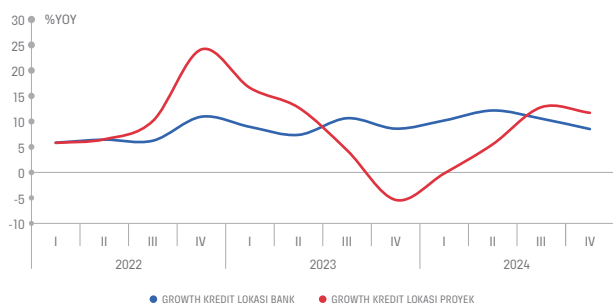
Secara spasial, peningkatan pertumbuhan DPK terutama ditopang oleh pertumbuhan DPK di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sebagai pusat perekonomian dan perdagangan di DIY. Pada triwulan IV 2024, porsi DPK perbankan tertinggi berada di Kota Yogyakarta dengan pangsa 48,55%, lalu diikuti dengan Kabupaten Sleman (33,69%), Bantul (8,98%), Kulon Progo (4,97%), dan Gunungkidul (3,82%) [Grafik 4.7].

4.1.3. Perkembangan Kredit

Pada triwulan IV 2024, kredit perbankan di DIY tetap tumbuh positif meski termoderasi dibandingkan triwulan III 2024. Pertumbuhan kredit berdasarkan lokasi proyek tercatat sebesar 11,66% [yoy], termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 12,78% [yoy] [Grafik 4.8]. Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan kredit berdasarkan lokasi bank tercatat sebesar 8,45% [yoy], sedikit melemah dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 10,51% [yoy].

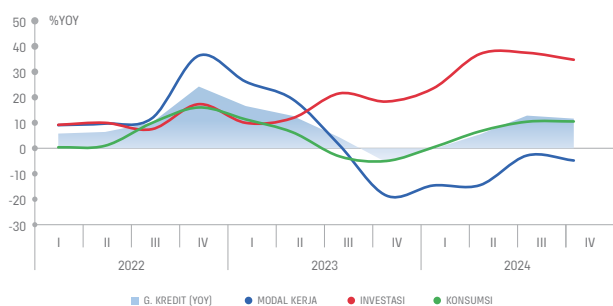
Adapun valuasi kredit perbankan DIY pada triwulan IV 2024 yaitu sebesar Rp60.370 Miliar, lebih tinggi dibandingkan valuasi kredit pada triwulan sebelumnya yaitu Rp58.998 Miliar [Grafik 4.9]. Pertumbuhan kredit yang kian akseleratif pada triwulan IV 2024

Grafik 4.8. Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Lokasi



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.10. Pertumbuhan Kredit DIY

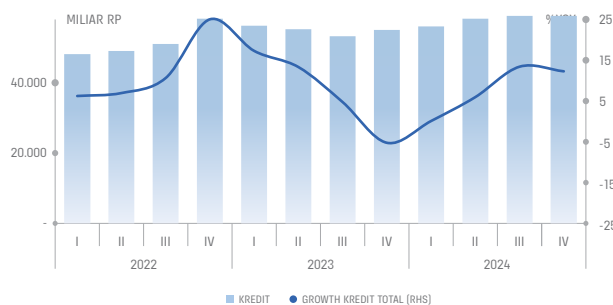


Sumber: LBU, diolah

didorong oleh kinerja ekonomi domestik yang cukup resilien dan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate) yang masih stabil pada level 6%. Meskipun demikian, terdapat beberapa risiko ke depan yang dapat menekan pertumbuhan kredit, yaitu perlambatan ekonomi dunia yang menyebabkan melemahnya permintaan ekspor Indonesia, khususnya DIY, serta meningkatnya ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik dunia.

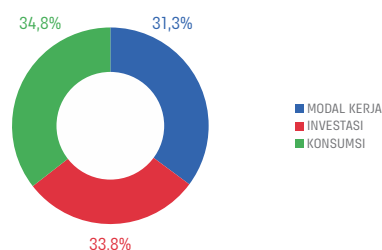
Berdasarkan jenisnya, pertumbuhan tertinggi pada triwulan IV 2024 terjadi pada komponen Kredit Konsumsi yang tumbuh sebesar 10,51% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 10,41% (yoy). Adapun Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja tetap tumbuh meski termoderasi yakni secara berturut-turut sebesar 34,72% (yoy) dan -4,81% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan III 2024 sebesar 37,47% (yoy) dan -2,85% (yoy). Kredit konsumsi tumbuh menguat seiring dengan penyaluran KPR/KPA yang masih menjadi prioritas utama kredit konsumsi perbankan, begitu juga dengan kredit multiguna dan kendaraan bermotor. Tetap tumbuhnya kredit investasi sejalan dengan berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan proyek strategis lainnya di DIY, seperti Jembatan Pandansimo, jalan tol Solo-Yogyakarta-YIA dan Yogyakarta-Bawen, serta Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Sementara itu, kredit modal kerja masih dalam posisi negatif yang dipicu oleh mulai membaiknya optimisme masyarakat akibat kinerja ekonomi domestik yang cukup baik (Grafik 4.10).

Grafik 4.9. Kinerja Pertumbuhan Kredit DIY



Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.11. Komposisi Kredit DIY Berdasarkan Penggunaan



Sumber: LBU, diolah

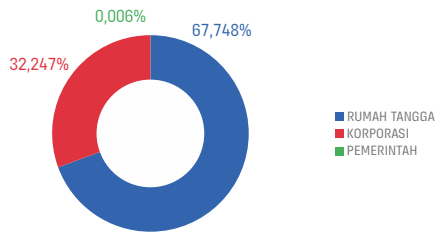
Seiring dengan perkembangan tersebut, secara komposisinya, Kredit Konsumsi memiliki pangsa terbesar terhadap total kredit DIY yaitu 34,8%, diikuti oleh Kredit Investasi sebesar 33,8% serta Kredit Modal Kerja sebesar 31,3% (Grafik 4.11).

Peningkatan pertumbuhan kredit juga dipengaruhi oleh semakin meningkatnya permintaan dari dunia usaha sejalan dengan dukungan kapasitas pembiayaan dari perbankan yang memadai sebagai dampak penerapan bauran Kebijakan Bank Indonesia melalui berbagai instrumen kebijakan seperti Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), Pelonggaran rasio *Loan to Value* (LTV) untuk kredit properti, rasio *Financing to Value* (FTV) untuk kendaraan bermotor, Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) untuk mendorong kredit UMKM, serta Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Berdasarkan kelompok debitur, pada triwulan IV 2024, penyaluran kredit DIY pada sektor Rumah Tangga mendominasi dengan pangsa mencapai 67,74% dari total kredit perbankan di DIY, lalu diikuti dengan kredit kepada sektor korporasi sebesar 32,247% (Grafik 4.12).

Meningkatnya penyaluran kredit yang ditunjukkan oleh pertumbuhan positif kredit mengindikasikan terjadinya peningkatan aktivitas intermediasi perbankan. Pada triwulan IV 2024, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berdasarkan lokasi proyek dan lokasi bank masing-masing sebesar Rp72,60 miliar dan

Grafik 4.12. Komposisi Kredit DIY Berdasarkan Kepemilikan



Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.13. Perkembangan LDR Berdasarkan Lokasi Bank dan Lokasi Proyek



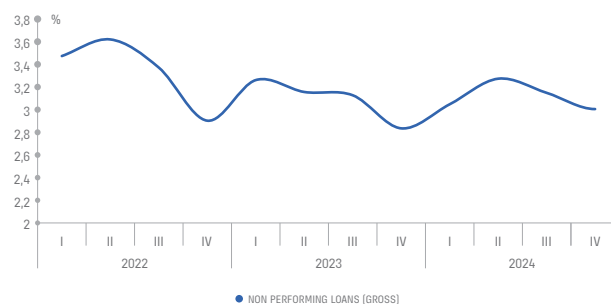
Sumber: Bank Indonesia

Rp66,64 miliar (Grafik 4.13). Angka rasio intermediasi perbankan berdasarkan lokasi proyek yang relatif lebih besar dibandingkan lokasi bank mengindikasikan terdapat gap kredit perbankan yang dialokasikan untuk pengembangan proyek dari perbankan di luar DIY dibandingkan perbankan di wilayah DIY.

4.1.4. Likuiditas dan Risiko Kredit Perbankan

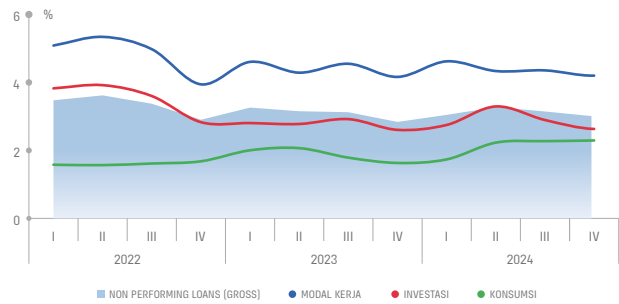
Kualitas pembiayaan perbankan tetap terjaga di tengah meningkatnya penyaluran kredit. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) triwulan IV 2024 tercatat sebesar 3,01% (yoy), lebih terkendali dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,15% dan masih berada di bawah *threshold* 5% (Grafik 4.14).

Grafik 4.14. Perkembangan NPL DIY



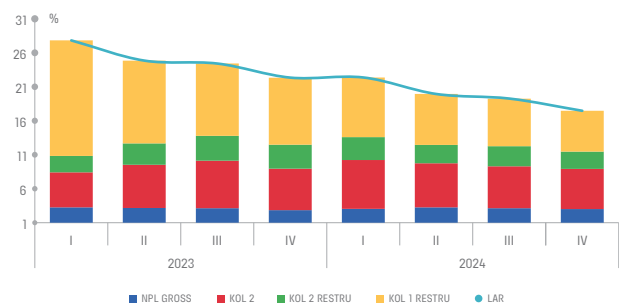
Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.15. Perkembangan NPL DIY berdasarkan Komponen



Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.16. Perkembangan LaR DIY



Sumber: Bank Indonesia

Menurunnya risiko kredit dipicu oleh terkendalnya kredit macet pada segmen Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja secara berturut-turut dari 2,89% dan 4,36% di triwulan III 2024 menjadi 2,63% dan 4,20% pada triwulan IV 2024 (Grafik 4.15).

Sejalan dengan kualitas pembiayaan di DIY yang kondusif, perkembangan kredit berisiko yang tercermin dari nilai *Loan at Risk* (LaR) melanjutkan tren perbaikan sejak tahun 2020. Nilai LaR tercatat mengalami penurunan dari 19,26% pada triwulan III 2024 menjadi 17,47% pada triwulan IV 2024 seiring penurunan pada seluruh komponen (Grafik 4.16).

4.2. Asesmen Kinerja Sektor Korporasi

4.2.1. Ketahanan Sektor Korporasi

Kinerja korporasi DIY sangat dipengaruhi oleh perkembangan faktor eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, peningkatan permintaan global mendukung peningkatan penjualan sektor korporasi berorientasi ekspor. Sementara dari sisi domestik, peningkatan intensitas penyelenggaraan MICE berdampak positif terhadap kinerja korporasi di DIY, terutama korporasi yang berkaitan dengan sektor pariwisata.

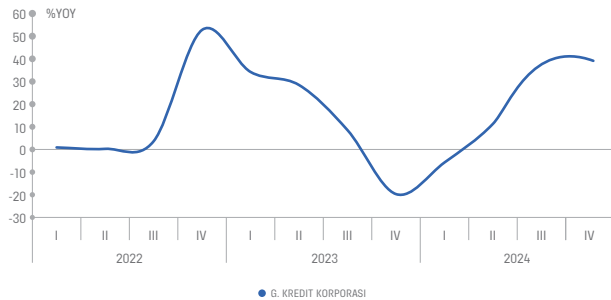
4.2.2. Exposure Perbankan pada Sektor Korporasi

4.2.2.1. Perkreditan

Kredit korporasi di DIY pada triwulan IV 2024 tetap tumbuh meski termoderasi dibandingkan periode sebelumnya. Kredit korporasi DIY pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar Rp20,22 triliun atau 39,25% (yoy), meningkat dibandingkan dengan kinerja triwulan III 2024 yang sebesar Rp19,02 triliun atau 38,76% (yoy) [Grafik 4.17]. Berdasarkan jenisnya, membaiknya kinerja kredit korporasi ditopang oleh meningkatnya pertumbuhan komponen Kredit Investasi dan Konsumsi yang secara berturut-turut tumbuh menjadi 62,99% (yoy) dan 40,27% (yoy) pada triwulan IV 2024, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2024 yang sebesar 62,85% (yoy) dan 10,13% (yoy). Kredit Modal Kerja tetap tumbuh sebesar 9,43% (yoy) pada triwulan IV 2024, termoderasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,87% (yoy) [Grafik 4.18].

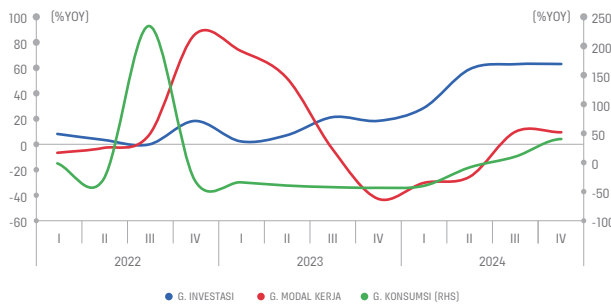
Pertumbuhan pembiayaan nasabah korporasi menguat sejalan dengan pertumbuhan sebagian besar LU utama perekonomian DIY. LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menguat dari -8,08% (yoy) pada triwulan III 2024 menjadi 19,15% (yoy) pada triwulan IV 2024. LU Perdagangan, Konstruksi, serta industri pengolahan secara berturut-turut tetap tumbuh positif 18,14% (yoy), 109,67% (yoy), dan 8,42% (yoy) pada triwulan IV 2024, meski lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 24,82% (yoy), 124,82% (yoy), dan 8,42% (yoy) [Grafik 4.19].

Grafik 4.17. Perkembangan Kredit Korporasi DIY



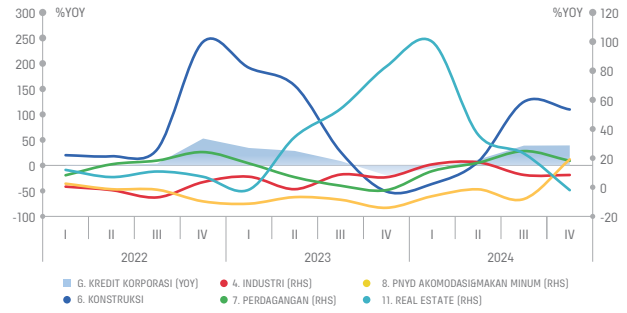
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.18. Perkembangan Kredit Korporasi berdasarkan Komponen



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.19. Perkembangan Kredit Korporasi berdasarkan Sektor Ekonomi



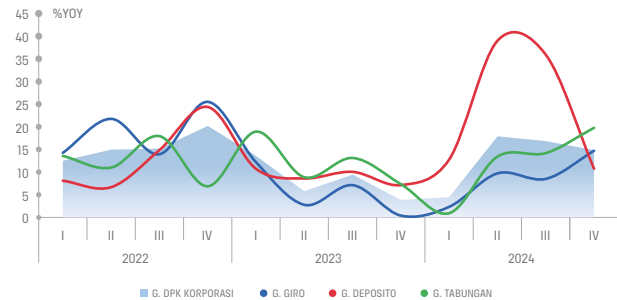
Sumber: LBU, diolah

Secara umum, perbaikan kinerja di sebagian besar komponen LU sejalan dengan usainya periode Pemilu sehingga pelaku usaha sudah relatif lebih optimis. Selain itu berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan proyek strategis lainnya di DIY, seperti Jembatan Pandansimo, jalan tol Solo-Yogyakarta-YIA dan Yogyakarta-Bawen, serta pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JLS) mendorong tumbuhnya kinerja LU Konstruksi.

4.2.2.2. Dana Pihak Ketiga Korporasi

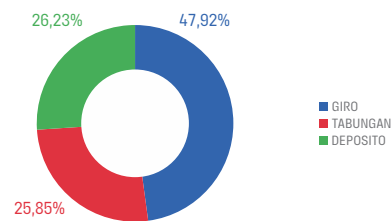
Penghimpunan DPK Korporasi pada triwulan VI 2024 termoderasi dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya. Pertumbuhan DPK nasabah golongan Korporasi di perbankan DIY tercatat sebesar 14,89% (yoy), melambat dibandingkan triwulan III 2024 sebesar 16,82% (yoy). Termoderasinya kinerja DPK korporasi didorong

Grafik 4.20 Perkembangan DPK Sektor Korporasi



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.21 Komposisi DPK Korporasi



Sumber: LBU, diolah

oleh melambatnya pertumbuhan komponen deposito yang tumbuh sebesar 10,75% (yoy) pada triwulan IV 2024, lebih rendah dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang sebesar 35,92% (yoy). Meski demikian komponen tabungan dan giro tumbuh masing-masing sebesar 19,77% (yoy) dan 14,71% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2024 sebesar 14,20% (yoy) dan 8,50% (yoy) (Grafik 4.20).

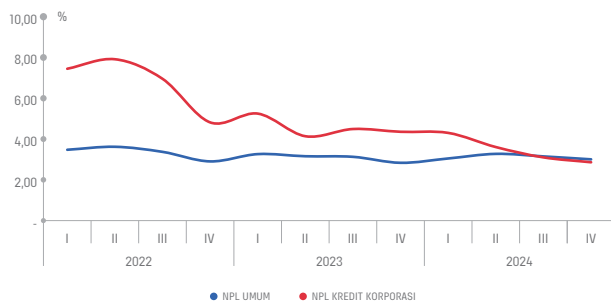
Berdasarkan komposisinya, dana korporasi pada perbankan di DIY mayoritas berada dalam bentuk Giro dengan persentase 47,92%; diikuti oleh Deposito dan Tabungan yang masing-masing sebesar 26,23% dan 25,85% (Grafik 4.21).

4.2.2.3. Likuiditas dan Risiko Kredit Korporasi

Kualitas pembiayaan nasabah korporasi membaik pada triwulan IV 2024. Rasio NPL korporasi tercatat sebesar 2,86%, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2024 yang tercatat sebesar 3,10%, seiring menurunnya risiko kredit di seluruh komponen (Grafik 4.22).

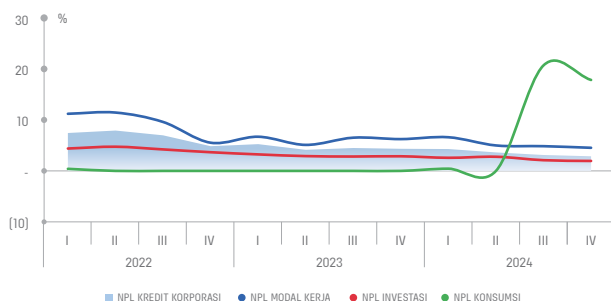
NPL kredit investasi pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 1,95%, turun dari triwulan sebelumnya sebesar 2,10%. Penurunan risiko kredit juga tercermin dari penurunan NPL kredit modal kerja dan konsumsi pada triwulan IV 2024 yang tercatat masing-masing sebesar 4,53% dan 17,84%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yakni 4,85% dan 20,70%. Secara umum, tingkat risiko pada kredit korporasi masih terkendali. Perbankan masih memiliki likuiditas yang aman untuk menopang pertumbuhan kredit korporasi tahun 2024 (Grafik 4.23).

Grafik 4.22 Perkembangan NPL Korporasi



Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.23 Komponen NPL Korporasi



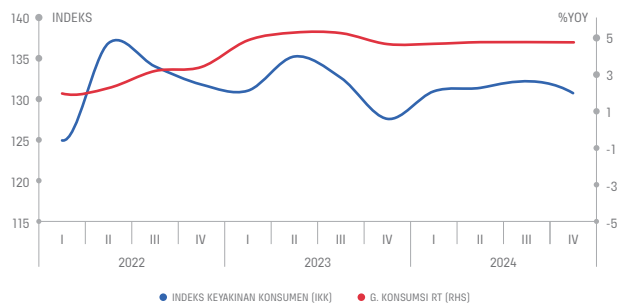
Sumber: LBU, diolah

4.3. Kinerja Sektor Rumah Tangga

4.3.1. Ketahanan Rumah Tangga

Kinerja rumah tangga pada triwulan IV 2024 tercatat termoderasi. Kondisi tersebut dicerminkan dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) triwulan IV 2024 yang menurun dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 4.24).

Grafik 4.24 Perkembangan IKK dan Konsumsi RT DIY



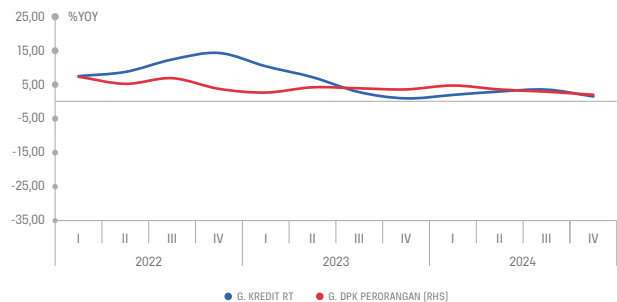
Sumber: LBU, diolah

4.3.2. Exposure Perbankan pada Sektor Rumah Tangga

4.3.2.1. Perkreditan

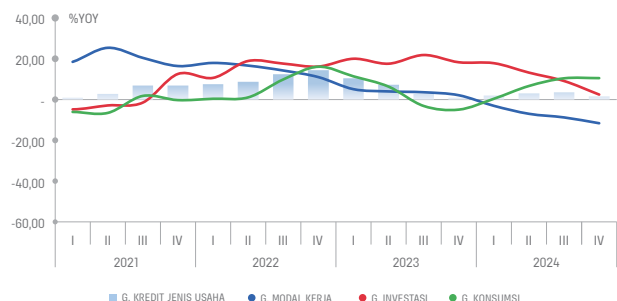
Penyaluran kredit rumah tangga pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar Rp40,14 Triliun atau tumbuh 1,52% (yoy). Kinerja kredit rumah tangga pada triwulan IV 2024 termoderasi dibandingkan triwulan III 2024 yang tumbuh sebesar 3,55% (yoy) (Grafik 4.26).

Grafik 4.25 Perkembangan Kredit RT DIY



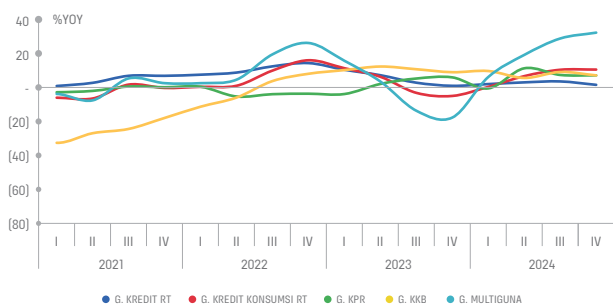
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.26 Perkembangan Jenis Penggunaan Kredit RT



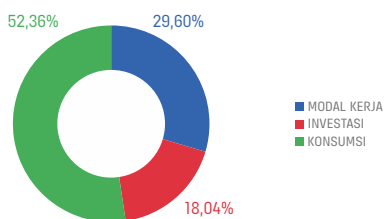
Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.27 Perkembangan Komponen Kredit RT



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.28 Komposisi Kredit RT



Sumber: LBU, diolah

Menguatnya pertumbuhan kredit rumah tangga tersebut didorong oleh pertumbuhan kredit konsumsi sebesar 10,49% (yoy) pada triwulan IV 2024, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2024 sebesar 10,40% (yoy). Selain itu, kredit investasi tumbuh terbatas sebesar 2,42% (yoy) pada triwulan IV 2024 dari sebelumnya 9,08% (yoy) pada triwulan III 2024 (Grafik 4.27).

Berdasarkan komponen pembentuknya, pertumbuhan kredit rumah tangga triwulan IV 2024 didukung oleh pertumbuhan kredit konsumsi Rumah Tangga sebesar 10,51% (yoy) pada triwulan IV 2024, lebih tinggi dari triwulan III 2024 sebesar 10,41% (yoy). Penguatan kredit konsumsi tersebut sejalan dengan ekspektasi penghasilan yang meningkat. Berdasarkan jenisnya, pertumbuhan kredit Rumah Tangga triwulan IV 2024 didukung oleh pertumbuhan kredit konsumsi Rumah Tangga, KPR, dan Kredit Multiguna. Meningkatnya KPR disebabkan oleh diberlakukannya kembali insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Ditanggung Pemerintah (DTP) tahun 2024 atas penyerahan rumah tapak dan satuan Rumah Susun sebagaimana PMK No. 7 tahun 2024 (Grafik 4.28).

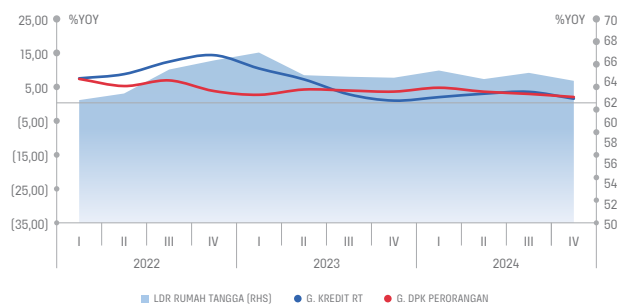
Berdasarkan komposisinya, kredit rumah tangga pada triwulan IV 2024 mayoritas merupakan kredit konsumsi dengan pangsa 52,36%; diikuti oleh modal kerja dan investasi yang masing-masing sebesar 29,60% dan 18,04% (Grafik 4.29).

4.3.2.2. Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga

Dana Pihak Ketiga nasabah golongan rumah tangga tetap tumbuh positif meski termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya. DPK nasabah rumah tangga triwulan IV 2024 tercatat sebesar Rp62,78 triliun, tumbuh 2,02% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 2,93% (yoy) (Grafik 4.30).

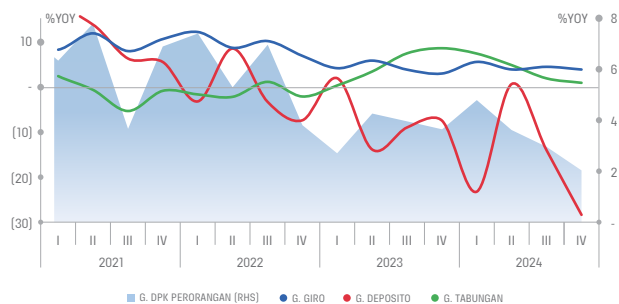
Menurunnya kinerja penghimpunan DPK rumah tangga utamanya sejalan dengan menurunnya kinerja penghimpunan DPK untuk seluruh komponen. Pertumbuhan giro pada triwulan IV 2024 sebesar -28,39% (yoy), menurun dibandingkan pertumbuhan pada triwulan III 2024 sebesar -14,28% (yoy). Selain itu, pertumbuhan tabungan dan deposito termoderasi dari masing-masing 4,00% (yoy) dan 1,47% (yoy) pada triwulan III 2024 menjadi 3,41% (yoy) dan 0,50% pada triwulan IV 2024 (Grafik 4.31).

Grafik 4.29 Perkembangan DPK dan Kredit Sektor RT



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.30 Perkembangan DPK RT per Jenis Simpanan



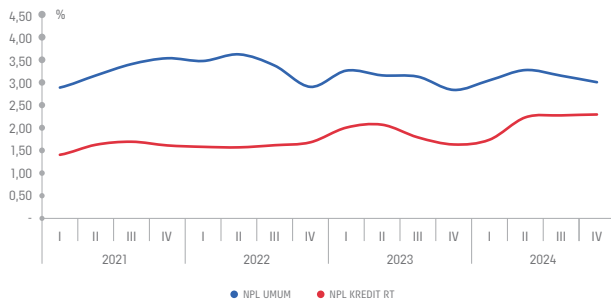
Sumber: Bank Indonesia

4.3.2.3. Likuiditas dan Risiko Kredit

Risiko kredit sektor rumah tangga mengalami kenaikan pada triwulan IV 2024, namun tetap terjaga di bawah threshold 5%. Rasio NPL kredit rumah tangga tercatat sebesar 2,29%, meningkat dari triwulan III 2024 yang sebesar 2,27% (Grafik 4.32).

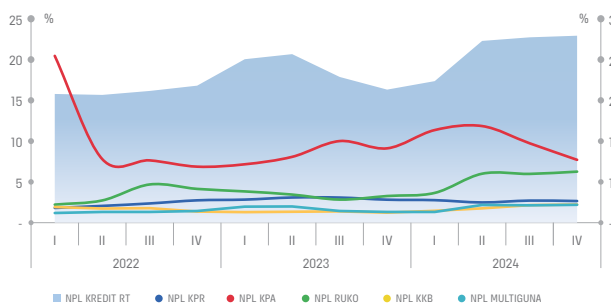
Ditinjau berdasarkan jenisnya, peningkatan risiko kredit terutama terjadi pada NPL Kredit Ruko, Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan Kredit Multiguna (Grafik 4.33).

Grafik 4.31 Perkembangan NPL Rumah Tangga



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.32 Perkembangan NPL per Komponen



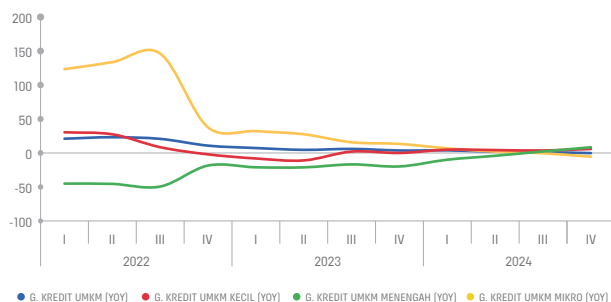
Sumber: Bank Indonesia

4.4. Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

4.4.1. Akses Keuangan kepada UMKM

Berbagai kegiatan dalam rangka mengembangkan kapasitas UMKM untuk mendorong akses terhadap layanan keuangan dan pembiayaan telah dilakukan sebagai salah satu upaya pelaksanaan mandat Bank Indonesia khususnya dalam mendorong fungsi intermediasi perbankan, terutama pada pelaku UMKM karena peran strategisnya dalam perekonomian nasional maupun DIY. Sebagai bentuk dukungan, Bank Indonesia mengeluarkan instrumen pengembangan UMKM yaitu Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) untuk meningkatkan inklusi ekonomi, akses keuangan bagi UMKM, serta memperkuat peran UMKM dalam pemulihan ekonomi

Grafik 4.33 Perkembangan Kredit UMKM DIY



Sumber: Bank Indonesia

nasional dengan skema bertahap, yaitu 20% di tahun 2022, 25% di tahun 2023, hingga 30% pada tahun 2024. Kebijakan ini memberikan opsi yang lebih luas bagi Perbankan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan UMKM, Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR), dan pembiayaan yang bersifat inklusif lainnya.

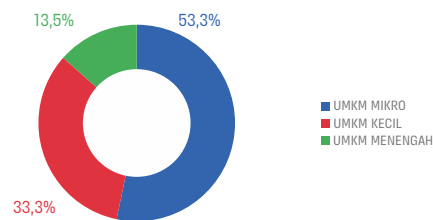
Selain kebijakan RPIM tersebut, Bank Indonesia juga melaksanakan program pengembangan UMKM melalui pemberian bantuan teknis dalam bentuk pelatihan, pendampingan, penyediaan informasi, dan fasilitasi yang bertujuan mendorong peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, peningkatan akses pembiayaan, perluasan akses pemasaran, dan peningkatan nilai tambah atau hilirisasi. Selain itu, Pemerintah juga menetapkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3% sebagai bentuk afirmatif pemerintah ke segmen UMKM.

Penyaluran kredit kepada UMKM pada triwulan IV 2024 tercatat memiliki valuasi Rp23,02 Triliun atau terkontraksi -0,18% (yoy), turun dari triwulan III 2024 yaitu 1,22% (yoy) atau setara dengan Rp23,05 Triliun. Diperkirakan aspek kemudahan akses dan pengetahuan terkait literasi keuangan menjadi tantangan penyaluran kredit UMKM DIY yang menurun (Grafik 4.34).

Adapun pangsa terbesar kredit UMKM yaitu berasal dari komponen kredit UMKM Mikro dengan persentase 53,29% sejalan dengan adanya dukungan kebijakan penguatan UMKM berupa kebijakan RPIM. Selanjutnya, diikuti dengan kredit UMKM Kecil dengan pangsa 33,26%, serta kredit UMKM menengah dengan pangsa 13,45% (Grafik 4.35).

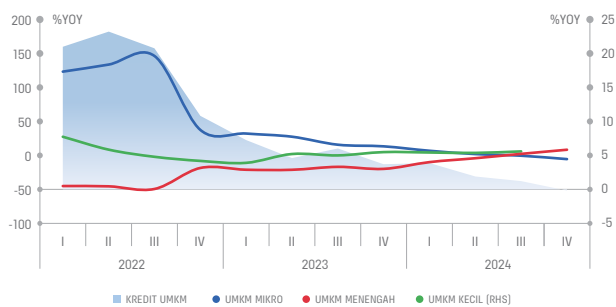
Ditinjau dari skala usahanya, pada triwulan IV 2024 segmen UMKM kecil dan menengah tumbuh positif dibandingkan periode sebelumnya. Kredit usaha kecil dan menengah masing-masing tercatat tumbuh sebesar 5,92% (yoy) dan 8,36% (yoy), tumbuh akseleratif dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 3,70% (yoy) dan 2,27% (yoy). Adapun pada kredit usaha mikro mengalami kinerja yang menurun yaitu dari -0,44% (yoy) pada triwulan III 2024 menjadi -5,45% (yoy) pada triwulan IV 2024 (Grafik 4.36).

Grafik 4.34 Pangsa Kredit UMKM DIY



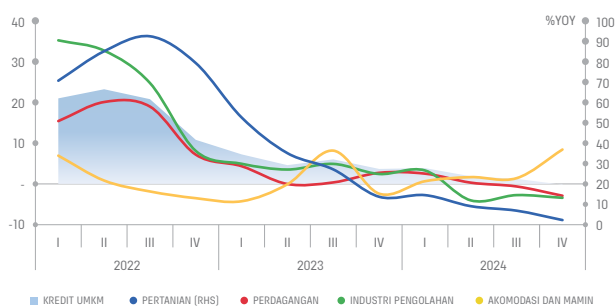
Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.35 Perkembangan Kredit UMKM DIY Berdasarkan Skala Usaha



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.36 Perkembangan Kredit UMKM DIY Berdasarkan Sektor

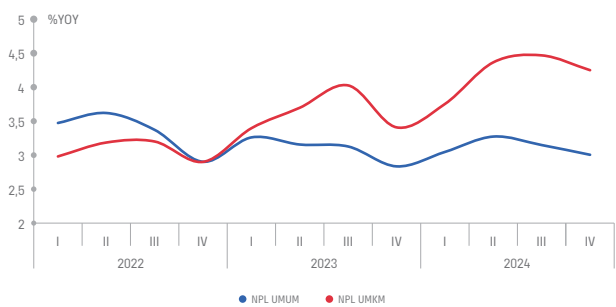


Sumber: Bank Indonesia

Secara sektoral, penyaluran kredit UMKM berdasarkan sektor LU utama pendorong perekonomian DIY termoderasi pada pada triwulan IV 2024. Pertumbuhan penyaluran kredit UMKM ditopang oleh penyaluran kredit ke LU Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh 8,43% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 1,41% (yoy). Adapun penyaluran kredit UMKM ke LU utama lainnya di DIY menunjukkan tren penurunan pada triwulan IV 2024 (Grafik 4.37).

Dari sisi risiko kredit, NPL kredit UMKM mengalami peningkatan dibandingkan periode triwulan sebelumnya. NPL kredit UMKM pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 4,25%, membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 4,47%.

Grafik 4.37 Perkembangan NPL UMKM DIY



Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan jenisnya, membaiknya risiko kredit UMKM didorong oleh penurunan NPL pada komponen UMKM Mikro dan Menengah (Grafik 4.38).

4.4.2. Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Pengembangan UMKM dilakukan untuk menunjang kebijakan utama dalam mencapai dan memelihara kestabilan rupiah, sesuai dengan tujuan Bank Indonesia. Namun demikian, untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi unggulan di daerah, Bank Indonesia juga melakukan berbagai kegiatan lain yang sejalan dengan tugas Bank Indonesia. Aktivitas nyata yang hingga saat ini dilakukan oleh Bank Indonesia diantaranya pengembangan UMKM berbasis kluster, pemberdayaan ekonomi pesantren, pengembangan Local Economic Development, peningkatan akses pemasaran dan peningkatan akses keuangan.

Lebih lanjut, untuk menjawab keluhan lembaga keuangan akan minimnya pencatatan transaksi keuangan oleh UMKM, Bank Indonesia telah mengembangkan aplikasi pencatatan transaksi keuangan sederhana berbasis android yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM dengan nama Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK). Agar aplikasi tersebut dapat dipahami dengan baik dan cepat oleh para pelaku UMKM, Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY telah beberapa kali menyelenggarakan *Training of Trainers* (ToT) berbasis komunitas/asosiasi pengusaha lokal di DIY, dan hingga saat ini para *trainers* telah melatih ratusan pelaku UMKM. Untuk menyamakan persepsi antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan, penyelenggaraan ToT aplikasi ini dilakukan dengan melibatkan kalangan perbankan, dalam hal ini *Account Officer*. Selain itu, untuk lebih meningkatkan keuangan inklusif di sektor UMKM, juga telah diselenggarakan sosialisasi terkait transaksi non tunai seperti penggunaan QRIS (QR Code Indonesian Standard). Dengan adanya sosialisasi ini, pelaku UMKM yang masih menggunakan uang tunai dalam bertransaksi dapat beralih menggunakan transaksi non tunai sehingga setiap transaksi tercatat secara elektronik dan UMKM memiliki akses ke lembaga perbankan.

Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan Bank Indonesia DIY dalam pengembangan UMKM lokal antara lain:

- a. Grebeg UMKM DIY merupakan *Strategic Flagship Event* yang diinisiasi oleh Bank Indonesia DIY sejak tahun 2017, sebagai salah satu wujud peningkatan kualitas dan pengembangan UMKM di DIY dalam bidang makanan (*food*), pakaian (*fashion*), dan kerajinan (*craft*). Sebagai *Strategic Flagship Event*, Grebeg UMKM DIY merupakan wujud kontribusi dalam mengintegrasikan bauran kebijakan di daerah yang berbasis *stability, growth, & inclusion*. Kegiatan dalam Grebeg UMKM DIY meliputi pameran UMKM dan fasilitasi UMKM *Go Export*. Adapun kegiatan pendampingan UMKM dalam rangka Grebeg UMKM DIY tersebut meliputi kurasi UMKM, *capacity building* dengan berbagai topik, fasilitasi

pembuatan *e-catalog* dan *profile video* UMKM, serta *business matching* UMKM DIY dengan calon importir. Dengan berkolaborasi bersama Pemda DIY, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) DIY, Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) DIY, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) DIY, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) DIY, *Indonesia Fashion Chamber* (IFC) Chapter Jogja, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LazisMu) DIY, Sekar Jagad, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Generasi Baru Indonesia (GenBI) DIY, diharapkan dapat menjadi *brand positioning* yang positif di mata mitra kerja. Pada tahun 2024, Grebeg UMKM DIY disinergikan dengan Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GGBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (GBWI), serta *road to Festival Ekonomi Syariah* (FESyar), dan *Indonesia Sharia Economic Festival* (ISEF). Adapun kegiatan pada Grebeg UMKM DIY 2024, meliputi:

- **Pameran UMKM** kategori *food, fashion, & craft* binaan Bank Indonesia dan dinas terkait secara *offline* dan *online* melalui *platform* www.grebegumkmdiy.com;
 - **Fashion show** bertajuk Jogja *Fashion Trend* (JFT). JFT mempromosikan busana etnik Indonesia dengan keberagaman budayanya melalui kemasan modern dan kontemporer menuju pasar global;
 - **Talkshow UMKM**, Ekonomi Syariah, Perlindungan Konsumen, QRIS, dan CBP Rupiah;
 - **Lomba Road-to-Fesyar**, seperti Lomba Da'i, Marawis, Lomba Laz, dan Wirausaha;
 - Pelaksanaan **business matching** UMKM dengan calon *buyer*, baik dari dalam maupun luar negeri.
- b. Pengembangan UMKM pendukung Pariwisata (UMKM Pariwisata) Nglanggeran, yang menerapkan pengelolaan desa wisata dan industri pendukungnya dengan prinsip pemberdayaan komunitas yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata. Pengembangan yang telah dilakukan meliputi aspek kelembagaan, peningkatan kapasitas, akses pemasaran, serta pembiayaan.
- c. Pengembangan Klaster Komoditas Bawang Merah di Nawungan, Bantul yang bertujuan untuk mewujudkan sentra bawang merah yang ramah lingkungan dan memiliki kemandirian benih. Hal ini dilakukan dengan program yang mendorong peningkatan pemahaman dan keterampilan petani dalam melakukan pembenihan bawang merah secara mandiri serta intervensi digitalisasi dalam mendukung pertanian bawang merah baik dari aspek budidaya sampai dengan pemasaran.
- d. Pengembangan Klaster Komoditas Cabai di Sleman, meliputi pendampingan peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan, akses pemasaran dan hilirisasi. Program difokuskan pada perluasan demplot cabai dari 10 Ha menjadi total 20 Ha dengan penerapan teknologi pertanian berupa irigasi tetes dan *digital farming*. Terdapat

tantangan dalam hal area pemasaran pasar lelang belum optimal dan kurang efisiennya operasional lelang yang dilakukan secara manual, sehingga dari aspek pemasaran, KPw BI DIY pembangunan pasar lelang cabai secara digital melalui aplikasi *dipanen.id* berbasis *android* dan *web*. Fitur yang dapat diakses antara lain alur transaksi lelang, informasi *supply* cabai, dan informasi harga. Penggunaan aplikasi *dipanen.id* sudah dilaksanakan dan telah memberikan kemudahan transaksi serta kegiatan lelang semakin efektif.

- e. Replikasi model bisnis melalui penggunaan aplikasi *dipanen.id* di Kulonprogo sebagai salah satu tools lelang digital, setelah menuai kesuksesan pada tahap *pilot project* untuk lelang komoditas cabai di Sleman. Dengan replikasi model bisnis ini, diharapkan mampu membantu petani untuk mendapatkan harga terbaik serta meningkatkan aktivitas pemasaran cabai. Selain itu, replikasi model bisnis juga dilakukan di Gunungkidul berupa implementasi pasar lelang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemasaran.
- Pemanfaatan BISAID, yaitu platform yang dapat menyediakan informasi profil UMKM yang tidak sedang mendapatkan pembiayaan perbankan, namun membutuhkan kredit/pembiayaan dalam rangka pengembangan usahanya. Dengan adanya BISAID, intermediasi perbankan kepada sektor riil dan UMKM dapat terakselerasi, serta memberikan manfaat bagi UMKM dalam rangka mempercepat akses pembiayaan. Pemanfaatan BISAID ke depan akan dikembangkan dengan melibatkan sebanyak 50 UMKM Binaan di wilayah DIY.
- f. Memfasilitasi *business matching* pembiayaan untuk 30 UMKM binaan di DIY dengan total pembiayaan pada awal tahun s.d. triwulan III 2024 mencapai Rp21,6 Miliar yang bekerjasama dengan 6 perbankan di DIY, seperti PT. BPD DIY, BRI, BNI, Mandiri, BSI, dan BTN.

Boks 3 :

Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI)



Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024

Bank Indonesia pada 29 November 2024 menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) yang mengusung tema "Sinergi Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional". Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) merupakan puncak *High Level Event* (HLE) Bank Indonesia yang telah diselenggarakan rutin sejak tahun 1969. Agenda utama PTBI adalah penyampaian asesmen Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian nasional, tantangan yang dihadapi, dan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan.

Asesmen dan arah kebijakan tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan, khususnya pelaku industri, investor, dan kalangan dunia usaha dalam menentukan berbagai kebijakan maupun keputusan bisnis ke depan. Dari sisi masyarakat, acuan strategis ini juga diharapkan dapat semakin membangun keyakinan masyarakat bahwa Bank Indonesia bersama Pemerintah dan Lembaga terkait senantiasa bersama-sama menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.

Pemilihan tema PTBI 2024 didasarkan pertimbangan bahwa stabilitas makroekonomi yang saat ini terjaga dengan baik perlu terus dipertahankan di tengah berlanjutnya tantangan domestik dan global. Stabilitas makroekonomi yang terus terjaga merupakan salah satu prasyarat penting untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan dan inklusif, serta sebagai pijakan untuk keberlanjutan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas.

PTBI 2024 dilaksanakan secara serentak di Kantor Pusat Bank Indonesia, 46 Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN), dan 5 Kantor Perwakilan Luar Negeri (KPwLN). Pelaksanaan PTBI 2024 oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) DIY diselenggarakan di *Ballroom* Kasultanan, Hotel Royal Ambarrukmo. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, Pimpinan Daerah, Jajaran Forkopimda, Pimpinan OPD dan Instansi Vertikal, Pimpinan Perbankan, Asosiasi, Akademisi, Pelaku Usaha, dan Media Massa dengan total undangan mencapai 169 orang.

Kegiatan PTBI diawali dengan relay pelaksanaan di Grha Bhasvara Icchana Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan outlook dan tantangan yang dihadapi perekonomian Indonesia, dan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan. Acara dilanjutkan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya sinergi dan stabilitas sebagai kunci transformasi ekonomi nasional dan formula keberhasilan suatu bangsa. Selain itu, Presiden RI juga mengapresiasi peran vital Bank Indonesia, bersama dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam menjaga kedaulatan dan kemerdekaan bangsa melalui stabilitas ekonomi dan sistem keuangan.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi PTBI di DIY yang diawali pemutaran video kaleidoskop KPwBI DIY tahun 2024. Acara dilanjutkan dengan penyampaian *outlook* perekonomian DIY oleh Deputi Kepala Perwakilan BI DIY, Bp. Hermanto.

Pada kesempatan tersebut, disampaikan sejumlah tantangan dan *lesson learned* dalam upaya pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di DIY. Pada tahun 2025, perekonomian DIY diperkirakan tetap bertumbuh positif diiringi tingkat inflasi yang terjaga dalam kisaran target sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1%. Selanjutnya Wakil Gubernur DIY, KGPPAA X turut menyampaikan apresiasi dan harapan berlanjutnya sinergi seluruh mitra kerja di DIY dalam rangka menjaga tingkat inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada PTBI 2024 turut dilaksanakan penandatanganan KAD intra provinsi antara Pemkab Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo. Selain itu, terdapat penyampaian 7 (tujuh) penerima BI Awards 2024 sebagai berikut: Penggiat Ekonomi Pesantren/*Boarding School* (H. Aly Aulia, Lc., M. Hum), *Merchant* QRIS Usaha Mikro dan Kecil Terbaik Wilayah Jawa (Ida Store), Pemerintah Provinsi dengan Implementasi QRIS Terbaik Wilayah Jawa (Pemerintah Daerah DIY), Duta SIAPIK UMKM Terbaik (CV. Cariza Food), Dukungan Wakaf Kota/Kab Terbaik (Kepala Kemenag Gunungkidul), Dukungan Kantin Syariah Terbaik (UIN Sunan Kalijaga), dan Masjid Stabilitas Harga Terbaik (Masjid Nurul Ashri Deresan).



Pelaksanaan PTBI 2024



FRANS KAISIEPO

NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA

EMISI 2016

1000

TJUT MEUTIA

NEGARA KESATUAN
INDONESIA

Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA

NEGARA
INDONESIA

DESNI THAMRIN

50000
LIMA PULUH RIBU RUPIAH

05

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Kelancaran sistem pembayaran tunai dan non tunai di DIY tetap terjaga didukung oleh kinerja pengelolaan uang rupiah dan akseptasi penggunaan kanal pembayaran nontunai di masyarakat yang tetap kuat.



Pertumbuhan transaksi nontunai melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada triwulan IV 2024 mengalami kontraksi. Nominal transaksi RTGS di DIY pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar Rp15,50 triliun atau terkontraksi 2,23% (yoy) dibandingkan dengan transaksi pada triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut transaksi melalui SKNBI pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar Rp3,77 triliun atau menurun sebesar 7,54% (yoy) jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan transaksi SKNBI tersebut salah satunya terjadi seiring dengan perluasan penggunaan transfer ritel melalui BI-FAST yang menawarkan transaksi *real time* 24 jam dengan biaya lebih murah.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi DIY, jumlah transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) pada triwulan IV 2024 juga mengalami peningkatan. Nominal transaksi pembayaran nontunai berbasis kartu di DIY mencapai Rp20,80 triliun tumbuh sebesar 0,03% (yoy) dari triwulan IV tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp20,79 triliun. Transaksi Uang Elektronik di DIY juga melanjutkan tren pertumbuhan positif didorong oleh sinergi aktif antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah dan industri untuk mengedukasi masyarakat melalui pendekatan komunitas dan kegiatan strategis yang bersifat masif telah mampu mendorong perluasan penggunaan Uang Elektronik di DIY. Nilai transaksi uang elektronik terus bertumbuh mencapai Rp2,95 triliun atau tumbuh 18,18% (yoy). Nominal transaksi menggunakan QRIS mencapai Rp9,36 triliun, tumbuh 300,13% (yoy) dibandingkan triwulan IV tahun 2023. Volume transaksi juga mencatatkan peningkatan hingga mencapai 103,17 juta transaksi hingga bulan Desember 2024. Sejalan dengan tumbuhnya transaksi di triwulan IV tahun 2024, DIY juga mencatatkan peningkatan jumlah *merchant* sebesar 42,33 ribu atau tumbuh sebesar 21,10% (yoy) dengan total *merchant* sebesar 857 ribu dan diikuti peningkatan pengguna QRIS sebesar 29,13 ribu orang atau tumbuh 16,13% (yoy) dengan total jumlah pengguna saat ini sebesar 941 ribu orang.

Sementara itu, kinerja Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) pada triwulan IV 2024 juga berjalan dengan baik. Pada triwulan IV 2024, jumlah arus uang tunai yang keluar dan masuk Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY masing-masing tercatat Rp3,11 triliun dan Rp2,21 triliun dengan net outflow sebesar Rp0,89 triliun. *Net outflow* terjadi seiring dengan peningkatan permintaan uang kartal oleh perbankan dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pada periode Natal dan Tahun Baru. Secara umum, saat ini kebutuhan uang kartal menurun seiring dengan perluasan penggunaan transaksi non tunai oleh masyarakat.

Jumlah transaksi penukaran valuta asing (valas) DIY melalui KUPVA Bukan Bank pada triwulan II 2024 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara. Total transaksi jual dan beli valas di DIY hanya mencapai Rp687,60 miliar atau tumbuh 23,78% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai

Rp687,13 miliar. Porsi transaksi penjualan dan pembelian mata uang Dolar US (USD) masih memiliki porsi mata uang terbesar yang diperdagangkan sebesar 52,68% diikuti oleh mata uang Dolar Singapura (SGD) 16,21%, Euro (EUR) 10,54%, Yen Jepang (JPY) 4,02%, dan Riyal Saudi (SAR) 3,94%.

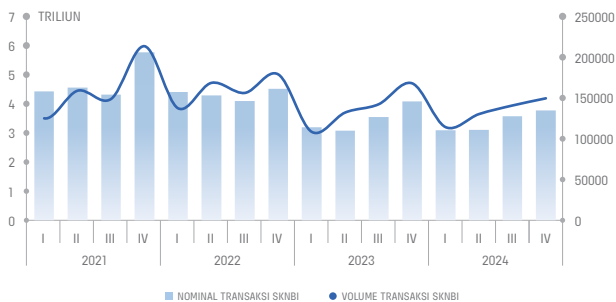
5.1 Perkembangan Transaksi Non Tunai

5.1.1 Transaksi Yang Dioperasikan Oleh Bank Indonesia (SKNBI dan RTGS)

Transaksi sistem pembayaran nontunai melalui SKNBI di DIY terkontraksi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Nominal transaksi melalui SKNBI pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar Rp3,77 triliun atau menurun sebesar 7,54% (yoy) jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian nilai transaksi SKNBI pada triwulan IV 2024 mencatatkan peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan III 2024 yang mencapai Rp3,57 triliun.

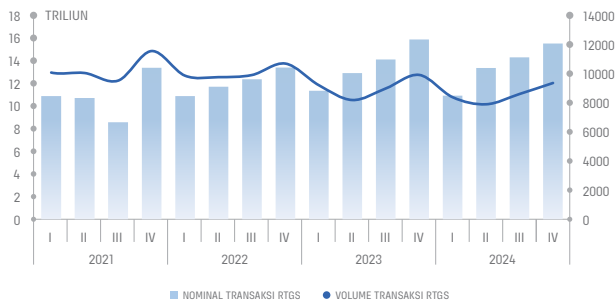
Sejalan dengan nominal transaksi SKNBI yang terkontraksi, pertumbuhan volume transaksi juga turut terkontraksi 10,97% (yoy) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 167.975 kali transaksi pada triwulan IV 2023 menjadi 149.552 kali transaksi pada triwulan IV 2024 (Grafik 5.1). Berlanjutnya tren penurunan volume transaksi SKNBI didorong oleh pergeseran preferensi masyarakat untuk menggunakan layanan transfer melalui BI-FAST yang menawarkan transaksi *real time* dengan biaya lebih murah dibandingkan transaksi transfer dana melalui SKNBI, yakni Rp2.500 pada level nasabah.

Grafik 5.1. Perkembangan Transaksi SKNBI



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.2. Perkembangan Transaksi RTGS



Sumber : Bank Indonesia

Sejalan dengan transaksi SKNBI, transaksi sistem pembayaran nontunai melalui *Real Time Gross Settlement (RTGS)* Bank Indonesia turut berkontraksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nominal transaksi RTGS di DIY pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar Rp15,50 triliun berkontraksi sebesar 2,23% (yoy) namun tumbuh secara nominal dari triwulan III 2024 yang mencapai Rp14,29 triliun (Grafik 5.2). Sejalan dengan penurunan volume transaksi SKNBI, volume transaksi RTGS pada triwulan IV 2024 juga mengalami kontraksi sebesar 5,60% (yoy) atau sebesar 9.356 kali transaksi dibandingkan dengan triwulan IV 2023 yang mencapai 9.911 kali transaksi.

5.1.2 Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Dan Uang Elektronik

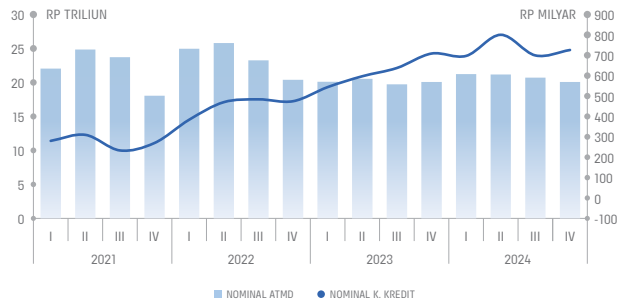
5.1.2.1 Transaksi APMK (Kartu Debet dan Kartu Kredit)

Pada triwulan IV 2024, secara tahunan nominal transaksi dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) kartu debit dan kartu kredit tumbuh positif. Nominal transaksi pembayaran nontunai berbasis kartu di DIY mencapai Rp20,80 triliun meningkat 0,03% (yoy) dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp20,79 triliun.

Pertumbuhan nominal transaksi sejalan dengan kinerja transaksi kartu kredit yang meningkat dari sisi nominal maupun volume transaksi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Transaksi kartu kredit pada triwulan IV 2024 senilai Rp743,22 miliar atau tumbuh 2,15% (yoy). Sementara itu pertumbuhan transaksi kartu ATM/kartu debit mengalami kontraksi sebesar 0,05% (yoy) dengan nominal Rp20,05 triliun dan lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang mencapai Rp20,69 triliun (Grafik 5.3).

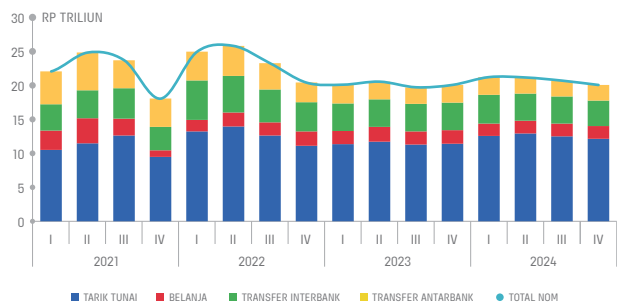
Pada Triwulan IV 2024 transaksi ATM Debet mengalami kontraksi sebesar 0,05% (yoy) sejalan dengan perluasan akseptasi dan penggunaan QRIS di wilayah DIY. Fitur QRIS yaitu Tarik Tunai, Transfer, Setor Tunai (TUNTAS) yang menawarkan biaya transaksi lebih murah yaitu Rp2.000 untuk transfer di bawah Rp100.000 dan Rp2.500 untuk nominal di atas Rp100.000. Hal ini berdampak pada kontraksi pertumbuhan transaksi transfer antarbank sebesar 13,39% (yoy) yang memiliki pangsa pasar 11,36% terhadap total transaksi (Grafik 5.4 dan Grafik 5.5) Transaksi interbank dan belanja, dengan pangsa pasar 18,83% dan 9,39%, juga mengalami kontraksi masing-masing 6,85% (yoy) dan 4,39% (yoy). Sementara itu, transaksi tarik tunai menggunakan ATM Debet masih memiliki pangsa dominan mencapai 60,43% dan tercatat mengalami kenaikan 6,19% (yoy) mencapai Rp12,12 triliun. Menurunnya transaksi belanja, transfer antarbank dan interbank menggunakan instrumen ATM Debet didukung oleh perluasan penggunaan QRIS sebagai kanal pembayaran digital yang universal yang dapat menerima pembayaran melalui penyelenggara jasa pembayaran apapun.

Grafik 5.3. Perkembangan Transaksi APMK



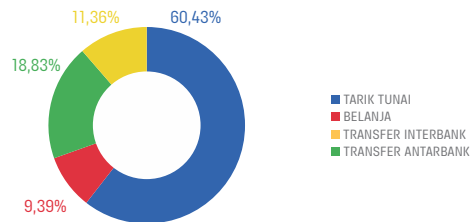
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.4. Perkembangan Transaksi Kartu ATM Debet



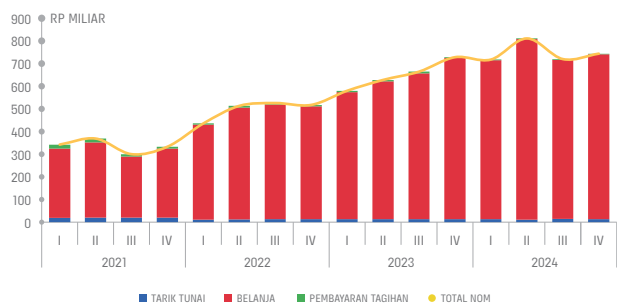
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.5. Pangsa Transaksi Kartu ATM Debet



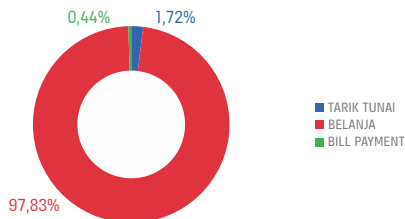
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.6. Perkembangan Transaksi Kartu Kredit



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.7. Pangsa Transaksi Kartu Kredit



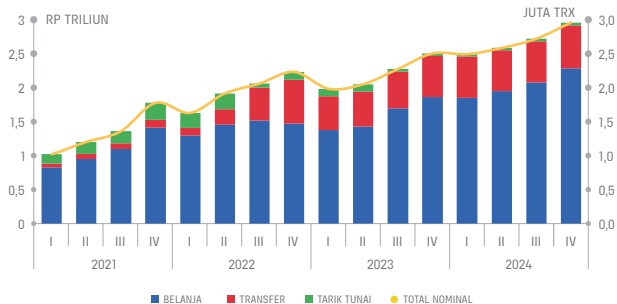
Sumber : Bank Indonesia

Di sisi lain nominal transaksi Kartu Kredit melanjutkan pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 2,15% (yoy). Pertumbuhan transaksi kartu kredit pada triwulan IV 2024 ditopang oleh pertumbuhan transaksi belanja dan *bill payment* yang memiliki pangsa 97,83% dan 0,44% terhadap total transaksi Kartu Kredit (Grafik 5.6). Nominal transaksi kartu kredit secara keseluruhan tercatat Rp743,216 miliar (Grafik 5.7).

5.1.2.2 Transaksi Uang Elektronik

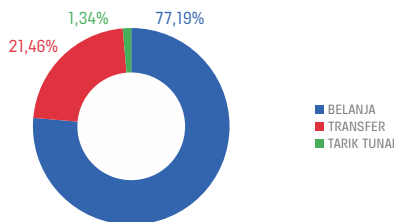
Transaksi Uang Elektronik di DIY juga melanjutkan tren pertumbuhan positif didorong oleh perluasan penggunaan Uang Elektronik di sektor transportasi seperti TransJogja, KRL, DAMRI, parkir dan jalan tol. Transaksi uang elektronik pada triwulan

Grafik 5.8. Perkembangan Nominal Transaksi Uang Elektronik



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.9. Penggunaan Transaksi Uang Elektronik



Sumber : Bank Indonesia

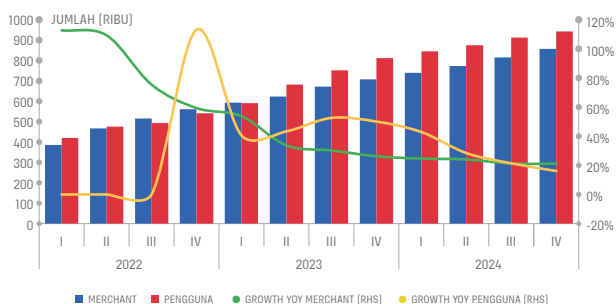
IV 2024 tercatat sebesar Rp2,95 triliun atau tumbuh 18,18% (yoy) dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp2,50 triliun (Grafik 5.8). Transaksi uang elektronik didominasi oleh transaksi belanja dengan pangsa 77,19% (Grafik 5.9) dengan nominal transaksi senilai Rp2,28 triliun. Transaksi ini mengalami peningkatan 22,52% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,86 triliun.

Transaksi transfer juga terus mendorong kenaikan total transaksi uang elektronik dengan pertumbuhan 5,31% (yoy). Transaksi transfer mencapai Rp635,13 miliar dengan pangsa pasar 21,46%, meningkat dari triwulan yang sama pada tahun 2023 yang tercatat Rp603,11 miliar. Sementara itu, transaksi tarik tunai dengan pangsa pasar 1,34% memiliki nilai total nominal Rp39,78 miliar, turut tumbuh sebesar 9,00% (yoy) dibandingkan pada triwulan IV 2023 yang mencapai nominal Rp36,50 miliar.

5.1.2.3 Transaksi QRIS

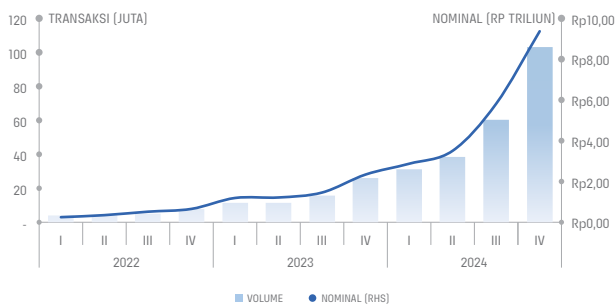
Akseptasi kanal pembayaran berbasis *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* sebagai kanal pembayaran digital di DIY terus mencatatkan perkembangan yang positif sejalan dengan perkembangan implementasi QRIS secara nasional. Pengguna QRIS secara nasional terus tumbuh hingga mencapai 55,4 juta pengguna pada triwulan IV 2024 dan ditargetkan untuk dapat mencapai 58 juta pengguna di tahun 2025.

Grafik 5.10. Perkembangan Merchant dan User QRIS



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.11. Perkembangan Transaksi QRIS



Sumber : Bank Indonesia

Penggunaan QRIS di DIY terus tumbuh positif dari sisi merchant dan pengguna. Hingga triwulan IV 2024 terdapat 857 ribu merchant QRIS dan 941 ribu pengguna QRIS di wilayah DIY (Grafik 5.10), meningkat masing-masing 21,10% (yoy) dan 16,13% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Segmentasi merchant QRIS masih didominasi oleh merchant jenis usaha mikro sebanyak 56,54%, diikuti usaha kecil sebanyak 29,24%, usaha menengah 11,23%, usaha besar 1,64%, usaha reguler 1,33%, Public Service Obligation (PSO) 0,02% dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 0,00023%. Volume transaksi QRIS pada di DIY terus melanjutkan tren pertumbuhan positif. Pada triwulan IV 2024, DIY mencatatkan sebesar 103,175 juta volume transaksi dengan total nominal transaksi sebesar Rp 9,36 triliun (Grafik 5.11), atau tumbuh masing-masing 296,52% (yoy) dan 300,13% (yoy).

5.2 Perkembangan Pengelolaan Uang Rupiah

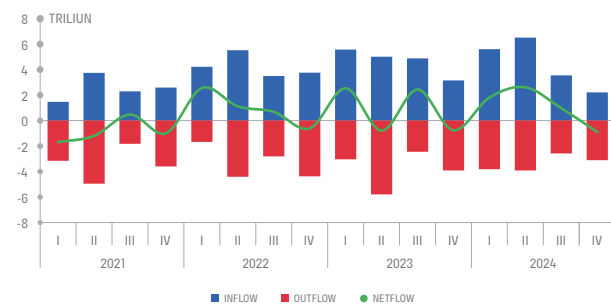
Pada triwulan IV 2024 DIY mengalami net outflow seiring dengan peningkatan permintaan uang kartal oleh perbankan dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pada periode Natal dan Tahun Baru. Jumlah arus uang tunai yang keluar dan masuk di KPwBI DIY masing-masing tercatat sebesar Rp3,11 triliun dan Rp2,21 triliun sehingga mengalami net outflow sebesar Rp0,89 triliun (Grafik 5.10). Net outflow terjadi seiring dengan pergerakan keluar uang kartal dari Bank Indonesia ke perbankan atau masyarakat. Pada triwulan IV 2024 arus inflow uang kartal sebesar Rp 2,12 triliun, terkontraksi 29,78% (yoy), turun dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp3,15 triliun. Secara umum, saat

ini kebutuhan uang kartal menurun seiring dengan perluasan penggunaan transaksi non tunai oleh masyarakat.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan uang tunai layak edar, KPwBI DIY sepanjang triwulan IV 2024 telah melakukan layanan kas keliling dan penukaran uang layak edar. KPwBI DIY telah melakukan layanan penukaran uang melalui kas keliling sebanyak 36 kali dengan total nominal uang layak yang diedarkan sebesar Rp6,07 miliar selama periode laporan. Lokasi kas keliling terdiri atas pusat-pusat keramaian seperti pasar, alun-alun kota, dan kantor pemerintahan. Selain itu, layanan penukaran uang tidak layak edar juga dilaksanakan pada KPwBI DIY untuk masyarakat setiap hari Selasa dan Kamis. Bank Indonesia juga melakukan berbagai kebijakan untuk menjaga kualitas uang layak edar dengan kebijakan clean money policy, salah satunya dengan memberikan edukasi Cinta, Bangga dan Paham (CBP) Rupiah secara berkelanjutan kepada masyarakat.

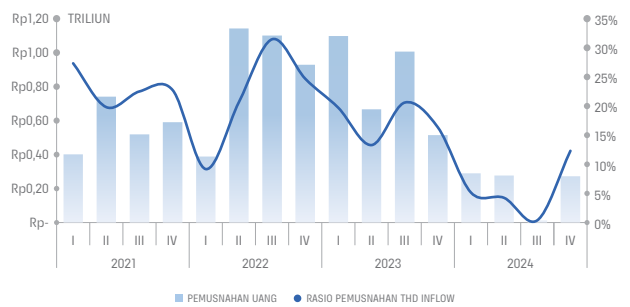
Bank Indonesia melakukan kegiatan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) secara rutin sebagai komitmen menjaga kualitas uang layak edar (ULE) di masyarakat. Pada triwulan IV 2024 KPwBI DIY melaksanakan pemusnahan UTLE senilai Rp272,32 miliar, turun -47,13% (yoy) dari triwulan yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai Rp 515,05 miliar (Grafik 5.13). Dengan pencapaian tersebut, rasio pemusnahan UTLE terhadap total inflow tercatat sebesar 12,31%. Penurunan ini sejalan dengan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan prinsip CBP Rupiah dalam bertransaksi sehingga uang dapat bertahan dalam kondisi layak edar lebih lama di masyarakat.

Grafik 5.12. Perkembangan Inflow dan Outflow Uang Kartal di DIY



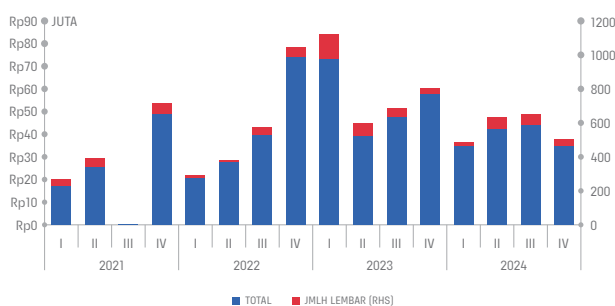
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.13. Perkembangan Pemusnahan Uang di DIY



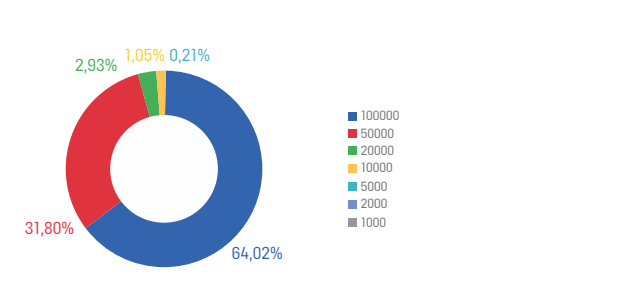
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.14. Perkembangan Temuan Uang Palsu di DIY



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.15. Temuan Uang Palsu Berdasarkan Jenis Pecahan di DIY



Sumber : Bank Indonesia

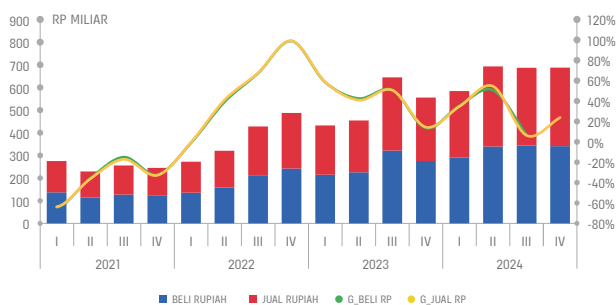
Seiring dengan peningkatan literasi CBP rupiah, jumlah temuan uang palsu pada triwulan IV 2024 menurun hingga 37,76% (yoy). Temuan uang palsu pada periode laporan tercatat sebanyak 478 bilyet (Grafik 5.14), didominasi oleh Uang Pecahan Besar (Rp100.000 dan Rp50.000) (306 lembar pecahan Rp100.000, 152 lembar pecahan Rp50.000, 14 lembar pecahan Rp20.000, 5 lembar pecahan Rp 10.000, dan 1 lembar pecahan Rp 5.000) (Grafik 5.15).

5.3 Perkembangan Transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank di DIY

Jumlah transaksi penukaran valuta asing (valas) DIY melalui KUPVA Bukan Bank pada triwulan IV 2024 tumbuh positif dibandingkan dengan triwulan sebelumnya ditahun yang sama maupun triwulan IV 2023 seiring dengan pertumbuhan sektor pariwisata. Total transaksi jual dan beli valas di DIY mencapai Rp687,60 miliar, tumbuh 23,78% (yoy). (Grafik 5.16).

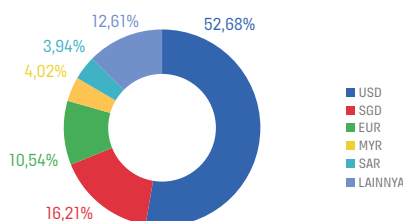
Transaksi dari Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (Bukan Bank) berizin yang bertransaksi di DIY didominasi oleh mata uang USD. Porsi transaksi penjualan dan pembelian mata uang USD mencapai 52,68%, disebabkan posisi USD sebagai mata uang yang berlaku secara internasional, sehingga mendominasi mata uang asing yang digunakan wisatawan mancanegara dalam bertransaksi, termasuk di DIY. Mata uang terbesar diperdagangkan lainnya diikuti mata uang Dolar Singapura (16,21%), Euro (10,54%), Yen Jepang (4,02%), Real Saudi Arabia (3,94%), serta Ringgit Malaysia (3,49%), (Grafik 5.17).

Grafik 5.16. Perkembangan Transaksi Valuta Asing di DIY



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.17 Pangsa Valuta Asing yang Ditukarkan di DIY



Sumber : Bank Indonesia





06

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan di DIY yang salah satunya tercermin oleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 melanjutkan tren menurun dibandingkan periode yang sama selama tiga tahun terakhir. Sejalan dengan hal tersebut, kondisi kesejahteraan masyarakat DIY menunjukkan perbaikan yang ditandai oleh penurunan persentase penduduk miskin dan peningkatan kesejahteraan petani yang dicerminkan oleh meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP).

Persentase Penduduk Miskin (%)

10,83

Maret 2024



10,40

September 2024

Penduduk Usia Kerja (Juta Orang)

2,99

Agustus 2023



3,02

Agustus 2024

Partisipasi Angkatan Kerja (%)

74,08

Agustus 2023



74,78

Agustus 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

3,69

Agustus 2023



3,48

Agustus 2024

Nilai Tukar Petani

104,31

Triwulan III 2024



104,46

Triwulan IV 2024

6.1. Gambaran Umum

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) DIY pada Agustus 2024 meningkat. Secara sektoral, TPAK penyerapan tenaga kerja di DIY masih didominasi oleh tiga Lapangan Usaha (LU) utama yang menjadi penggerak perekonomian DIY, diantaranya LU Pertanian, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, serta Industri Pengolahan.

Persentase penduduk miskin DIY pada September 2024 melanjutkan keberlanjutan penurunan meski masih lebih tinggi dibandingkan capaian nasional. Persentase penduduk miskin DIY turun dari 10,83% pada Maret 2024 menjadi 10,4% pada September 2024. Penurunan persentase penduduk miskin salah satunya dipengaruhi oleh inflasi yang terkendali. Selain itu, ketimpangan pengeluaran penduduk DIY juga mengalami penurunan, tercermin dari Indeks Gini Ratio sebesar 0,428 yang lebih rendah dari periode sebelumnya sebesar 0,435. Walaupun mengalami penurunan indeks Gini Ratio, tingkat ketimpangan DIY ini masih lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 0,381 nasional.

6.2. Ketenagakerjaan

6.2.1. Partisipasi Kerja

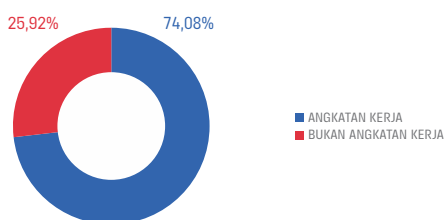
Berdasarkan kondisi ketenagakerjaan per Agustus 2024, penduduk usia kerja di DIY tercatat sebanyak 3,02 Juta orang, naik sebesar 0,84% (yoy) dibandingkan periode Agustus 2023 (Tabel 6.1). Dari jumlah penduduk usia kerja tersebut, sebesar 74,78% merupakan penduduk yang tercatat sebagai angkatan kerja, sementara sebanyak 25,22% merupakan penduduk bukan angkatan kerja.

Tabel 6.1 Status Keadaan Ketenagakerjaan di DIY

STATUS KEADAAN KETENAGAKERJAAN	AGS-22	Pertumbuhan % (yoy)	AGS-23	Pertumbuhan % (yoy)	AGS-24	Pertumbuhan % (yoy)
Penduduk Usia Kerja	3.217,87	1,33	2.998,93	-6,80	3.024,06	0,84
Angkatan Kerja	2.336,08	0,05	2.221,69	-4,90	2.261,44	1,79
Bekerja	2.241,13	0,57	2.139,71	-4,53	2.182,77	2,01
Pengangguran	94,95	-10,79	81,89	-13,75	78,67	-4,04
Bukan Angkatan Kerja	881,80	4,87	777,23	-11,86	762,62	-1,88

Sumber: BPS DIY

Grafik 6.1 Persentase penduduk usia kerja di DIY



Sumber: BPS DIY

1. TPAK Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK merupakan indikator yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/ wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Secara lebih detail, komposisi angkatan kerja di DIY pada Agustus 2024 terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 2,18 juta orang dan penduduk yang menganggur sebanyak 78,67 ribu orang. Adapun penduduk bukan termasuk angkatan kerja di DIY tercatat sebanyak 762,62 ribu orang atau 25,92% dari total penduduk usia kerja. Jumlah penduduk bukan angkatan kerja pada periode pelaporan turun 1,88% (yoy) dibandingkan Agustus 2023 (Grafik 6.1).

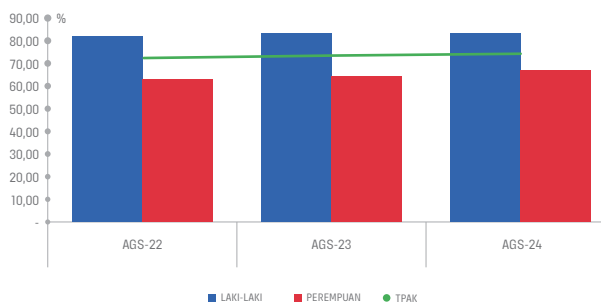
Sejalan dengan peningkatan penduduk usia kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY juga tercatat meningkat.

Pada Agustus 2024, TPAK tercatat pada level 74,78% (yoy), atau mengalami peningkatan sebesar 0,70% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 74,08%. Lebih lanjut berdasarkan jenis kelaminnya, peningkatan TPAK dipicu oleh kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dari 64,75% (yoy) pada Agustus 2023 menjadi 66,59% (yoy) pada Agustus 2024. Adapun untuk tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki mengalami penurunan menjadi 83,27% dari sebelumnya sebesar 83,76% pada Agustus 2023 (Grafik 6.2).

Berdasarkan kategori lapangan kerja (LU) utama, struktur penduduk bekerja pada Agustus 2024 masih didominasi berasal dari LU penggerak perekonomian DIY, diantaranya LU Pertanian, sebesar 19,41%; LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,72%; dan LU Industri Pengolahan sebesar 17,11%.

Kategori lapangan pekerjaan lainnya yang juga cukup banyak berperan dalam penyerapan tenaga kerja di DIY adalah LU Penyediaan Akomodasi dan Makan minum (10,43%); LU Konstruksi (6,35%);

Grafik 6.2 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di DIY



Sumber: BPS DIY

serta LU Jasa Pendidikan (6,04%). Hal ini tidak terlepas dari karakter ekonomi DIY yang ditopang oleh pariwisata dan pendidikan.

Apabila dilihat berdasarkan sebaran penduduk bekerja di tiap-tiap lapangan usaha, LU Industri Pengolahan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; serta Pengangkutan dan Pergudangan mengalami pertumbuhan positif yang secara berturut-turut sebesar 3,37% (yoy); 0,34% (yoy); dan 0,18% (yoy). Peningkatan penyerapan LU Industri Pengolahan sejalan dengan peningkatan ekspor LU Industri Pengolahan pada Agustus 2024 sebesar 16,91% (yoy) dibandingkan Agustus 2023. Sementara LU yang mengalami penurunan persentase penduduk bekerja terutama terjadi pada LU Perdagangan Besar dan Eceran (1,10%); LU Penyediaan Akomodasi Makan dan Minuman (0,65%); dan LU Pendidikan (0,65%). Penurunan penyerapan tenaga kerja pada LU Perdagangan dan LU Akomodasi Makan dan Minum pada Agustus 2024 salah satunya dipicu oleh penurunan jumlah wisatawan pasca momen liburan sekolah. Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke DIY pada Agustus 2024 sebesar 10.136 kunjungan atau turun 21,87% dibandingkan Agustus 2023 dan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada Agustus 2024 berada pada angka 51,94% atau turun 5,54% dibandingkan Agustus 2023.

Secara umum, penyerapan tenaga kerja di DIY pada Agustus 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 2,14 juta orang menjadi 2,18 juta orang, dengan pertumbuhan

sebesar 2,01% (yoy). Penyerapan tenaga kerja di DIY pada Agustus 2024 menurut jenis pekerjaan masih didominasi tenaga kerja informal. Ditinjau secara historis, persentase tenaga kerja informal berfluktuasi dengan tren menurun, yakni sebesar 1,16 juta orang pada Agustus 2024 dengan pertumbuhan 0,76% (yoy) lebih baik dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya yang mengalami penurunan pada level -3,81% (yoy). Sektor informal merupakan sektor yang umumnya menampung tenaga kerja dengan tingkat keterampilan dan pendidikan rendah, serta seringkali menjadi tumpuan bagi penduduk yang berpendapatan rendah. Sektor informal dapat dikategorikan menjadi sektor informal pertanian, sektor informal industri, dan sektor informal jasa (BPS, 2023).

Sejalan dengan hal tersebut, tenaga kerja formal juga mengalami peningkatan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1,02 juta orang atau tumbuh sebesar 3,48% (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami penurunan sebesar -5,35% (yoy). Peningkatan ini utamanya ditopang oleh sektor tenaga kerja dengan status Buruh/Karyawan/Pegawai dengan total tenaga kerja sebanyak 947,24 ribu orang atau mengalami kenaikan sebesar 3,28% (yoy). Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan positif terhadap kualitas penduduk bekerja, di mana semakin tinggi pendidikan, maka keahlian dan produktivitas kerja juga diharapkan semakin meningkat sehingga dapat menjadi akselerator bagi perekonomian DIY menuju semakin baik (Tabel 6.3).

Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, serapan tenaga kerja di DIY pada Agustus 2024 masih didominasi oleh penduduk bekerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 546,58 ribu orang (25,04%), diikuti oleh penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah sebanyak 543,64 ribu orang (24,91%). Sementara itu, penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi (Diploma ke atas) sebanyak 18,08%, yang mencakup 314,58 ribu orang (14,41%) dengan tingkat pendidikan Universitas dan 80,11 ribu orang (3,67%) dengan tingkat pendidikan Diploma.

Pada Agustus 2024, serapan tenaga kerja lulusan Universitas meningkat signifikan menjadi 7,99% (yoy) dari Agustus 2023 sebesar -8,92% (yoy). Peningkatan ini sejalan dengan masih tingginya proporsi tenaga kerja berstatus Buruh/Karyawan/Pegawai di DIY pada Agustus 2024. Adapun serapan lulusan SMK tumbuh positif, meskipun tidak sekuat tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,58% (yoy). Sementara itu, serapan lulusan SMA dan Diploma I/II/III masing-masing mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar -1,30% (yoy); dan -21,63% pada Agustus 2024. Membaiknya serapan tenaga lulusan universitas tersebut mencerminkan masyarakat DIY semakin sadar pentingnya peran pendidikan tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang cenderung memiliki keahlian dan produktivitas yang tinggi dalam bekerja, sehingga lebih siap dan mampu bersaing dalam dunia kerja, terlebih dalam

Tabel 6.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di DIY

LAPANGAN PEKERJAAN	AGS-22	AGS-23	AGS-24
Pertanian	17,94	19,65	19,41
Pertambangan	0,31	0,32	0,26
Industri Pengolahan	17,28	13,74	17,11
Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,04	0,15
Pengadaan Air	0,32	0,45	0,38
Konstruksi	7,10	6,96	6,35
Perdagangan	19,84	20,82	19,72
Transportasi	4,49	3,76	3,94
Akomodasi dan Makan Minum	10,07	11,08	10,43
Informasi dan Komunikasi	1,01	0,99	0,98
Jasa Keuangan	1,09	1,30	1,29
Real Estate	0,21	0,18	0,27
Jasa Perusahaan	2,33	3,08	2,87
Administrasi Pemerintahan	3,02	3,10	3,43
Jasa Pendidikan	6,31	6,69	6,04
Jasa Kesehatan	2,37	2,14	1,71
Jasa Lainnya	6,23	5,71	5,65

Sumber: BPS DIY

Tabel 6.3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

STATUS PEKERJAAN UTAMA	AGS-22		AGS-23		AGS-24	
	Pangsa (%)	%yoy	Pangsa (%)	%yoy	Pangsa (%)	%yoy
Formal	1044,86	5,02	988,96	-5,35	1023,34	3,48
Berusaha dibantu Buruh Tetap	82,68	5,16	71,77	-13,20	76,1	6,03
Buruh/Karyawan/Pegawai	962,18	5,01	917,19	-4,68	947,24	3,28
Informal	1196,29	-3,03	1150,74	-3,81	1159,43	0,76
Berusaha Sendiri	468,31	9,60	462,7	-1,20	454,28	-1,82
Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	327,19	-8,50	305,04	-6,77	305,76	0,24
Pekerja Bebas	131,3	-12,58	112,06	-14,65	104,91	-6,38
Pekerja Keluarga/tak Dibayar	269,49	-9,72	270,94	0,54	294,48	8,69
TOTAL	2241,15	0,57	2139,7	-4,53	2182,77	2,01

Sumber: BPS DIY

Tabel 6.4 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditematkan di DIY

STATUS PENDIDIKAN	AGS-22		AGS-23		AGS-24	
	Pangsa (%)	%yoy	Pangsa (%)	%yoy	Pangsa (%)	%yoy
SD ke bawah	568,29	3,90	539,93	-4,99	543,63	0,69
SMP	402,26	8,30	328,93	-18,23	342,88	4,24
SMA	376,05	1,22	359,65	-4,36	354,99	-1,30
SMK	479,56	-7,82	517,68	7,95	546,58	5,58
DI/II/III	95,12	-12,73	102,22	7,46	80,11	-21,63
Universitas	319,84	3,37	291,31	-8,92	314,58	7,99
TOTAL	2241,12	0,57	2139,72	-4,52	2182,77	2,01

Sumber: BPS DIY

era digitalisasi saat ini. Kondisi tersebut juga sejalan dengan naiknya penyerapan tenaga kerja di DIY pada Agustus 2024 dari 2,14 juta orang menjadi 2,18 juta orang, dengan pertumbuhan sebesar 2,01% (yoy).

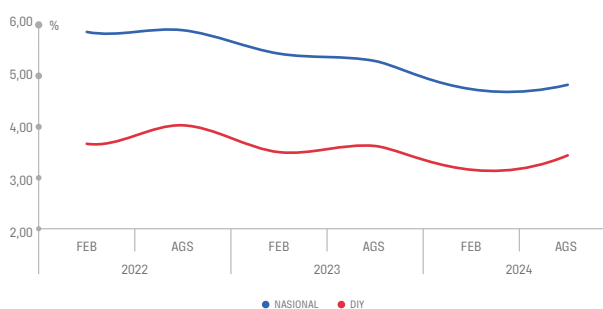
6.2.2. Pengangguran

Dalam kurun tiga tahun terakhir, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)² di DIY cenderung berada pada tren yang menurun. TPT DIY pada Agustus 2024 tercatat sebesar 3,48%, menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar 3,69% (Grafik 6.3). Angka TPT di DIY tersebut berada di bawah nasional yang tercatat 4,91%. Penurunan angka TPT sejalan dengan berlanjutnya peningkatan kunjungan wisatawan yang turut mendorong kinerja lapangan usaha yang berkaitan dengan pariwisata sehingga penyerapan tenaga kerja meningkat.

Ditinjau berdasarkan daerahnya, penurunan TPT DIY disebabkan oleh melandainya TPT di perkotaan dan perdesaan. TPT di perkotaan mengalami penurunan dari 4,19% pada Agustus 2023 menjadi 3,97% pada Agustus 2024. Senada dengan perkotaan, TPT di perdesaan pada Agustus 2024 sebesar 2,04%, menurun dibandingkan Agustus 2023 sebesar 2,33% (Grafik 6.4). Adanya penurunan TPT pada Agustus 2024, baik di perkotaan maupun di perdesaan mencerminkan banyak lowongan kerja yang terisi sejalan dengan membaiknya optimisme pelaku usaha pasca pemilu pada awal 2024.

Apabila dilihat dari pergerakan TPT di perdesaan dan perkotaan, secara historis, terlihat bahwa pengangguran di perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan. Lebih tingginya pengangguran di perkotaan terutama disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kualifikasi pekerja dan kebutuhan pemberi kerja serta imbas urbanisasi dari desa ke kota. Sementara di perdesaan, selain didukung oleh penduduk perdesaan yang melakukan urbanisasi, kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan tidak terlalu kompleks sehingga penduduk perdesaan dapat melakukan kegiatan apa saja, seperti pekerja keluarga, pekerja, pekerja bebas pertanian, dan sebagian sebagai pekerja urban dengan cara pulang-pergi ke perkotaan dengan memanfaatkan kemudahan kepemilikan kendaraan bermotor dan kondisi infrastruktur jalan yang memadai.

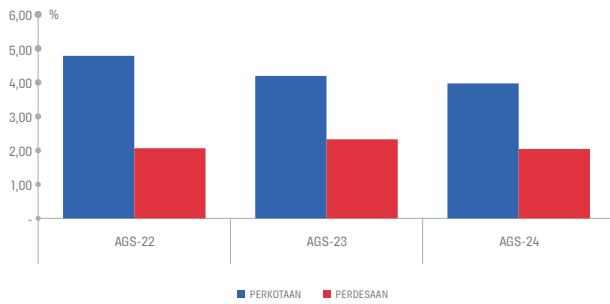
Grafik 6.3 Perkembangan TPT di DIY dan Nasional



Sumber: BPS DIY

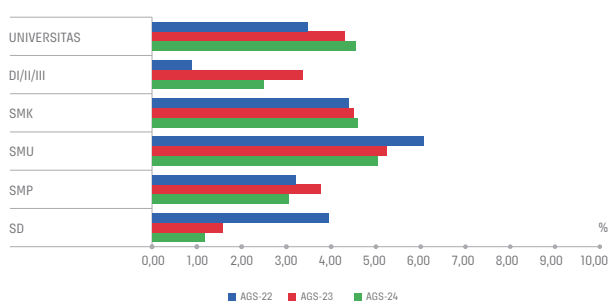
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Grafik 6.4 Perkembangan TPT di DIY Berdasarkan Wilayah



Sumber: BPS DIY

Grafik 6.5 Perkembangan TPT Menurut Pendidikan di DIY



Sumber: BPS DIY

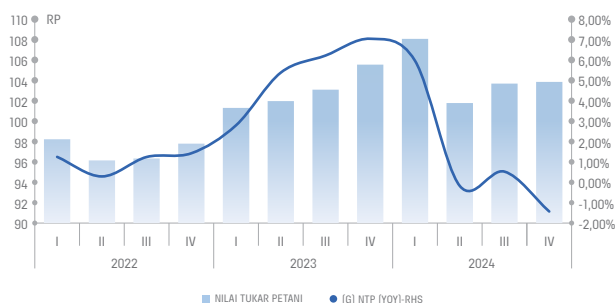
Berdasarkan tingkat pendidikan, penurunan TPT terjadi pada jenjang pendidikan SD ke bawah, SMP, SMU, dan Diploma. Penurunan TPT tertahan oleh meningkatnya pengangguran terbuka pada jenjang pendidikan Universitas dan SMK seiring ketatnya persaingan dalam pasar kerja sehingga dituntut untuk memiliki keahlian dan ketrampilan yang memadai (Grafik 6.5).

6.3. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

6.3.1. Kesejahteraan Petani

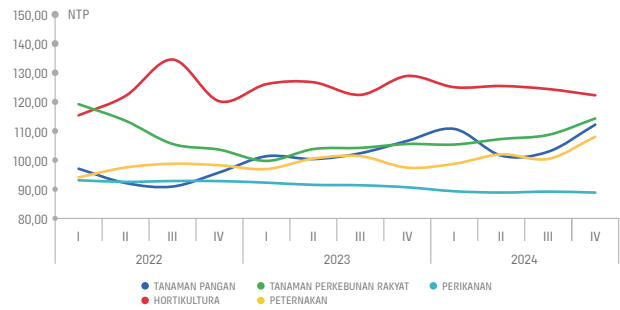
Nilai Tukar Petani (NTP) di DIY pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 104,46 relatif mengalami kontraksi sebesar 1,43% (yoy) jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya terutama pada kelompok hortikultura dan perikanan (Grafik 6.6). Walaupun terkontraksi dibandingkan

Grafik 6.6 Perkembangan NTP DIY



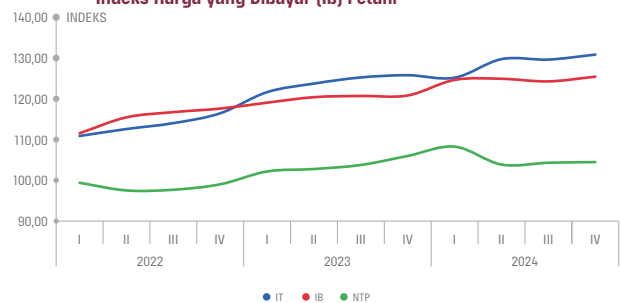
Sumber: BPS DIY

Grafik 6.7 Perkembangan NTP Berdasarkan Subsektor



Sumber: BPS DIY

Grafik 6.8 Perkembangan NTP dan Indeks Harga yang Diterima (It) dan Indeks Harga yang Dibayar (Ib) Petani



Sumber: BPS DIY

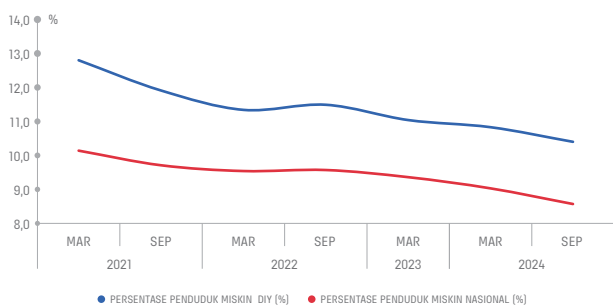
tahun sebelumnya, NTP mengalami kenaikan pada beberapa subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan peternakan dengan indeks berturut-turut sebesar 112,18; 114,4; dan 108,02. Ketiga sub sektor tersebut tercatat tumbuh masing-masing sebesar 5,21% (yoy); 8,31% (yoy), dan 10,38% (yoy) yang mengindikasikan terjaganya pendapatan petani pada sub sektor tersebut, seiring dengan mulai masuknya periode panen untuk tanaman padi dan tanaman perkebunan.

Peningkatan pada 3 subsektor NTP terbukti memperbaiki kesejahteraan petani. Hal ini terindikasi dari pertumbuhan indeks harga yang diterima petani (It) yang lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Pada triwulan IV 2024, It DIY tercatat sebesar 130,83, lebih tinggi dibandingkan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 125,41 dengan pertumbuhan sebesar 0,94% (qoq). Demikian halnya, Ib pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 125,41, tumbuh sebesar 0,93% dari triwulan III 2024 dengan It sebesar 124,26 (Grafik 6.8).

6.4. KEMISKINAN

Tingkat kemiskinan di DIY pada bulan September 2024 melanjutkan kecenderungan dari sisi jumlah dan persentase yang terus menurun sebesar 3,38% dibandingkan posisi di bulan Maret 2024. Jumlah penduduk miskin DIY pada Maret 2024 tercatat 430,47 ribu orang atau 10,4% dari seluruh penduduk DIY. Penurunan jumlah penduduk miskin DIY ini sejalan dengan penurunan rasio penduduk miskin sebesar 0,43 poin yang sebelumnya pada bulan Maret 2024 tercatat sebesar 10,83%

Grafik 6.9 Perkembangan Penduduk Miskin

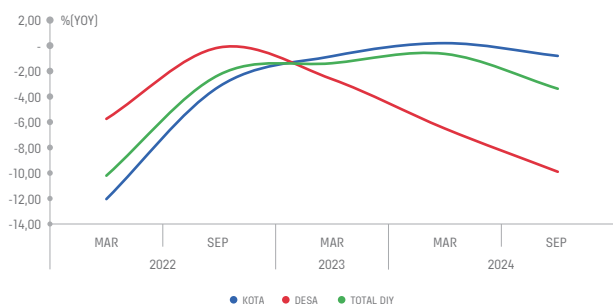


Sumber: BPS DIY

dari seluruh penduduk DIY. Penurunan jumlah maupun persentase penduduk miskin DIY dibandingkan tahun sebelumnya selaras dengan adanya inflasi yang terkendali di DIY. Walaupun mengalami penurunan, persentase jumlah penduduk miskin di DIY hingga September 2024 masih berada di atas persentase penduduk miskin nasional yang ikut menurun dengan persentase sebesar 8,57%. (Grafik 6.9).

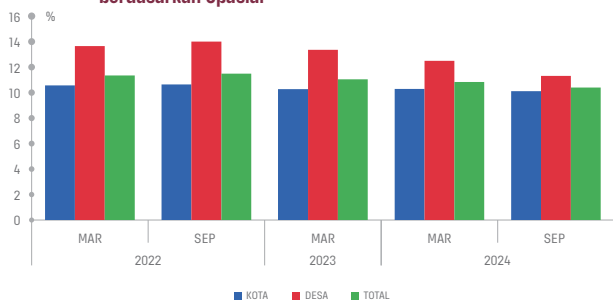
Secara spasial, penurunan tingkat kemiskinan di DIY terjadi baik di perkotaan maupun di pedesaan (Grafik 6.10). Penurunan tingkat kemiskinan di DIY ini didorong oleh penurunan tingkat kemiskinan di pedesaan yang menjadi 11,31% dengan jumlah 113,66 ribu atau turun sebesar 9,9% dibandingkan posisi bulan Maret 2024. Sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan di pedesaan, tingkat kemiskinan perkotaan turun sebesar 0,8%

Grafik 6.10 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin



Sumber: BPS DIY

Grafik 6.11 Perkembangan Persentase Jumlah Penduduk Miskin berdasarkan Spasial



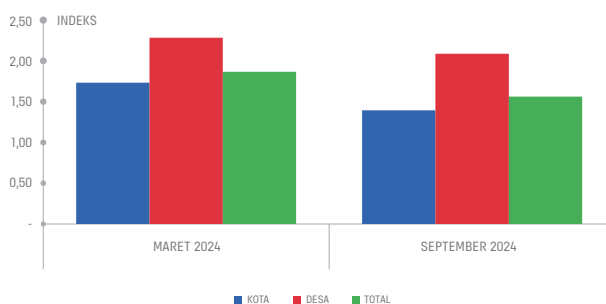
Sumber: BPS DIY

dengan persentase jumlah penduduk miskin perkotaan sebesar 10,11% (Grafik 6.11). Adapun dengan jumlah penduduk miskin di perkotaan sebesar 316,81 ribu, menjadikan jumlah penduduk miskin di perkotaan menjadi kontributor terbesar pada tingkat kemiskinan di DIY.

Sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan³, tingkat kedalaman (P1) dan tingkat keparahan (P2) kemiskinan⁴ DIY menurun dengan masing-masing tercatat nilai indeks sebesar 1,56 dan 3,38. Indeks P1 dan P2 tersebut menunjukkan penurunan jika dibandingkan pada bulan Maret 2024 yang tercatat nilai indeks sebesar 1,87 untuk tingkat kedalaman dan 0,45 pada tingkat kemiskinan. Penurunan dari tingkat kedalaman kemiskinan menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan penurunan dari tingkat keparahan menunjukkan penyempitan kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

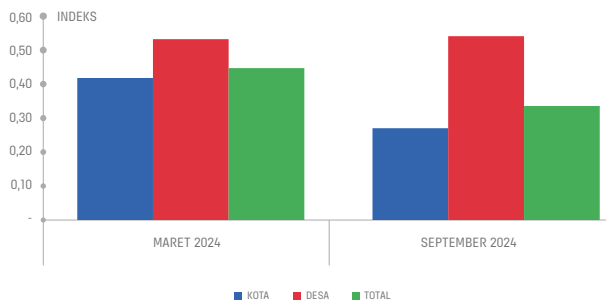
Apabila dibandingkan antara daerah pedesaan dan perkotaan, indeks kedalaman kemiskinan (P1) baik di perkotaan maupun di pedesaan menunjukkan kecenderungan menurun. (Grafik 6.12). Selain itu, indeks keparahan kemiskinan di perkotaan mengalami penurunan dari 0,42 pada Maret 2024 menjadi 0,27 pada September 2024 tertahan indeks keparahan kemiskinan (P2) di pedesaan menunjukkan kenaikan dari nilai indeks 0,54 pada Maret 2024 menjadi 0,55 pada September 2024. Hal ini menunjukkan gambaran bahwa terdapat kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin pedesaan semakin bertambah (Grafik 6.13).

Grafik 6.12 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)



Sumber: BPS DIY

Grafik 6.13 Perkembangan Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2)



Sumber: BPS DIY

3. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 6.5 Garis Kemiskinan Menurut Tipe Daerah di DIY

DAERAH/TAHUN	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan			
Maret 2022	392.290	151.531	543.821
Sept 2022	412.821	161.094	573.915
Maret 2023	431.962	166.963	598.925
Maret 2024	455.545	173.081	628.626
Sept 2024	466.983	175.116	642.099
Perdesaan			
Maret 2022	338.551	117.032	455.583
Sept 2022	352.689	128.078	480.767
Maret 2023	366.712	133.230	499.942
Maret 2024	385.903	138.285	524.188
Sept 2024	393.777	137.739	531.516
Kota+Desa			
Maret 2022	378.902	142.770	521.673
Sept 2022	398.363	152.979	551.342
Maret 2023	414.480	158.542	573.022
Maret 2024	437.891	164.546	602.437
Sept 2024	447.321	166.049	613.370

Sumber: BPS DIY

Garis Kemiskinan (GK)⁴ di DIY pada September 2024 sebesar Rp613.370,00 per kapita per bulan, bertumbuh 1,81% dibanding bulan Maret 2024. Lebih rinci, GK di perkotaan dan pedesaan berturut-turut pada September 2024 adalah sebesar Rp642.099,00 dan Rp531.516,00 per kapita per bulan yang juga turut bertumbuh masing-masing sebesar 7,21% dan 6,32%. Dilihat dari grafik 6.15, tren pertumbuhan GK terus menurun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang sejalan dengan penurunan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) (Grafik 6.15).

Garis Kemiskinan (GK) DIY menunjukkan volatilitas sejalan dengan tren laju inflasi. Peningkatan GK terjadi baik pada komoditas makanan maupun bukan makanan. Komoditas makanan masih memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam

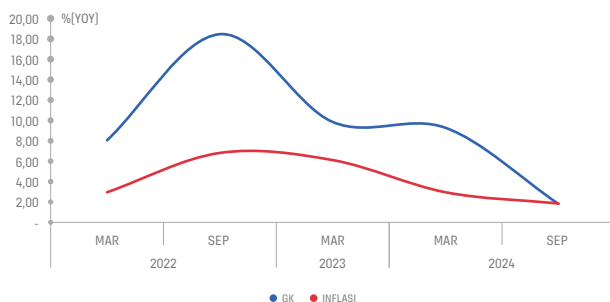
penentuan GK, yaitu sebesar 72,93%, sementara sisanya merupakan kontribusi dari komoditas non-makanan. Pada September 2024, Garis Kemiskinan Makanan (GKM) DIY tercatat sebesar Rp447.321 per kapita, meningkat 2,15% dibandingkan Maret 2024. Sementara itu Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) tercatat Rp166.049,00 per kapita, meningkat 0,91% dibandingkan Maret. Secara umum GK DIY meningkat 1,81% dibandingkan bulan Maret 2024 (Grafik 6.14 dan 6.15).

Secara spasial, pertumbuhan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Pada September 2024, GKM Perkotaan meningkat sebesar 8,11% dan GKM Perdesaan meningkat sebesar 7,38%. Empat komoditas makanan yang paling berkontribusi terhadap pembentukan GK baik di perkotaan maupun di pedesaan adalah Beras, Rokok Kretek Filter, Daging Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras. Adapun kontributor pertumbuhan GK terbesar baik di perkotaan maupun pedesaan adalah komoditas Beras dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 8,86% dan 22,64% (Grafik 6.16 dan Grafik 6.17).

Sementara itu, Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) September 2024 tercatat sebesar Rp166.049 per kapita, atau tumbuh 0,91% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk komoditi bukan makanan, jenis komoditas bensin, perumahan, dan listrik mempunyai andil terbesar dalam pembentukan garis kemiskinan di perkotaan dan pedesaan. Sumbangan komoditi tersebut dalam pembentukan GK di perkotaan masing-masing sebesar 6%; 8,76%; 2;13%; dan 2,02% (Grafik 6.18). Adapun untuk GK pedesaan, sumbangan komoditas tersebut masing-masing sebesar 8,6%; 5,61%; dan 1,6%. Dari Grafik 6.19, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan pertumbuhan andil pada komoditas Bensin dan penurunan andil pada komoditas Perumahan pada pedesaan, dimana komoditas tersebut cenderung memiliki pertumbuhan yang stabil di perkotaan.

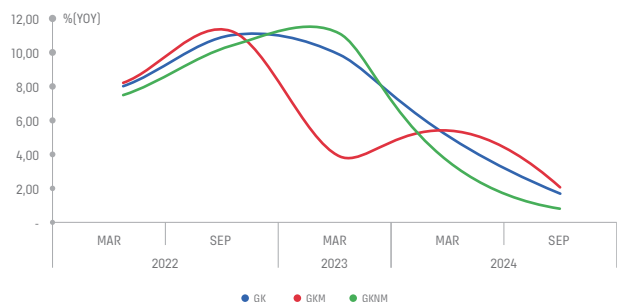
Penurunan ketimpangan pengeluaran penduduk DIY tercermin dari Indeks Gini Ratio yang menurun dari periode sebelumnya. Pada bulan Maret 2024, indeks Gini Ratio tercatat sebesar 0,435 atau turun 0,017 poin pada bulan September 2024 menjadi 0,428. Penurunan indeks Gini Ratio sejalan dengan penurunan

Grafik 6.14 Perkembangan GK dan Inflasi



Sumber: BPS DIY

Grafik 6.15 Perkembangan Garis Kemiskinan



Sumber: BPS DIY

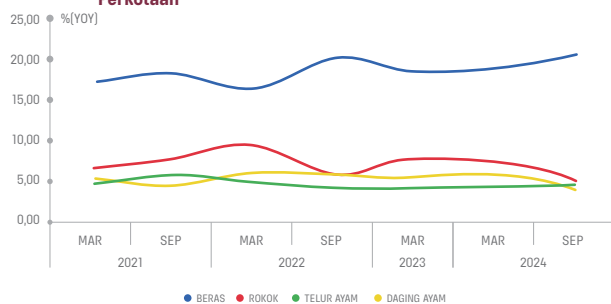
4. Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai minimum yang dibutuhkan oleh seorang penduduk untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (basic needs). Penduduk yang memiliki pendapatan di bawah Garis Kemiskinan dianggap sebagai penduduk miskin.

Gini Ratio di perkotaan dan tertahan dengan kenaikan Gini Ratio di pedesaan. Indeks Gini pedesaan lebih rendah dibandingkan di perkotaan, masing-masing tercatat sebesar 0,429 dan 0,355 pada September 2024. (Grafik 6.20).

Walaupun mengalami penurunan indeks Gini Ratio, tingkat ketimpangan DIY ini masih lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 0,381 nasional (Grafik 6.21). Fenomena tingkat Gini Ratio DIY yang tinggi ini diperkirakan terjadi disebabkan oleh kesenjangan pendapatan yang dilihat dengan pengeluaran

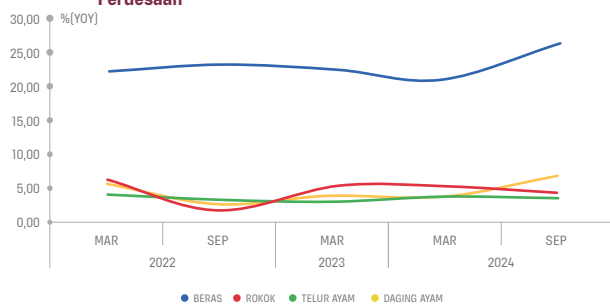
penduduk lokal dengan penduduk pendatang sangat tinggi yang didominasi pola konsumsi produk tersier. Hal ini dapat dilihat dengan fenomena kenaikan indeks Gini Ratio di pedesaan. Mayoritas penduduk pendatang melakukan pengeluaran yang signifikan lebih besar, terutama untuk produk makanan jadi, sewa rumah, maupun produk gaya hidup, seperti perawatan kecantikan dan kesehatan. Hal tersebut juga diiringi dengan tingkat UMP DIY tahun 2024 sebesar Rp2.125.897,61, terendah ketiga secara nasional.

Grafik 6.16 Perkembangan Komoditas Penyumbang Terbesar terhadap GKM Perkotaan



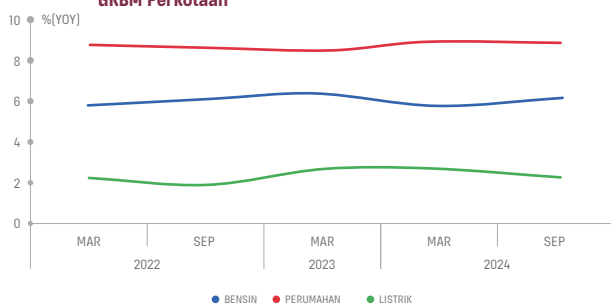
Sumber: BPS DIY

Grafik 6.17 Perkembangan Komoditas Penyumbang Terbesar terhadap GKM Pedesaan



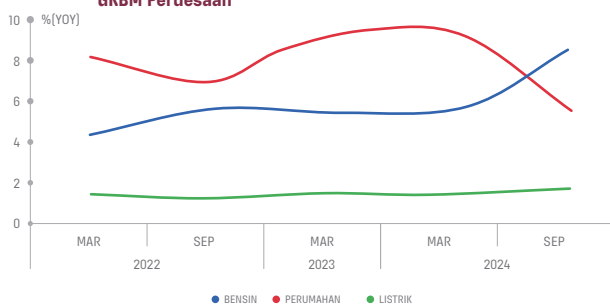
Sumber: BPS DIY

Grafik 6.18 Perkembangan Komoditas Penyumbang Terbesar terhadap GKBM Perkotaan



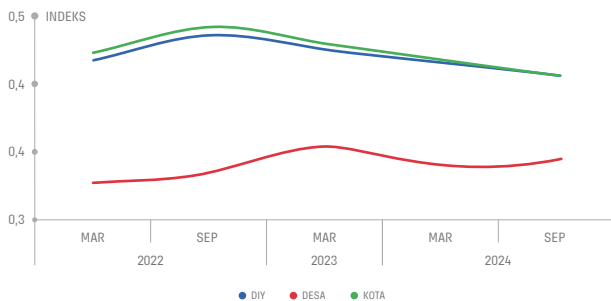
Sumber: BPS DIY

Grafik 6.19 Perkembangan Komoditas Penyumbang Terbesar terhadap GKBM Pedesaan



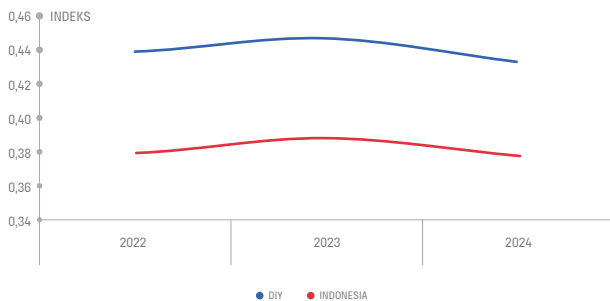
Sumber: BPS DIY

Grafik 6.20 Perkembangan Gini Ratio DIY



Sumber: BPS DIY

Grafik 6.21 Perkembangan Gini Ratio DIY Secara Spasial



Sumber: BPS DIY





07

Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian DIY tahun 2025 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2024. Hal itu didukung oleh perkembangan inflasi DIY yang diproyeksikan terjaga pada rentang sasaran $2,5 \pm 1\%$ sepanjang tahun 2025 seiring relatif kondusifnya faktor cuaca yang mendukung produksi komoditas pangan.

Proyeksi Ekonomi DIY 2025 (yoy)

4,8-5,6%

Proyeksi Inflasi 2025 (yoy)

1,5-3,5%

7.1 Prospek Perekonomian Daerah 2025

Secara umum pada 2025, perekonomian DIY diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan 2024. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2025 diperkirakan berada di kisaran 4,8 – 5,6% (yoy). Pada awal tahun 2025, ekonomi DIY ditopang oleh kinerja yang berpotensi meningkat pada periode musiman Ramadhan dan HBKN Idul Fitri yang bergeser ke triwulan I 2025. Kinerja investasi juga berpotensi mengalami pertumbuhan seiring dengan membaiknya kepercayaan investor dan berlanjutnya pembangunan di daerah. Namun di sisi lain, ketidakpastian ekonomi global diwaspadai dapat mempengaruhi kinerja ekspor dan impor DIY.

7.1.1 Proyeksi Ekonomi Sisi Permintaan

Konsumsi masyarakat diperkirakan meningkat sejalan kebijakan kenaikan UMP dan UMK tahun 2025 didukung oleh inflasi yang terkendali dalam kisaran target nasional. Selain itu, penyaluran THR yang disertai dengan kenaikan gaji PNS, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semakin meluas diperkirakan dapat turut mendorong kinerja pengeluaran pemerintah dan konsumsi RT. Permintaan masyarakat yang meningkat seiring dengan HBKN Idul Fitri juga dapat

mendorong kinerja LU industri pengolahan dan Akmamin dalam rangka pemenuhan permintaan tersebut. Namun, pertumbuhan lebih tinggi tertahan oleh implementasi Inpres No. 1/2025 terkait realokasi anggaran belanja yang berpotensi mempengaruhi sentimen masyarakat sehingga menahan sektor pariwisata dan MICE.

Dari sisi investasi, penyelesaian pembangunan beberapa infrastruktur seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan tol Yogyakarta-Solo dan Yogyakarta-Bawen, serta berbagai pembangunan infrastruktur DIY bagian selatan berupa jalan, jembatan, rest area, dan revitalisasi jalan diperkirakan akan mendorong kinerja sektor konstruksi. Adanya situasi politik yang mulai kondusif pasca pemilu juga menjadi salah satu faktor yang mendorong kinerja investasi daerah.

Dari sisi ekspor, perkembangan kondisi global berpotensi mempengaruhi kinerja ekspor DIY. Kinerja ekspor DIY diperkirakan meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi negara mitra dagang dan potensi peningkatan pasar AS akibat perang dagang dengan Tiongkok.

Tabel 7.1 Faktor Pendorong dan Penahan Pertumbuhan Ekonomi DIY Sisi Permintaan Tahun 2025

Permintaan	Upside	Downside
Konsumsi RT	<ul style="list-style-type: none"> Kenaikan UMP dan UMK tahun 2025 sebesar 6,5%; kenaikan gaji dan tunjangan ASN sebesar 8%; dan gaji pensiunan ASN sebesar 12%. Berlanjutnya penyaluran bansos untuk meningkatkan konsumsi Masyarakat Penyelenggaraan berbagai event yang berskala nasional maupun lokal sebanyak 200 event yang terdiri dari karnaval, festival, maupun olahraga. Frekuensi cuti bersama dan hari libur nasional di 2025 (27 hari) dapat mendorong peningkatan konsumsi dengan bertambahnya jumlah wisatawan. 	<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya potensi inflasi yang meningkat akibat tekanan global maupun domestik yang mempengaruhi ekspektasi konsumen. Kenaikan inflasi dapat menekan kemampuan konsumsi masyarakat.
Konsumsi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Penyaluran gaji ke-13 dan 14 ASN serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semakin meluas diperkirakan dapat turut mendorong kinerja pengeluaran pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Realokasi belanja Pemda DIY sebagai dampak pemberlakuan Inpres 1/2025, termasuk penurunan Dana Keistimewaan DIY dari Rp1,2 triliun menjadi Rp1 triliun.
Investasi	<ul style="list-style-type: none"> Investasi bangunan dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di DIY antara lain jalur kereta YIA-DIY, jalan tol Yogyakarta-Solo dan Yogyakarta-Bawen yang sedang berjalan dan ditargetkan dapat beroperasi di 2025. Pembangunan infrastruktur pemerintah daerah, diantaranya pembangunan jalan, jembatan, rest area, dan revitalisasi jalan. Pulihnya kepercayaan investor seiring dengan pembentukan pemerintahan baru pasca pemilu. 	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya lahan yang berstatus clean and clear terkait pengembangan kawasan industri sehingga berpotensi menghambat pelaku usaha untuk melakukan investasi. Promosi investasi yang masih terbatas.
Ekspor-Impor	<ul style="list-style-type: none"> Permintaan mitra dagang utama DIY, khususnya Eropa dan Jepang diperkirakan membaik sejalan dengan prospek perekonomiannya. Selain itu, perekonomian ASEAN 5 tetap kuat. Penambahan maskapai rute direct flight untuk penerbangan internasional. Pemberian Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk mendukung ekspor bagi para pelaku UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya infrastruktur penunjang ekspor, antara lain tidak adanya pelabuhan. Saat ini ekspor melalui Pelabuhan Tanjung Mas di Jawa Tengah. Masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS berpotensi menghambat kinerja ekspor mengingat AS merupakan negara tujuan utama ekspor

Permintaan	Upside	Downside
		Revisi PP No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari sebelumnya memberlakukan retensi DHE 30% dengan jangka waktu minimal 3 bulan menjadi memberlakukan retensi DHE 100% untuk periode 1 tahun. Hal ini berpotensi menahan biaya untuk pembelian bahan baku.

7.1.2 Proyeksi Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

Dari sisi lapangan usaha (LU), meningkatnya pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2025 dipengaruhi oleh kinerja beberapa LU Utama. LU industri pengolahan yang merupakan kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi DIY diperkirakan bertumbuh positif seiring dengan adanya kepastian iklim usaha pasca pemilu. Di samping itu, kinerja LU yang berkaitan dengan pariwisata diperkirakan terus berlanjut seiring dengan peningkatan **arus wisatawan baik domestik** maupun internasional sehingga dapat **berdampak positif pada tumbuhnya LU Penyediaan akomodasi dan makan minum**, Sub LU

Industri Pengolahan makanan dan minuman, LU Perdagangan, dan LU Transportasi dan Pergudangan.

Optimisme pada sektor lainnya tercermin pada penyelesaian beberapa infrastruktur seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan tol Yogyakarta-Solo dan Yogyakarta-Bawen, pembangunan wilayah DIY bagian selatan, serta berbagai pembangunan infrastruktur pemerintah daerah seperti jalan, jembatan, dan *rest area* yang diperkirakan akan mendorong kinerja sektor konstruksi lebih tinggi dibanding capaian sebelumnya.

Tabel 7.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pertumbuhan Ekonomi DIY Sisi Penawaran Tahun 2025

Lapangan Usaha	Upside	Downside
Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi digitalisasi dan teknologi pertanian diharapkan dapat mendorong produksi komoditas pertanian. Replikasi website dipanen.id di seluruh kabupaten/kota di DIY untuk mempermudah monitoring distribusi pasokan dan pengendalian harga. Berlanjutnya GNPIP yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan produksi pertanian. Optimalisasi KAD intra provinsi dan antar provinsi untuk menjaga pasokan dan harga komoditas pangan penting. Inisiasi social movement untuk mendorong petani tetap berproduksi di tengah gejolak deflasi. Rencana program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan akan mendorong kinerja pertanian karena berpotensi meningkatkan permintaan akan kebutuhan bahan baku Implementasi penyaluran pupuk bersubsidi yang langsung disalurkan dan ditebus petani per 1 Januari 2025 diperkirakan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian Penguatan optimalisasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dalam rangka menjaga wilayah budidaya cadangan pertanian pangan. Penambahan kelompok tani baru untuk peningkatan ketahanan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Alih fungsi lahan pertanian di DIY karena pembangunan proyek infrastruktur.
Industri Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> Keberlanjutan pertumbuhan industri pengolahan makanan sejalan dengan tetap kuatnya kinerja pariwisata. Masih diselenggarakannya pameran berskala internasional seperti Jogja International Furniture & Craft Fair Indonesia (JIFFINA) dengan komoditas : Mebel Kayu, Home Deco, Kerajinan Rotan. Kolaborasi dan koordinasi antara BI dan dinas terkait dalam mendorong UMKM naik kelas Pembatalan kebijakan ekstensifikasi barang kena cukai (BKC) berupa cukai plastik pada tahun 2025 diperkirakan mendorong peningkatan kinerja industri pengolahan Berlanjutnya stimulus KLM di sepanjang tahun 2025 Berlanjutnya insentif PPnBM DTP 10% untuk KBLBB CKD, PPnBM 15% DTP untuk KBLBB impor CBU dan CKD, Bea Masuk 0% untuk KBLBB CBU, dan PPnBM DTP 3% untuk kendaraan hybrid pada tahun 2025. Perpanjangan Kebijakan LTV/FTV s.d. 31 Desember 2025. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan biaya tenaga kerja seiring dengan kenaikan UMP 2025. Potensi kenaikan biaya bahan baku yang berasal dari domestik maupun impor akibat dinamika berbagai kebijakan.

Lapangan Usaha	Upside	Downside
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	<ul style="list-style-type: none"> Frekuensi cuti bersama dan hari libur nasional di 2025 sebanyak 27 hari. Hal ini mendorong peningkatan konsumsi dengan bertambahnya jumlah wisatawan ke DIY. Pembukaan sebagian jalan Tol Jogja-Bawen dan Jogja-Solo mempermudah akses menuju DIY. Pembukaan hotel baru Grand Inna Malioboro (setelah renovasi) dan Swissbel Hotel Airport Yogyakarta dengan total kamar yang dapat diboooking sebanyak 369 kamar. Pembukaan rute pesawat baru YIA - Thailand untuk 5 maskapai Pembukaan 4 rute baru dari Bandara YIA, yakni Balikpapan, Jambi, Padang, dan Pangkal Pinang. Secara total Bandara YIA memiliki 17 rute penerbangan domestik dan 3 penerbangan internasional 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya akses konektivitas dari bandara menuju destinasi wisata di DIY. Selain itu juga terdapat keterbatasan akomodasi dan destinasi yang tersedia di sekitar bandara NYIA. Implementasi Inpres No 1/2025 diwaspadai menahan kinerja sektor Akmamin utamanya dari sisi MICE.
Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Investasi bangunan dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di DIY antara lain jalan tol Yogyakarta-Solo-YIA, Yogyakarta-Bawen, Jalur Jalan Lintas Selatan (JLS). Pelaksanaan beberapa proyek pemerintah daerah, terutama pembangunan jalan dan jembatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kendala pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional berpotensi menghambat/menunda penyelesaian proyek infrastruktur. Kenaikan bahan baku konstruksi.

7.2 Prospek Inflasi 2025

Inflasi DIY pada tahun 2025 diperkirakan berada pada sasaran 2,5±1%. Pengendalian inflasi terutama didorong oleh upaya TPID DIY untuk menjaga kestabilan inflasi melalui GNPIP dalam koridor 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif). Beberapa upaya TPID antara lain melakukan komunikasi dan diskusi secara intensif dengan pemerintah daerah, petani, pelaku usaha dan masyarakat untuk menjaga dan mengelola ekspektasi baik dari sisi kepastian produksi, distribusi hingga pola konsumsi, inisiasi *social movement* untuk menyerap komoditas panen yang melimpah dari para petani dengan melibatkan peran ASN dan optimalisasi masjid sebagai agregator untuk komoditas pertanian ke masyarakat, memperkuat komitmen dan optimalisasi KAD baik intra maupun antar provinsi,

pengembangan *Geographic Information System* (GIS) untuk melengkapi data spasial terkait pengendalian inflasi, serta terus mendorong optimalisasi peran segoro amarto sebagai *price reference store* di DIY.

Selain itu, pengkinian data, sinergi dan koordinasi TPID DIY dengan berbagai instransi juga terus diperkuat, untuk memastikan kelancaran dan kesinambungan pasokan bahan pangan. Ke depan, beberapa risiko dan faktor yang perlu diwaspadai dalam menjaga pencapaian target inflasi diantaranya risiko dinamika cuaca, program kerja Pemerintah Pusat seperti makan bergizi gratis dan rencana kenaikan PPN menjadi 12% serta ketidakpsatian global yang berdampak pada tingginya potensi *imported inflation*.

Tabel 7.3 Faktor Pemicu dan Penahan Inflasi 2025

	Upside	Downside
Kelompok Makanan dan Minuman	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya interkoneksi antar wilayah sehingga mendorong peningkatan konsumsi dengan bertambahnya jumlah wisatawan. Peningkatan permintaan antar daerah Peningkatan tekanan geopolitik dunia yang memengaruhi pasokan bahan pangan impor. Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semakin meluas diperkirakan memicu kenaikan permintaan 	<ul style="list-style-type: none"> Berlanjutnya sinergi GNPIP dengan berbagai mitra kerja melalui 4 kerangka utama Inovasi produk pertanian melalui hilirisasi yang dapat meningkatkan nilai jual. Prakiraan inflasi pangan yang lebih terkendali seiring cuaca yang lebih kondusif (menuju netral di tahun 2025).
Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> Tarif sewa rumah dan kontrak rumah yang cenderung mengalami kenaikan setiap tahun. Kenaikan tarif tukang dan harga komoditas konstruksi seiring percepatan penyelesaian PSN Kenaikan harga komoditas global yang berimplikasi pada kenaikan harga bahan bangunan. Potensi penyesuaian tarif LPG 3kg seiring dengan kenaikan HET. 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana penyesuaian tarif PDAM di awal 2025.

	<i>Upside</i>	<i>Downside</i>
Kelompok Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tekanan geopolitik yang berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia. 	Diversifikasi alternatif moda transportasi seiring beroperasinya jalan tol Yogyakarta-Solo-Bawen dan Yogyakarta-Solo-YIA yang ditargetkan selesai pada tahun 2025.
Kelompok Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Kenaikan tarif Pendidikan di DIY rata-rata 10% setiap tahun. • Potensi kenaikan permintaan seiring dengan rencana penambahan jumlah mahasiswa baru di beberapa PTN/PTS besar di DIY. 	
Kelompok Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Kenaikan UMP yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. • Berlanjutnya kenaikan harga emas global akibat ketidakpastian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bauran kebijakan moneter dan fiskal dengan didukung sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Daftar Istilah

Administered price

Harga barang yang diatur oleh pemerintah, misalnya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik.

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan setujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BI 7 Days Reverse Repo Rate

Suku bunga referensi kebijakan moneter dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur setiap bulannya.

BI-RTGS

Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, yang merupakan suatu penyelesaian kewajiban bayar-membayar (*settlement*) yang dilakukan secara *on-line* atau seketika untuk setiap instruksi transfer dana.

Bobot inflasi

Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka (*deposito*).

Ekspor dan Impor

Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar provinsi.

Financing to Deposit Ratio (FDR) atau Loan to Deposit Ratio (LDR)

Rasio pembiayaan atau kredit terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank, baik dalam rupiah dan valas. Terminologi FDR untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank konvensional.

Imported Inflation

Salah satu disgregasi inflasi, yaitu inflasi yang berasal dari pengaruh perkembangan harga di luar negeri (eksternal).

Indeks Ekspektasi Konsumen

Salah satu pembentuk IKK, indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang dengan skala 1 – 100.

Indeks Kondisi Ekonomi

Salah satu pembentuk IKK, indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dengan skala 1 – 100.

Indeks Keyakinan Konsumen (Consumer Confidence)

Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang dengan skala 1 – 100.

Inflasi IHK

Kenaikan harga barang dan jasa dalam satu periode yang diukur dengan perubahan indeks harga konsumen (IHK), yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Inflasi Inti

Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen *volatile foods* dan *administered prices*.

Inflow

Uang yang diedarkan aliran masuk uang kartal ke Bank Indonesia.

Investasi

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi.

Kredit

Penyediaan uang atau tagihan yang sejenis, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk :

- Pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement (NPA)*
- Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

Loan to Deposit Ratio (LDR) atau Financing to Deposit Ratio (FDR)

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Terminologi FDR untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank konvensional.

Loan to Funding Ratio (LFR)

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga dan surat berharga yang diterbitkan bank.

Liaison

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

mtm

Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

Net Inflow

Uang yang diedarkan inflow lebih besar dari outflow.

Non Performing Financing (NPF) atau Non Performing Loan (NPL)

Rasio pembiayaan atau kredit macet terhadap total penyaluran pembiayaan atau kredit oleh bank, baik dalam rupiah dan valas, Terminologi NPF dan pembiayaan untuk bank syariah, sedangkan NPL dan kredit untuk bank konvensional. Kriteria NPF atau NPL adalah (1) kurang lancar, (2) diragukan dan (3) macet.

Omset

Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.

Outflow

Aliran keluar uang kartal dari Bank Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, redistribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

qtq

Quarter to quarter. Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

Real Time Gross Settlement (RTGS)

Sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Sistem pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Volatile Food

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu khususnya komoditas bahan makanan.

yoy

Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

Daftar Singkatan

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	NTN	Nilai Tukar Nelayan
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	NTP	Nilai Tukar Petani
BBM	Bahan Bakar Minyak	PAD	Pendapatan Asli Daerah
BBNKB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal	PLN	Perusahaan Listrik Negara
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah	PMA	Penanaman Modal Asing
BPS	Badan Pusat Statistik	PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
BUKU	Bank Umum Kelompok Usaha	PMTB	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto
CIF	<i>Cost, Insurance and Freight</i>	PPBKB	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
DAU	Dana Alokasi Umum	QTQ	Quarter to quarter
DAK	Dana Alokasi Khusus	RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
DER	<i>Debt Equity Ratio</i>	RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
DOF	Derajat Otonomi Fiskal	RTGS	Real Time Gross Settlement
DPK	Dana Pihak Ketiga	SBT	Saldo Bersih Tertimbang
DSR	<i>Debt Service Ratio</i>	SISKAPERBAPO	Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>	SITC	Standard International Trade Classification
FOB	<i>Free on Board</i>	SKDU	Survei Kegiatan Dunia Usaha
FTV	<i>Financing to Value</i>	SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
IHK	Indeks Harga Konsumen	SPE	Survei Penjualan Eceran
IKK	Indeks Keyakinan Konsumen	TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
IPR	Indeks Penjualan Riil	TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
JISDOR	Jakarta Interbank Spot Dollar Rate	TPK	Tingkat Penghunian Kamar
KI	Kredit Investasi	TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
KK	Kredit Konsumsi	TTL	Tarif Tenaga Listrik
KKB	Kredit Kendaraan Bermotor	UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
KMK	Kredit Modal Kerja	UTLE	Uang Tidak Layak Edar
KPA	Kredit Pemilikan Apartemen	YOY	<i>Year on year</i>
KPR	Kredit Pemilikan Rumah		
LDR	<i>Loan to Deposit Ratio</i>		
LFR	<i>Loan to Funding Ratio</i>		
LNPRT	Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga		
LTV	<i>Loan to Value</i>		
MTM	<i>Month to month</i>		
NPF	<i>Non Performing Financing</i>		
NPL	<i>Non Performing Loan</i>		



Tim Penyusun



Pengarah
Ibrahim

Penanggung Jawab
Hermanto

Koordinator Penyusun
Arya Jodilistyo

Tim Penulis
Abiyoga Gibran
Fitrianda Ayu Utami
Krishna Zada Kurniawan
Prastyastuti Ari Ratnasari
Shaffiya Rahma Jufri
Putro Agus Prasetyo

Kontributor Foto
Muhammad Syarif S.
Hady K. Harahap
Dwi Prayoga
Pilar P.
Muhammad Nurudin
Robert Lens
Ahmad Fathurrizqi As Sirry

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta
Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah
Jl. P. Senopati No.4-6, Yogyakarta
Telp.0274-377755 Fax.0274-371707
<https://www.bi.go.id/>

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta

Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah

Jl. P. Senopati No.4-6, Yogyakarta

Telp.0274-377755 Fax.0274-371707

<https://www.bi.go.id/>